



P-RKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

20 25



Telepon
(0293) 492154



Website
bappeda.temanggungkab.go.id



Alamat
Jalan Kadar 12 Sidorejo
Temanggung, 56221



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah yang disusun dalam suatu dokumen perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan, dan perubahan Lokasi kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah Tahun 2025.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2025
 - c. bab III : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD;
 - e. bab V : rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI : penutup.
- (2) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2025



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 27

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Keterkaitan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1 Capaian Kinerja Keuangan	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Utama	II-3
2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-7
2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-28
2.5 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan	II-68
2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-80
2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-86
2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-99
2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan	II-102
2.10 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	II-115
2.11 Identifikasi Permasalahan	II-120
2.11.1 Identifikasi Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-120
2.11.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-120
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1

3.1.2	Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III-2
3.1.3	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	III-3
3.1.4	Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	III-4
3.1.5	Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung	III-6
3.1.6	Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung	III-7
3.1.6.1	Pertumbuhan Ekonomi	III-8
3.1.6.2	Struktur Ekonomi	III-10
3.1.6.3	PDRB Per Kapita	III-12
3.1.6.4	Inflasi	III-14
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-18
3.2.2	Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III-27
3.2.2.1	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	III-30
3.2.2.2	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-30
3.2.2.3	Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah	III-31
3.2.2.4	Persentase Belanja Tidak Terduga	III-32
3.2.3	Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-32
3.2.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	III-33
3.2.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	III-33
3.3	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	III-37
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1	Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2025-2045	IV-3
4.1.1	Visi	IV-3
4.1.2	Misi	IV-3
4.2	Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	IV-5
4.2.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	IV-5
4.2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	IV-9
4.3	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-14
4.3.1	Tema Pembangunan Tahun 2025	IV-14
4.3.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-14
4.4	Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka	

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045	IV-78
4.5 Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2025	IV-83
4.6 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025	IV-84
4.7 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung	IV-85
4.8 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Mendukung Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	IV-88
4.9 Sasaran dan Program Daerah dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	IV-89
4.10 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung	IV-90
4.11 Dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	IV-92
4.12 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pengendalian Inflasi di Daerah	IV-95
4.13 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah	IV-96
4.14 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Swasembada Pangan Kabupaten Temanggung	IV-98
4.15 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengembangan Industri Kerajinan, dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Temanggung	IV-99
4.16 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung	IV-100
4.17 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim	IV-102
4.18 Fasilitasi Perubahan Iklim	IV-104
4.19 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-106
4.20 Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025	IV-112
4.21 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	IV-121
4.22 Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintahan Daerah	IV-122

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
---	------------

5.1	Rencana Kerja Daerah	V-1
5.1.1	Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 Kabupaten Temanggung Tahun Terhadap Prioritas Nasional (PN)	V-1
5.1.2	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	V-94
5.1.3	Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	V-145
5.1.4	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	V-162
5.1.5	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Pembangunan Pintu Tol Bawen-Yogyakarta	V-164
5.1.6	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Aksi Konversi Stunting	V-165
5.1.7	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap SDGs	V-167
5.1.8	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-176
5.2	Pendanaan Daerah	V-177
5.2.1	Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-177
5.2.2	Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-198

BAB VI PENUTUP	VI-1
-----------------------	-------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Temang- Gung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	II-1
Tabel 2.2	Simbol dan Status Capaian Kinerja	II-3
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Bulan Mei 2025	II-5
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan s.d Mei Tahun 2025	II-8
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan s.d Mei Tahun 2025	II-13
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Mei Tahun 2025	II-17
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d Mei Tahun 2025	II-20
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Mei Tahun 2025	II-22
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana s.d Mei Tahun 2025	II-24
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Mei Tahun 2025	II-26
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja s.d Mei Tahun 2025	II-29
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Mei Tahun 2025	II-32
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan s.d Mei Tahun 2025	II-34
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan s.d Mei Tahun 2025	II-36
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Mei Tahun 2025	II-38
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Mei Tahun 2025	II-41
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Mei Tahun 2025	II-43
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Mei Tahun 2025	II-46
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s.d Mei Tahun 2025	II-49
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Mei Tahun 2025	II-52

Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Mei Tahun 2025	II-54
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal s.d Mei Tahun 2025	II-57
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga s.d Mei Tahun 2025	II-59
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Mei Tahun 2025	II-61
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan s.d Mei Tahun 2025	II-63
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan s.d Mei Tahun 2025	II-65
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan s.d Mei Tahun 2025	II-67
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Mei Tahun 2025	II-69
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Mei Tahun 2025	II-71
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Mei Tahun 2025	II-73
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Mei Tahun 2025	II-76
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Mei Tahun 2025	II-79
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah s.d Mei Tahun 2025	II-81
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD s.d Mei Tahun 2025	II-85
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan s.d Mei Tahun 2025	II-87
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan s.d Mei Tahun 2025	II-91
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian s.d Mei Tahun 2025	II-94
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan s.d Mei Tahun 2025	II-96
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan s.d Mei Tahun 2025	II-98
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan s.d Mei Tahun 2025	II-100
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan s.d Mei Tahun 2025	II-103
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum s.d Mei Tahun 2025	II-116
Tabel 3.1	Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	III-3
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025	III-5
Tabel 3.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa	

	Tengah dan Nasional Tahun 2025	III-9
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK Tahun 2018-2023	III-10
Tabel 3.5	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	III-13
Tabel 3.6	Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional	III-14
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 dan APBD Tahun 2025	III-22
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2025	III-24
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Tahun 2022-2024	III-28
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2025	III-29
Tabel 3.11	Persentase Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-30
Tabel 3.12	Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-31
Tabel 3.13	Persentase Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-31
Tabel 3.14	Persentase Belanja Tidak Terduga Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-32
Tabel 3.15	Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung P-RKPD Tahun 2025	III-34
Tabel 3.16	Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2025	III-35
Tabel 4.1	Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-7
Tabel 4.2	Keselarasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-9
Tabel 4.3	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-14
Tabel 4.4	Prioritas dan Fokus Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-25
Tabel 4.5	Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025	IV-27
Tabel 4.6	Persandingan antara Asta Cita dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung	IV-30
Tabel 4.7	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025	IV-32
Tabel 4.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-41
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi	

	dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-44
Tabel 4.10	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025	IV-63
Tabel 4.11	Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	IV-66
Tabel 4.12	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-81
Tabel 4.13	Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025	IV-86
Tabel 4.14	Sasaran, dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	IV-88
Tabel 4.15	Sasaran dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Makan Gratis Bergizi (MBG)	IV-90
Tabel 4.16	Sasaran dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting	IV-90
Tabel 4.17	Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	IV-93
Tabel 4.18	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-96
Tabel 4.19	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-97
Tabel 4.20	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Dukungan SWasembada Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-100
Tabel 4.21	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengembangan Industri Kerajinan, dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-101
Tabel 4.22	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-101
Tabel 4.23	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-105
Tabel 4.24	Ketersediaan Komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung	IV-108
Tabel 4.25	Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-110
Tabel 4.26	Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	IV-114
Tabel 5.1	Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah	

	Kabupaten Temanggung Prioritas Nasional dalam RKP 2025	V-2
Tabel 5.2	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	V-4
Tabel 5.3	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	V-9
Tabel 5.4	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	V-33
Tabel 5.5	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	V-39
Tabel 5.6	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	V-59
Tabel 5.7	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	V-66
Tabel 5.8	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	V-72
Tabel 5.9	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8 : Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur	V-87
Tabel 5.10	Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2025-2026 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2025	V-94
Tabel 5.11	Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	V-95
Tabel 5.12	Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, Perumahan dan Permukiman	V-101
Tabel 5.13	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Makan Bergizi Gratis (MBG)	V-115

Tabel 5.14	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	V-118
Tabel 5.15	Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Pengendalian Inflasi Daerah	V-133
Tabel 5.16	Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	V-136
Tabel 5.17	Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Swasembada Pangan	V-142
Tabel 5.18	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	V-144
Tabel 5.19	Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2025 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	V-146
Tabel 5.20	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2025	V-162
Tabel 5.21	Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025	V-165
Tabel 5.22	Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender	V-167
Tabel 5.23	Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah	V-176
Tabel 5.24	Program Daerah yang Mendukung Adptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-176
Tabel 5.25	Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang	V-198
Tabel 5.26	Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program	V-201

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan dokumen lain	I-5
Gambar 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian Kinerja Indikator Tujaun dan Sasaran sampai dengan Mei Tahun 2025	II-119
Gambar 2.2	Skala Nilai Peringat Kinerja Capaian Kinerja Indikator IKUPD dan Indikator Program sampai dengan Mei Tahun 2025	II-120
Gambar 3.1	Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-11
Gambar 3.2	Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-12
Gambar 3.3	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	III-20
Gambar 3.4	Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	III-22
Gambar 4.1	Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-1
Gambar 4.2	Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-24
Gambar 4.3	Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan	IV-25
Gambar 4.4	Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan RPD	IV-26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

RKPD Kabupaten Temanggung 2025 merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pada tanggal 20 Juni 2024. Dokumen ini sudah menjadi acuan resmi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dalam semester pertama Tahun 2025 ini. Namun karena munculnya beberapa permasalahan dan kebutuhan dalam dinamika pembangunan daerah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembangunan di enam bulan pertama tahun 2025 maka Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu untuk dilakukan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan sebagaimana menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap alokasi belanja untuk efisiensi belanja daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan harga;
- b. Penghapusan kegiatan karena menyesuaikan kemampuan keuangan, penambahan kegiatan baru yang disesuaikan dengan nomenklatur DAK oleh Pusat, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Penyesuaian saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk Tahun berjalan mempedomani hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban LPP APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024

Fokus kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi;
- b. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (*good governance*);
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

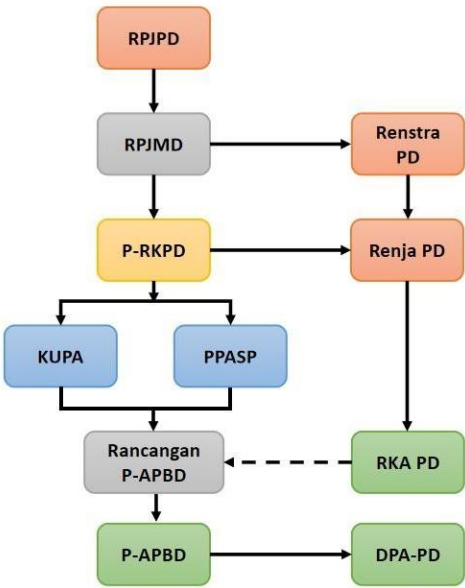
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
34. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
 44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 46. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025; dan
 47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Keterkaitan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dengan dan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Selain berdasarkan evaluasi

capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dokumen Perbuahan RKPD juga disusun berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 untuk penyesuaian struktur anggaran. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang nantinya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 triwulan I.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025; dan
- b. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Temanggung

Tahun 2025 meliputi:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 meliputi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan dan program semua urusan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten

Temanggung Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Capaian Kinerja Keuangan

Upaya pencapaian target pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan pendanaan/ keuangan yang dalam hal ini terkait pembiayaan Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap belanja langsung pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. Pendanaan belanja langsung tersebut dialokasikan tidak hanya untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 namun juga telah disinkronkan dengan dukungan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun prioritas nasional.

Realisasi anggaran Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

sampai dengan Triwulan I

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	720.148.835.923,20	121.966.363.913,00	16,94
2	Dinas Kesehatan	187.004.832.184,00	38.684.014.238,00	20,69
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	166.296.800.000,00	29.502.747.003,00	17,74
4	Puskesmas Parakan	3.073.442.000,00	533.034.077,00	17,34
5	Puskesmas Traji	1.618.259.980,00	283.430.294,00	17,51
6	Puskesmas Kledung	2.307.166.616,00	346.154.238,00	15,00
7	Puskesmas Bansari	2.230.631.000,00	329.893.179,00	14,79
8	Puskesmas Bulu	3.900.346.000,00	734.168.365,00	18,82
9	Puskesmas Temanggung	3.202.971.664,00	401.157.888,00	12,52
10	Puskesmas Dharma Rini	2.547.172.752,00	445.135.092,00	17,48
11	Puskesmas Tlogomulyo	2.000.609.000,00	242.499.180,00	12,12
12	Puskesmas Tembarak	2.760.934.000,00	368.442.649,00	13,34
13	Puskesmas Selopampang	2.684.473.000,00	382.923.813,00	14,26
14	Puskesmas Kranggan	2.181.816.312,00	335.131.333,00	15,36
15	Puskesmas Pare	1.563.708.959,00	138.253.632,00	8,84
16	Puskesmas Pringsurat	2.509.565.294,00	499.123.740,00	19,89
17	Puskesmas Rejosari	1.951.612.000,00	310.732.665,00	15,92
18	Puskesmas Kaloran	2.215.331.825,00	388.986.103,00	17,56
19	Puskesmas Tepusen	1.653.066.000,00	300.608.402,00	18,18
20	Puskesmas Kandangan	3.969.423.680,00	623.059.533,00	15,70
21	Puskesmas Kedu	3.447.182.000,00	673.650.393,00	19,54
22	Puskesmas Ngadirejo	4.264.150.000,00	652.811.470,00	15,31
23	Puskesmas Banjarsari	1.910.910.112,00	272.116.567,00	14,24
24	Puskesmas Jumo	2.414.357.000,00	307.134.942,00	12,72
25	Puskesmas Gemawang	3.357.113.000,00	537.712.129,00	16,02
26	Puskesmas Candirot	2.900.755.000,00	490.578.689,00	16,91
27	Puskesmas Bejen	3.683.893.000,00	668.583.282,00	18,15
28	Puskesmas Tretep	1.959.150.000,00	351.582.777,00	17,95
29	Puskesmas Wonoboyo	3.507.093.862,00	843.944.519,00	24,06
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.418.676.555,00	3.759.004.710,00	8,66
31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	35.793.233.331,00	5.551.650.634,00	15,51

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
32	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12.827.611.876,00	2.234.298.619,00	17,42
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.118.524.946,00	720.397.067,00	14,07
34	Dinas Sosial	31.074.399.992,00	3.155.462.345,00	10,15
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.065.591.949,03	1.899.562.858,00	11,13
36	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	54.404.312.536,00	6.721.193.463,00	12,35
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.744.692.396,00	1.450.975.584,00	21,51
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.681.175.222,00	1.789.131.612,00	23,29
39	Dinas Perhubungan	25.011.609.542,77	4.506.060.547,00	18,02
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.383.870.825,00	1.759.568.212,00	18,75
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	15.977.113.248,00	3.687.388.718,00	23,08
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.910.087.623,00	776.577.443,00	19,86
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.009.840.163,00	899.521.719,00	6,91
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.653.644.143,00	1.066.649.613,00	18,87
45	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.162.033.075,00	1.654.671.346,00	20,27
46	Bagian Pemerintahan	225.824.025,00	7.726.000,00	3,42
47	Bagian Hukum	934.165.250,00	16.700.703,00	1,79
48	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	25.753.033.050,00	680.769.815,00	2,64
49	Bagian Perekonomian	676.593.100,00	30.570.606,00	4,52
50	Bagian Pembangunan	87.285.720,00	10.834.703,00	12,41
51	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	116.477.400,00	24.965.409,00	21,43
52	Bagian Umum	28.220.337.693,00	5.348.275.717,00	18,95
53	Bagian Organisasi	51.346.600,00	2.822.000,00	5,50
54	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.192.351.800,00	210.375.392,00	9,60
55	Sekretariat DPRD	48.962.662.482,00	9.127.146.205,00	18,64
56	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.092.423.032,00	1.596.904.436,00	19,73
57	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	417.515.857.016,00	39.823.098.205,00	9,54
58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.177.541.150,00	1.259.477.911,00	20,39
59	Inspektorat	22.632.724.620,00	2.476.901.835,00	10,94
60	Kecamatan Temanggung	12.432.399.897,00	2.820.611.220,00	22,69
61	Kelurahan Temanggung I	487.665.600,00	49.486.932,00	10,15
62	Kelurahan Temanggung II	437.443.374,00	27.943.801,00	6,39
63	Kelurahan Butuh	492.198.850,00	46.565.326,00	9,46
64	Kelurahan Jampiroso	665.542.250,00	33.592.707,00	5,05
65	Kelurahan Jampirejo	653.179.140,00	32.512.279,00	4,98
66	Kelurahan Kertosari	476.478.990,00	33.174.324,00	6,96
67	Kelurahan Banyuurip	862.453.600,00	36.776.193,00	4,26
68	Kelurahan Kowangan	585.715.850,00	33.047.706,00	5,64
69	Kelurahan Jurang	506.223.700,00	31.684.058,00	6,26
70	Kelurahan Tlogorejo	851.743.500,00	25.677.663,00	3,01
71	Kelurahan Kebonsari	439.797.650,00	32.530.772,00	7,40
72	Kelurahan Manding	578.445.800,00	32.789.374,00	5,67
73	Kelurahan Mungseng	631.157.850,00	29.403.126,00	4,66
74	Kelurahan Purworejo	468.277.870,00	41.238.507,00	8,81
75	Kelurahan Giyanti	855.596.222,00	31.750.322,00	3,71

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
76	Kelurahan Madureso	703.384.400,00	32.690.229,00	4,65
77	Kelurahan Sidorejo	1.102.913.350,00	46.057.405,00	4,18
78	Kelurahan Walitelon Selatan	1.031.982.390,00	32.088.037,00	3,11
79	Kelurahan Walitelon Utara	800.952.700,00	32.707.920,00	4,08
80	Kecamatan Tembarak	1.790.967.878,00	420.931.312,00	23,50
81	Kecamatan Pringsurat	2.241.337.451,00	534.167.909,00	23,83
82	Kecamatan Kaloran	2.060.501.300,00	473.041.928,00	22,96
83	Kecamatan Parakan	2.998.522.881,00	729.192.680,00	24,32
84	Kelurahan Parakan Kauman	835.598.899,00	29.441.146,00	3,52
85	Kelurahan Parakan Wetan	426.406.453,00	20.227.668,00	4,74
86	Kecamatan Bulu	1.839.140.395,00	390.819.539,00	21,25
87	Kecamatan Kedu	1.699.423.340,00	375.548.975,00	22,10
88	Kecamatan Kandangan	1.962.343.828,00	435.624.906,00	22,20
89	Kecamatan Candirotto	2.061.162.612,00	478.579.274,00	23,22
90	Kecamatan Ngadirejo	2.982.387.954,00	690.519.577,00	23,15
91	Kelurahan Manggong	1.125.825.088,00	22.709.568,00	2,02
92	Kecamatan Jumo	1.930.512.756,00	469.649.557,00	24,33
93	Kecamatan Wonoboyo	1.805.888.412,00	424.537.729,00	23,51
94	Kecamatan Kranggan	2.802.574.710,00	664.145.154,00	23,70
95	Kelurahan Kranggan	495.902.479,00	60.618.432,00	12,22
96	Kecamatan Bejen	1.869.411.391,00	438.330.408,00	23,45
97	Kecamatan Kledung	1.995.070.262,00	443.991.970,00	22,25
98	Kecamatan Bansari	1.941.805.109,00	475.226.721,00	24,47
99	Kecamatan Tlogomulyo	2.095.002.309,00	508.960.271,00	24,29
100	Kecamatan Selopampang	1.830.153.352,00	410.310.711,00	22,42
101	Kecamatan Gemawang	1.801.237.659,00	380.708.836,00	21,14
102	Kecamatan Tretep	1.929.562.353,00	472.151.207,00	24,47
103	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.170.628.840,00	944.142.879,00	13,17
	JUMLAH	2.074.895.563.218,00	317.638.563.790,00	15,31

Sumber BPKPAD, 2025

Capaian kinerja keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar 15,31 % capaiannya masih sangat rendah.

2.2 Evaluasi Kinerja Utama

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran dan indikator program terhadap target RPD 2024-2026 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Untuk mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai yang terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.2
Simbol dan Status Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPD 2024-2026, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja indikator kinerja utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,86	72,77	71,86	100,00	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,53	7,95	7,53	94,72	Sangat Tinggi	Dindikpora
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,62	12,65	12,62	99,76	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,98	4,23	3,98	94,09	Sangat Tinggi	Dindikpora
		Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	3,9	4,23	3,98	77,95	Tinggi	Dindikpora
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,67	4,66	3,67	78,76	Tinggi	Dinbudpar
	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,5	4,66	4,5	98,78	Sangat Tinggi	Kesbangpol
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,94	75,72	75,94	100,00	Sangat Tinggi	Dinkes
	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,19	95,77	96,27	100,00	Sangat Tinggi	DPPPAPPKB
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,28	5,04	95,94	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Pendapatan Per kapita	Ribu Rp	33,43	33,5	35,94	100,00	Sangat Tinggi	Dinkominfo
	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka	7,7	8,1	8,67	93,43	Sangat Tinggi	Dinkominfo
		Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	Angka	19,52	19	17,83	93,84	Sangat Tinggi	Dinkominfo
		Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)	Angka	2,35	2,51	2,35	100,00	Sangat Tinggi	Dinkominfo
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	79,03	75,2	78,87	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	68,25	64,05	68,25	100,00	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Indeks Rasa Aman	Angka	4,65	4,69	4,65	99,15	Sangat Tinggi	Satpol PP
		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	*86,01	B/>60-70	86,01	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	73,66	66	73,66	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Indeks Merit System	angka	0,62	0,55	0,62	100	Sangat Tinggi	BKPSDM
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	66,36	B/>60-70	*66,36	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	86,91	B/76,61-88,30	*86,91	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
RATA-RATA INDIKATOR TUJUAN							98,43	Sangat Tinggi	
RATA-RATA INDIKATOR SARASAN							92,48	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah

Rata-rata capaian pada indikator Tujuan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu 98,43% dengan status Telah Tercapai, sedangkan rata-rata indikator sasaran yaitu 92,48% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 8 indikator kinerja sasaran dan 37 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan s.d Triwulan I Tahun 2025

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Sasaran IKUPD								
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	77,78	57,1	88,46	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	99,13	98,39	98,85	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	98,52	91,57	95,06	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	83,33	36	77,27	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	56,23	100	89,75	89,75	Tinggi	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	54,19	100	98,41	98,41	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	85,14	100	95,77	95,77	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	40,10	100	63,74	63,74	Sedang	Dindikpora
RATA-RATA						92,82	Sangat Tinggi	
Indikator Program								
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	47,73	81,72	90,72	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	51,39	44,55	42,36	95,09	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	56,73	77,75	83,48	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	61,89	90,55	101,46	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	54,18	90,55	90,00	90,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	69,97	49,99	78,90	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	67,20	100	97,40	97,40	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	0,03	0,03	0,02	74,19	Sedang Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	100,00	100	100,00	100,00		
	Persentase APM SD Sederajat	%	75,98	98,7	95,49	96,75	Sangat Tinggi Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK SD Sederajat	%	136,63	104,69	100,17	95,68		Dindikpora
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,016	0,01	0,064	0,00	Sangat Rendah	Dindikpora
	Rasio Siswa/Guru SD	angka	01.20	01.28	1:17	87,50	Sedang	Dindikpora
	Rasio Siswa/Rombel SD	angka	01.14	1.28	1:13	82,95	Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	25,92	100	80,48	80,48	Tinggi	Dindikpora
	Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	25,92	100	89,48	80,48	Tinggi	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	0,03	0,1	0,05	46,08	Sangat Rendah	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	94,92	91,49	91,49	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APM SMP Sederajat	%	81,98	89	84,03	94,42	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK SMP Sederajat	%	98,19	98,77	103,50	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,19	98,9	94,13	95,17	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	0,21	0,16	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Rasio Siswa/Guru SMP	angka	01.17	01.32	10.17	83,70	Tinggi	Dindikpora
	Rasio Siswa/Rombel SMP	angka	01.11	01.32	01.11	77,17	Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	91,09	100	95,45	95,45	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	56,64	66,25	64,00	96,90	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	90,70	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	40,33	100	47,14	47,14	Sangat Rendah	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	0,06	0,08	0,05	58,82	Rendah	Dindikpora
	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,39	96,67	64,74	66,97	Sedang	Dindikpora
	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	77,78	100	92,23	92,23	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	96,15	100	96,30	96,30	Sangat Tinggi	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	47,62	100	97,56	97,56	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha (kesanggupan memenuhi indikator)	%	89,51	90	89,51	99,46	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	51,06	20	60,20	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
RATA-RATA							88,28	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 93,46% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Rata-rata capaian indicator program sebesar 88,28% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Pada IKUPD masih ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah dan 3 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 31 indikator kinerja program serta di RSUD terdiri dari 1 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	0,197	0,15	0,197	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	61,01	72	12,20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	11,84	12,8	3,24	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100,00	100	21,56	21,56	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	11,46	13,44	11,35	100	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100,00	100	20,53	20,53	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100,00	100	20,53	20,53	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100,00	100	20,53	20,53	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	20,31	20,31	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal	per 1.000 KH	8,42	9,15	0,49	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	96,00	100	19,34	19,34	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	14,28	15,6	4,15	100,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,16	0,3	0,13	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	11,29	14	11,67	100	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	89,09	82,6	91,20	100	Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,80	100	23,67	23,67	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,21	100	25,30	25,30	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,61	100	26,17	26,17	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	%	76,36	64	78,18	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,03	100	20,55	20,55	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	108,20	100	34,99	34,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	106,77	100	35,59	35,59	Sanagt Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	127,35	100	36,43	36,43	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	%	96,28	100	30,00	30,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar							
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penduduk	10,48	7	1,46	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	102,33	85	15,07	17,73	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah sehat	%	86,16	82,4	87,93	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	100	98,4	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	100	100	15,38	57,19	Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	97,77	84,03	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	RSUD
RATA-RATA							59,05	Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, capaian rata-rata indikator IKUPD pada bidang kesehatan sebesar 100% dengan skala Sangat Tinggi. Status Rata-rata capaian pada indikator program bidang kesehatan sebesar 59,05% dengan skala capaian Rendah. Masih ada 1 indikator program dengan nilai skala nilai peringkat kinerja rendah dan 16 indikator program dengan skal nilai peringkat kinerja sangat rendah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 11 indikator kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 1 indikator program kinerja pada dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d. Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	85,07	84,64	84,41	99,73	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai rencana tata ruang	%	90,18	89,51	90,18	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	RATA-RATA						99,87	Sangat Tinggi	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,36	59,37	59,36	99,98	Sangat Tinggi	DPUPR
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	98,67	97,90	98,67	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	97,65	95,70	97,65	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100,00	100	0	0,00	Sangat Rendah	DPUPR
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,15	69,34	69,15	99,72	Sangat Tinggi	DPUPR
4.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	%	68,61	73,97	68,61	92,75	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	93,42	100	0	0,00	Sangat Rendah	DPUPR
5.	Program Penyelenggara Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	88,92	89,5	87,47	97,73	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase jembatan Kabupaten Kondisi baik	%	94,36	94	93,18	99,13	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,59	19,61	22,59	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
6.	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	90,18	89,51	90,18	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	RATA-RATA						80,85	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata Capaian pada indikator IKUPD yaitu 99,87% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata indikator program yaitu 80,85% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d. Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,34	99,03	99,34	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	59,63	53,30	59,63	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,84	83,87	87,84	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	3,69	4,11	3,69	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	95,29	88,40	95,29	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Persentase rumah layak huni	%	96,31	95,89	96,31	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	3,63	4,82	3,63	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
2.	Program Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian indikator IKUPD dan indikator program yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	51,11	100	53,55	53,55	Rendah	Satpol PP Damkar
		cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Angka	682	305	184	60,33	Rendah	Satpol PP Damkar
	RATA-RATA						71,29	Sedang	
1. 2.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	3118,69	6,92	3118,69	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Rasio	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
		Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	199	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK	%	50,65	80	54,55	68,18	Sedang	Satpol PP Damkar
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	42,06	100	45,45	45,45	Sangat Rendah	Satpol PP Damkar
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	0	100	0	0	Sangat Rendah	Satpol PP Damkar
		Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	2,56	6,15	0,43	6,95	Rendah	Satpol PP Damkar
	RATA-RATA						60,08	Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Dalam tabel IKUPD terdapat 2 indikator yang masih dalam status capaian rendah dengan rata – rata capaian IKUPD sebesar 71,29%. Rata-rata indikator program 60,08% dengan skala nilai peringkat kinerja sedang. Masih terdapat 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah dan 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran, dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana	angka	20,92	141,15	105,76	100	Sangat Tinggi	BPBD
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	Sanga
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPBD
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian bidang Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada indikator IKUPD dan indikator program yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	68,12	63	52,54	77,11	Rendah	Dinas Sosial
	RATA-RATA						77,11	Rendah	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
4.	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	0	0	Sangat Rendah	Dinas Sosial
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	86,38	60	97,22	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	51,37	48	51,37	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	RATA-RATA						92,31	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian urusan pemerintah bidang sosial pada indikator IKUPD yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan rata-rata indikator program yaitu 92,31% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Pada kinerja program masih ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,06	76,2	78,06	100	Sangat Tinggi	Dinperi naker
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	40,78	36	25,33	70,35	Sedang	Dinperi naker
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	3,95	1,2	0	0	Sangat Rendah	Dinperi naker
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	98,77	31	17,90	57,75	Sangat Rendah	Dinperi naker
		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	100	92	100	100	Sangat Tinggi	Dinperi naker
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73,78	72,56	28,4	39,14	Sangat Rendah	Dinperi naker
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	%	82,35	81	20,59	25,42	Sangat Rendah	Dinperi naker
3.	Program Hubungan Industrial	Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	%	88,15	83,37	88,15	100	Sangat Tinggi	Dinperi naker
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	79,67	70	78,57	100	Sangat Tinggi	Dinperi naker
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	82,93	46	81,75	100	Sangat Tinggi	Dinperi naker
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinperi naker

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RATA-RATA						69,27	Sedang	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang tenaga kerja terdiri dari 1 indikator IKUPD dengan rata-rata capaian kinerja 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Pada indikator kinerja program terdapat 4 indikator yang memiliki Tingkat capaian sangat rendah dengan rata – rata capaian indikator program 69,27%.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	8,22	10,22	1,71	16,69	Sangat Rendah	DPPP APPKB
	RATA-RATA						16,69	Sangat Rendah	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,27	2,66	2,74	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
2.	Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,0055	0,0028	0,0037	68,40	Sedang	DPPP APPKB
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,003	0,0028	0,0010	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	100	62,63	100	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	56,67	100	56,67	56,67	Rendah	DPPP APPKB
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	%	nindya	nindya	nindya	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0040	0,0039	0,0018	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
	RATA-RATA						90,63	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 1 indikator IKUPD dengan capaian 16,69% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Ada 8 indikator kinerja program dengan rata rata capaian 90,63% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	89,43	78,7	89,43	100	Sangat Tinggi	DKPPP
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	90,2	100	182,35	100	Sangat Tinggi	DKPPP
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DKPPP
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	98,37	90	98,37	100	Sangat Tinggi	DKPPP
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 pada IKUPD dan indikator kinerja program dengan rata-rata kinerja 100% skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanahan terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pertanahan terdiri dari 1 indikator kinerja program. Rata-rata capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	0	0	Sangat Rendah	DPRKPLH
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
2.	Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	59,63	53,30	59,63	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara	Angka	87,84	83,87	87,84	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	3,09	0,067	3,27	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	92,02	65	73,61	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	100	100	20	20	Sangat Rendah	DPRKPLH

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)								
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,93	30	28,93	96,44	Sangat Tinggi	DPRKPLH
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	166,67	100	0	0	Sangat Rendah	DPRKPLH
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	62,91	60,50	60,75	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Cakupan layanan persampahan	%	74,39	66,44	76,12	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	RATA-RATA						78,19	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 13 indikator kinerja program dengan rata rata capaian 78,19% yang terdiri dari 10 indikator berstatus sangat tinggi, dan 3 indikator dengan berstatus sangat rendah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98,52	93,7	98,68	100	Sangat Tinggi	Dindukcapil
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,61	89,73	97,81	100	Sangat Tinggi	Dindukcapil
2.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,94	99,85	99,98	100	Sangat Tinggi	Dindukcapil
3.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	94,97	98,5	83,80	85	Tinggi	Dindukcapil
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	31,05	1,3	31,20	100	Sangat Tinggi	Dindukcapil
	RATA-RATA						96,30	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 IKUPD dengan capaian 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan 4 indikator kinerja Program dengan capaian 96,30% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri	%	31,97	11,65	37,97	100	Sangat Tinggi	Dinper mades
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	100	60	25	41,67	Sangat Rendah	Dinper mades
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	100	9	100	100	Sangat Tinggi	Dinper mades
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	83,46	60	24,81	41,35	Sangat Rendah	Dinper mades
		Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinper mades
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	71,80	80	32,33	40,41	Sangat Rendah	Dinper mades
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	89,42	39	27,18	69,70	Sedang	Dinper mades
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	62,41	39,47	39,85	100	Sangat Tinggi	Dinper mades
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa	%	21,43	4	21,43	100	Sangat Tinggi	Dinper mades

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	(Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)							
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	22,87	55	25,58	46,51	Sangat Rendah	Dinper makes
	RATA-RATA						71,07	Sedang	

Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari 1 IKUPD dengan capaian sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan 9 indikator kinerja program dengan capaian sebesar 71,07 dengan skala nilai peringkat kinerja 4 indikator sangat tinggi, 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sedang, dan 4 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,8	0,6	0,8	66,67	Sedang	DPPP APPKB
	RATA-RATA						66,67	Sedang	
1.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	7,60	10,3	7,43	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0,37	1,85	0,33	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	9,13	12,5	0,91	100	Sangat Tingii	DPPP APPKB
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	90,36	88,6	90,20	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	81,85	75,8	82,00	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,45	46,15	46,82	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	%	28,45	45,45	36,40	80,09	Tinggi	DPPP APPKB
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	%	62,08	55,99	63,17	100	Sangat Tinggi	DPPP APPKB
	RATA-RATA						97,79	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada indikator sasaran sebesar 66,67% dengan skala nilai peringkat kinerja sedang. Rata-rata capaian indikator program yaitu 97,79%, 8 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja tinggi.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya infrastruktur sarana dan Prasarana masyarakat	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	41,55	42,03	41,55	98,85	Sangat Tinggi	Dishub
	Meningkatnya Layanan Perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	%	116,24	68,72	95,44	100	Sangat Tinggi	Dishub
	RATA-RATA						99,42	Sangat Tinggi	
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	41,55	42,03	41,55	98,85	Sangat Tinggi	Dishub
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	89,17	35	12,26	35	Sangat Rendah	Dishub
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	99,12	100	100	Sangat Tinggi	Dishub
		Persentase Terminal Tipe C yang Aktif	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dishub
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dishub
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,62	99,66	93,35	93,67	Sangat Tinggi	Dishub
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten	%	34,17	33,86	34,17	100,93	Sangat Tinggi	Dishub

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	63,52	64,09	63,52	99,12	Sangat Tinggi	Dishub
	RATA-RATA						90,83	Sangat Tinggi	

Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 99,42% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Rata-rata capaian indikator program yaitu sebesar 90,83%. 7 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan masih ada 1 indikator program dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sitem Pemerintahan Secara Elektronik Meningkatnya Keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,64	3,35	3,64	100	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,86	90,2	95,86	100	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	85,29	40	85,29	100	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	140,96	100	16,51	16,51	Sangat Rendah	Dinas Kominfo
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100	90	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
2.	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	50,38	55	51,91	94,38	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
	RATA-RATA						82,18	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Rata-rata capaian indikator program yaitu sebesar 83,18%. 4 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan masih ada satu indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah yaitu indikator persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RP s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi sehat	%	15,15	48	10,91	22,73	Sangat Rendah	Dinkopdag
		Persentase UMKM yang difasilitasi	%	1,39	0,96	0,44	46,18	Sangat Rendah	Dinkopdag
	RATA-RATA						34,45	Sangat Rendah	
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	15,15	48	10,91	22,73	Sangat Rendah	Dinkopdag
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	80,65	2,33	18,18	100	Sangat Tinggi	Dinkopdag
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	0,44	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinkopdag
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	77,58	93,71	18,18	19,40	Sangat Rendah	Dinkopdag
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	100	6,67	100	100	Sangat Tinggi	Dinkopdag

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RP s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	1,15	0,96	0,44	46,18	Sangat Rendah	Dinkopdag
	RATA-RATA						48,05	Sangat Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 34,45% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Rata-rata capaian indikator program yaitu sebesar 48,05%. 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan masih ada empat indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	4,83	3	-78,44	21,56	Sangat Rendah	DPM
RATA-RATA							21,56	Sangat Rendah	
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPM
		Persentase perusahaan yang bermitra	%	100	60	100	100	Sangat Rendah	DPM
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	%	100	50	100	100	Sangat Rendah	DPM
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	%	100	100	150,6	100	Sangat Tinggi	DPM
		Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	150,63	100	Sangat Tinggi	DPM
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	4000	100	Sangat Tinggi	DPM
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	%	100	16	75	100	Sangat Tinggi	DPM
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPM
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 22% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Pada Indikator Pertumbuhan realisasi investasi skala nilai peringkat kinerja masih sangat rendah dengan faktor penghambat yaitu Lahan KPI yang masih tersedia berada dibelakang dan belum ada akses masuk. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2025 yaitu Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan kajian lahan KPI tersebut dan melaksanakan jemput bola OSS. Rata-rata capaian indikator program yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya prestasi pemuda Meningkatnya Atlet berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	%	37,50	40	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dindikpora
		Persentase atlet berprestasi	%	83,19	72	88,46	100	Sangat Tinggi	Dindikpora
	RATA-RATA						50	Sangat Rendah	
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	93,33	95,5	84,21	88,18	Tinggi	Dindikpora
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	96,43	96,5	96,43	99,93	Sangat Tinggi	Dindikpora
		Persentase prestasi olah raga	%	92,86	62	100	100	Sangat Tinggi	Dindikpora
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	100	100	97,34	97,34	Sangat Tinggi	Dindikpora
	RATA-RATA						96,36	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 50% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Pada indikator persentase pemuda berprestasi. Rata-rata capaian program yaitu 96,36% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. 4 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	100	74	74,20	100	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, angka indikator kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral pada bidang statistik sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Dengan faktor pendorong Sinergitas kerja sama Dinkominfo dengan BPS Temanggung, Bappeda dan Perangkat Daerah dalam penyediaan data statistik sektoral yang terupdate setiap tahunnya.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari 1 Indikator kinerja Sasaran dan 4 indikator kinerja program daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	113,63	26,1	111,89	100	Sangat Tinggi	Dinbudpar
	RATA-RATA						100		
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	72,83	8,2	29,85	100	Sangat Tinggi	Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	184,33	44	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinbudpar
		Persentase pelestarian sejarah lokal	%	7,05	9,25	7,49	81,0	Tinggi	Dinbudpar
		Persentase pelestarian cagar budaya	%	9,33	13,18	13,47	100	Sangat Tinggi	Dinbudpar
	RATA-RATA						70,24	Sedang	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Rata-rata capaian indikator program yaitu 70,24% dengan skala nilai peringkat kinerja sedang. 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi, 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja tinggi, dan satu indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran Bidang Perpustakaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4						
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	60,48	30,2	60,48	100	Sangat Tinggi	
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	0,29	0,25	31,764	100	Sangat Tinggi	Dinpusip
		Persentase peminjam di perpustakaan	%	40,13	42	4,94	100	Sangat Tinggi	Dinpusip
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	55,18	35	20,228	57,79	Rendah	Dinpusip
	2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	%	100	100	0	Sangat Rendah	Dinpusip
	RATA-RATA						39,45	Sangat Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian IKUPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu 100 % pada skala penilaian kinerja sangat tinggi. Sedangkan rata-rata kinerja pada indikator program yaitu 39,45% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Dari 4 indikator kinerja program ada 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah dan 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 1 indikator sasaran dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	73,54	70	0	0	Sangat Rendah	Dinpusip
	RATA-RATA IKUPD						0	Sangat Rendah	
1.	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip vital konvesional yang dialih mediakan	%	55,29	60	55,29	57,33	Rendah	Dinpusip
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	66,67	73,33	0	0	Sangat Rendah	Dinpusip
	RATA-RATA PROGRAM						28,67		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUD 0% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Rendah dengan faktor penghambat yaitu instrumen ASKI baru saja disesuaikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Upaya pencapaian kinerja dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan kearsipan sesuai dengan Perka ANRI No. 6 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kearsipan.

Rata-rata kinerja indikator program yaitu 28,67% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Rendah dengan 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah dan 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

2.5 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perikanan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Nilai Produksi Perikanan	Juta Rp	248.894,22	349.500	135.377,11	38,74	Sangat Rendah	DKPPP
	RATA-RATA						38,74	Sangat Rendah	
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	59.08	10	2.65	26,5	Sangat Rendah	DKPPP
2.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m ²	1.21	1.3	1.3	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m ²	12.60	12.7	12.7	100	Sangat Tinggi	DKPPP
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	21.4	10	-73,53	-7,35	Sangat Rendah	DKPPP
4.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	22.25	22.52	22.25	98,8	Sangat Tinggi	DKPPP
	RATA-RATA						63,59	Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUD yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata indikator program yaitu 85,06% skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Pada indikator program masih ada 4 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah yaitu indikator Persentase nelayan perairan umum yang terbina.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
1.		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Angka	1,53	2,1	1,53	72,86	Sedang	Dinbudpar
	RATA-RATA						72,86	Sedang	
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	7.42	0.04	-85.92	0.00	Sangat Rendah	Dinbudpar
		Lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	100	Sangat Tinggi	Dinbudpar
		Persentase Peningkatan desa wisata	%	12,03	14,76	12,03	81,50	Tinggi	Dinbudpar
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	9.84	10	0.00	0.00	Sangat Rendah	Dinbudpar
	RATA-RATA						45,40	Sangat Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata – rata capaian IKUPD yaitu 72,86% dengan skala nilai peringkat kinerja sedang. Rata rata capaian indikator program yaitu 45,40% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Terdapat 1 indikator yang berskala sangat tinggi, 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja tinggi, 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 23 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Triwulan I Tahun 2025

No .	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
1.		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	22.94	23.3	0	0.00	Sangat Rendah	DKPPP
	RATA-RATA						0,00	Sangat Rendag	
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	Kuintal / Ha	6,.49	6,.5	62,09	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Jagung	Kuintal / Ha	57.6	54.6	55.1	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Bawang Putih	Kuintal / Ha	73.02	61	72	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Bawang Merah	Kuintal / Ha	76.50	69	70.68	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Cabai Rawit	Kuintal / Ha	75.0	50.5	72,15	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Cabai Besar	Kuintal / Ha	76	65.5	73.2	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Tembakau	Kuintal / Ha	6.70	6.2	72.15	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Kopi Robusta	Kuintal / Ha	7.44	7.15	7.48	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal / Ha	5.51	6.5	5.55	85.36	Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Ternak Sapi	Kg / Ekor	177.6	177.5	177.60	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Ternak Domba	Kg / Ekor	13.71	13.72	13.71	100	Sangat Tingggi	DKPPP
		ProduktivitasTernak Kambing	Kg / Ekor	13.71	13.71	13.72	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Produktivitas Ternak Ayam Ras Pedaging	Kg / Ekor	0.75	0.75	0.75	100	Sangat Tinggi	DKPPP

No .	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
		Produktivitas Ternak Ayam Petelur	Kg / Ekor	10.88	10.88	2.72	25	Sangat Rendah	DKPPP
		Persentase Kelahiran Pedet	%	48.3	56	58.42	100	Sangat Tinggi	DKPPP
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DKPPP
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan penyakit hewan	%	97.43	87	96.53	100	Sangat Tinggi	DKPPP
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	214.000	77	82.31	100	Sangat Tinggi	DKPPP
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	99.23	42	37.46	89.19	Tinggi	DKPPP
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	1.40	1.3	1.40	100	Sangat Tinggi	DKPPP
	RATA-RATA						94,98	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja IKUPD yaitu 0% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Sedangkan rata-rata capaian kinerja program yaitu 94,98% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Program memiliki rata-rata capaian indikator program 89.96%. 17 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi, 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja tinggi, dan 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perdagangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20.95	20.8	20.95	100	Sangat Tinggi	Dinkopdag
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	%	17.00	27.42	1.71	6.25	Sangat Rendah	Dinkopdag
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	66.67	67	66.67	99.50	Sangat Tinggi	Dinkopdag
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1.55	2.41	1.77	73.35	Sedang	Dinkopdag
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	75.04	79.63	76.18	95.67	Sangat Tinggi	Dinkopdag
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	74.86	75	24.66	32.88	Sangat Rendah	Dinkopdag
3.	Program Pengembangan ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	2.56	2.31	2.56	100	Sangat Tinggi	Dinkopdag
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	%	101.10	99.41	3.48	3.50	Sangat Rendah	Dinkopdag

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinkopdag
	RATA-RATA						63,89	Sedang	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian IKUPD yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, dan rata-rata capaian indikator program yaitu 63,89% dengan skala nilai peringkat kinerja Rendah, masih ada 3 indikator yang berstatus sangat tinggi, 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sedang, dan 4 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	25.53	27.25	25.53	93.69	Sangat Tinggi	Dinperi naker
	RATA-RATA						93,69	Sangat Tinggi	
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	82.19	78.2	82.19	100	Sangat Tinggi	Dinperi naker
2.	Program Pengemgdalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	15.47	20.95	16.02	76,48	Tinggi	Dinperi naker
	RATA-RATA						88,24	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian IKUPD yaitu 93.69% dengan skala penilaian kinerja sangat tinggi. Rata rata capaian indikator program yaitu 88,24% skala penilaian kinerja tinggi, dengan 2 capaian indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala tinggi.

2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran pemda, 22 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3.434	3.45	3.434	99.54	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
	RATA-RATA						99.54	Sangat Tinggi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	28.57	29	Sangat Rendah	Bag. Umum Setda Kab Temanggung
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bag. Umum Setda Kab Temanggung
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Prokompim Setda Kab Temanggung
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	30.43	23.9	30.43	100	Sangat Tinggi	Bag. organisasi Setda Kab Temanggung
2.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bag. Pemerintahan Setda Kab Temanggung
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah Tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat tinggi	Bag. Pemerintahan Setda Kab Temanggung
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bag. Kesra Setda Kab Temanggung
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	87.84	88	87.84	99.82	Sangat Tinggi	Bag. Kesra Setda Kab Temanggung
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	80	60	40	66.67	Sedang	Bag. Kesra Setda Kab Temanggung

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	86	100	100	Sangat tinggi	Bag.Hukum Setda Kab Temanggung
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	73.24	100	61.90	61,9	Sedang	Bag.Hukum Setda Kab Temanggung
		Presentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bag.Hukum Setda Kab Temanggung
		Persentase permasalahan hokum yang ditangani secara litigasi	%	100	100	0	0	Sangat Rendah	Bag.Hukum Setda Kab Temanggung
		Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100	1,6	1,6	Sangat Rendah	Bag.Pembangunan Setda Kab Temanggung
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	99,03	99,03	Sangat Tinggi	Bag.Pembangunan Setda Kab Temanggung
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bag.Pembangunan Setda Kab Temanggung
3.		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	93,9	100	25	25	Sangat Rendah	Bag.Perekonomian Setda Kab Temanggung
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bag.Perekonomian Setda Kab Temanggung
		Persentase BUMD denganopini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	100	Sangat Tinggi	Bag.Perekonomian Setda Kab Temanggung
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	98	100	2.17	2,17	Sangat Rendah	Bag. PBJ Setda Kab Temanggung
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang	%	100	100	11.11	11,11	Sangat Rendah	Bag. PBJ Setda Kab Temanggung

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)							
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	85.72	98	14.75	15,05	Sangat Rendah	Bag. PBJ Setda Kab Temanggung
	RATA-RATA						61,13	Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUPD Sekretariat Daerah yaitu 99,54% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Rata-rata capaian kinerja program yaitu 61,13% dengan skala nilai peringkat kinerja rendah. Pada indikator program 13 indikatoe dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi, 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sedang, dan 7 insikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran Sekretariat DPRD terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100.0	100	9.66	9.66	Sangat Rendah	Sekretariat DPRD
	RATA-RATA						9,66	Sangat Rendah	
1.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100	100	0	0.00	Sangat Rendah	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	95	100	100.00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	100	60	60.00	Rendah	Sekretariat DPRD
		Presentase kegiatan peningakatan Kapasitas Anggota DPRD	na	100	100	33.333	33.33	Sangat Rendah	Sekretariat DPRD
	RATA-RATA						48,33	Sangar Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan pada tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD yaitu 9.66% dan rata-rata capaian indikator program yaitu 48.33%. Terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang berskala sangat rendah, antara lain:

1. Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
2. Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas.
3. Presentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD. Dan indikator berskala rendah yaitu indikator Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan.

Faktor penghambat pada indikator Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029 dan adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan. Adapun upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 pada indikator tersebut yaitu koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan. Faktor penghambat pada indikator persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas yaitu proses harmonisasi yang membutuhkan waktu dan uapaya pencapaian yaitu Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, Bagian Hukum Pemda Kab. Temanggung, Biro Hukum Provinsi terkait harmonisasi. Faktor penghambat indikator presentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yaitu adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029 dengan upaya pencapaian Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan. Faktor penghambat pada indikator persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan yaitu kebijakan yang mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dewan tidak boleh dipublikasikan dengan upaya menjaga intensitas dan kualitas kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD.

2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang perencanaan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4.5	4.55	4.5	98.90	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	Level 3	Level 3	Level 3	100.0	Sangat Tinggi	BAPPEDA
	RATA-RATA						99,45	Sangat Tinggi	
1.	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	100	98.82	89.47	90.54	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	96.46	90.56	96.46	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra	%	95.31	91.96	95.31	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perangkat daerah sub bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam							
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	97.96	95.76	97.96	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
	RATA-RATA						99,04	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator IKUPD yaitu 99,45% berstatus sangat tinggi, rata-rata indikator program telah tercapai 99.04% berstatus sangat tinggi. Hal ini didorong oleh:

- Perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen strategis seperti RPJPD dan RPJMD, ketersediaan data yang valid dan terkini, koordinasi antar-perangkat daerah yang solid, serta pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan evaluasi. Selain itu, adanya komitmen pimpinan daerah, penguatan kapasitas SDM perangkat daerah, serta pengawasan dan monitoring yang konsisten turut mendukung tercapainya indikator secara optimal.
- Adanya dasar perencanaan strategis yang cukup baik, termasuk 20 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan capaian nilai evaluasi SAKIP yang mendapat skor B. Selain itu, langkah-langkah yang telah diambil, seperti pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang sesuai dengan Peraturan BPKP, menjadi landasan penting untuk penguatan MRI. Rekomendasi terkait, seperti reviu perencanaan kinerja dengan cascading dan logical framework, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi MR, memberikan peluang besar untuk memperbaiki implementasi manajemen risiko. Komitmen terhadap penguatan pengelolaan risiko pada sektor strategis dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif juga menjadi pendorong signifikan dalam meningkatkan maturitas pengelolaan risiko di Kabupaten Temanggung.
- Kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya menyusun dokumen perencanaan tepat waktu
- Kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya menyusun laporan evaluasi pembangunan tepat waktu
- Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang pembangunan manusia
- Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang ekonomi dan sumber daya alam
- Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang infrastruktur

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran keuangan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran, dan 11 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah)	%	18,33	15,75	27,35	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
		Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
		Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
		Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	100	100	0	0	Sangat Rendah	BPKPAD
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	100	80	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	4,57	9	76,62	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
		Persentase Penerbitan Surat	%	100	100	100	100	Sangat	BPKPAD

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu						Tinggi	
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	98,16	95,5	13,54	14,18	Sangat Rendah	BPKPAD
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
	RATA-RATA						83,11	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian IKUPD yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja sangat tinggi, dan untuk rata - rata capaian indikator program yaitu 83,11%, masih ada 2 capaian indikator dengan skala penilaian kinerja sangat rendah, yaitu :

1. Indikator Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, faktor penghambatnya adalah pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal serta capaian pada triwulan I belum menggambarkan keseluruhan realisasi Pajak Daerah serta PBB-P2 tahun pajak 2025 belum ditetapkan sampai dengan TW I berakhir, sehingga realisasi merupakan pembayaran atas piutang pajak sebelum tahun pajak 2025. Adapun upaya pencapaian dengan rutin melakukan sosialisasi tentang pajak daerah menggunakan beberapa platform digital yang tersedia.
2. Indikator Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, faktor penghambatnya adalah masih terdapat selisih terhadap hasil rekonsiliasi. Adapun upaya pencapaian target yaitu, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaraan kepegawaian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	78,5	53,23	65,9	100	Sangat Tinggi	BKPSDM
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	
1.	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	123,60	42,36	48,33	100	Sangat Tinggi	BKPSDM
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	%	50,50	86,58	49,40	57,05	Rendah	BKPSDM
	RATA-RATA						78,53	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi dan untuk rata – rata capaian indikator program yaitu 78,53% dengan skala nilai peringkat kinerja tinggi. Masih terdapat indikator dengan skala penilaian peringkat kinerja Rendah yaitu indikator Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur. Faktor penghambatnya yaitu Kurangnya pemahaman ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat tentang persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak disetujui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun upaya pencapaian target dengan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku ke pengelola kepegawaian maupun ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	%	82,75	97	66,64	68,70	Sedang
	RATA-RATA						66,64	68,70	Sedang

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian program pada urusan pemerintahan pendidikan dan pelatihan yaitu 68,70% dengan skala penilaian kinerja Sedang. Faktor penghambat belum tercapaian target yaitu sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan terhadap para pejabat struktural belum tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan terdiri dari 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian program fungsi penelitian dan pengembangan sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendukungnya adalah melakukan pendampingan oleh P5 Undip dan koordinasi dengan P5 Undip, selain itu juga melakukan sosialisasi kreativitas inovasi melalui berbagai media.

2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Kinerja pengawasan terdiri dari 5 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	96	93,8	0	0	Sangat Rendah	Inspektorat
		Maturitas SPIP	Nilai	3,077	3,12	3,077	99	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3,000	2,93	3	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	level	3	3	3	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
	RATA-RATA						74,66	Tinggi	
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	70,82	75	100	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	56,51	53	58,45	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	120	79	100	100	Sangat Tinggi	Inspektorat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	54	28,26	52,33	Rendah	Inspektorat
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	level	3	3	3	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
	RATA-RATA						94,70	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 74,66% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih terdapat indikator dengan skala penilaian sangat rendah yaitu indikator Persentase Capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK. Faktor penghambatnya adalah masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan timeline rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI) dan Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester. Upaya yang dilakukan adalah diperlukannya koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan dengan lebih baik dan diharapkan agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rata – rata capaian indikator program yaitu 94,70%, dan indikator Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya, yang masih memiliki skala penilaian Rendah. Faktor penghambatnya adalah Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko. Adapun upaya pencapaian target dilakukan dengan melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah.

2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaran Unsur Kewilayahan Urusan terdiri dari 1 indikator sasaran kinerja daerah dan 6 indikator kinerja program daerah pada kecamatan yang tidak ada kelurahannya, dan 8 indikator program pada kecamatan yang ada wilayah kelurahannya. Rata-rata capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan s.d Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Temanggung	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonobojo	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Wonobojo
		Kecamatan Kranggan	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Kranggan

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Bejen	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	B	B	B	100	ST	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	B	B	B	100	T	Kecamatan Tretep
	RATA-RATA						100	ST	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bulu

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	0	SR	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	161,54	100	181,63	100	ST	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonobojo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Wonobojo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tretep
		Persentase realisasi penerimaan PBB							
		Kecamatan Temanggung	%	90,57	95	0	0	SR	Kecamatan

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	97,78	95	0	0	SR	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	99,20	95	0	0	SR	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	98,40	95	0	0	SR	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	96,44	95	0	0	SR	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	96,06	95	0	0	SR	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	99,91	95	0	0	SR	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	95	100	100	ST	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	97,70	95	97,70	100	SR	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonobojo	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Wonobojo
		Kecamatan Kranggan	%	95,48	95	0	0	SR	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	98,29	95	0	0	ST	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	98,17	95	0	0	SR	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Bansari

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	95	0	0	SR	Kecamatan Tretep
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak							
		Kecamatan Temanggung	%	84,01	85	85	100	ST	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Kranggan	%	95,83	81	95,83	118,31	ST	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	81	100	100	ST	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Parakan	%	90,79	81	90,79	100	ST	Kecamatan Jumo
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kranggan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candirotto	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Candirotto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bansari

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tretep
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candirotto	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Candirotto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Ngadirejo

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonobojo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Wonobojo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kaloran

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonobojo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Wonobojo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Gemawang

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu							
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bejen

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	ST	Kecamatan Tretep
	RATA-RATA						84,14	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Rata-rata indikator program yaitu 100,76% dengan rincian indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak dengan capaian 104,57%
- 2) Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif dengan capaian 100%;
- 3) Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam dengan capaian 100%;
- 4) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa 100%;
- 5) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dengan capaian 100%;
- 6) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dengan capaian 100%.

Selanjutnya masih terdapat indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah untuk persentase Realisasi penerimaan PBB sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 9,88%.

Pada indikator persentase realisasi penerimaan PBB, faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah:

- a) Adanya penataan dan penyelesaian perhitungan sesuai Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2023 yang akan diberlakukan di tahun 2025 ini;
- b) Belum ada penetapan target PBB tahun 2025 oleh SK Bupati;
- c) Kurang pro aktifnya petugas pemungut pajak tingkat desa dalam memungut pajak sehingga mengakibatkan penyetoran pajak menjadi terhambat;
- d) Terdapat SPPT yang dikembalikan ke BPKPAD karena pergantian nama;
- e) Terdapat SPPT yang belum dibagikan kepada Wajib Pajak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
- f) Adanya Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota;
- g) Ketergantungan perekonomian masyarakat Temanggung akan panen raya tembakau, sehingga masyarakat cenderung membayar PBB setelah panen raya tembakau;
- h) Persiapan kevalidan data SPPT menggunakan data tahun 2025;
- i) Kesadaran, pengetahuan dan persepsi Wajib Pajak;
- j) Metode pelayanan yang masih bersifat manual;

- k) Terdapat SPPT yang tidak diketahui Wajib Pajaknya;
- l) Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak terutama secara online.

Adanya faktor-faktor penghambat tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2025 yaitu:

- a) Melakukan koordinasi dengan BPKPAD;
- b) Meningkatkan tertib administrasi PBB dan sosialisasi kepada warga masyarakat dan diupayakan sebelum tanggal 28 Desember 2025 sudah lunas;
- c) Meningkatkan monitoring ke desa terkait dengan PBB;
- d) Pembentukan Tim Insentififikasi penarikan PBB di tingkat Kecamatan;
- e) Terus memberi edukasi kepada masyarakat dan perangkat desa akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu;
- f) Melaksanakan jemput bola kepada wajib pajak;
- g) Meningkatkan sosialisasi ke Wajib Pajak untuk membayar pajak secara online;
- h) Pendataan dan pemutakhiran objek pajak secara berkala dan penerapan sanksi tegas dan persuasif;
- i) Mantri pajak harus berperan aktif mendorong petugas pemungut pajak tingkat desa agar lebih aktif.

2.10 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja unsur pemerintahan umum diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya konflik di masyarakat konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bankes-bangpol
	RATA-RATA						100	ST	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	100	90	78,28	100	ST	Bankes-bangpol
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	100	90	30	33,33	SR	Bankes-bangpol
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	18,18	16,67	20,98	100	ST	Bankes-bangpol
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	0	SR	Bankes-bangpol

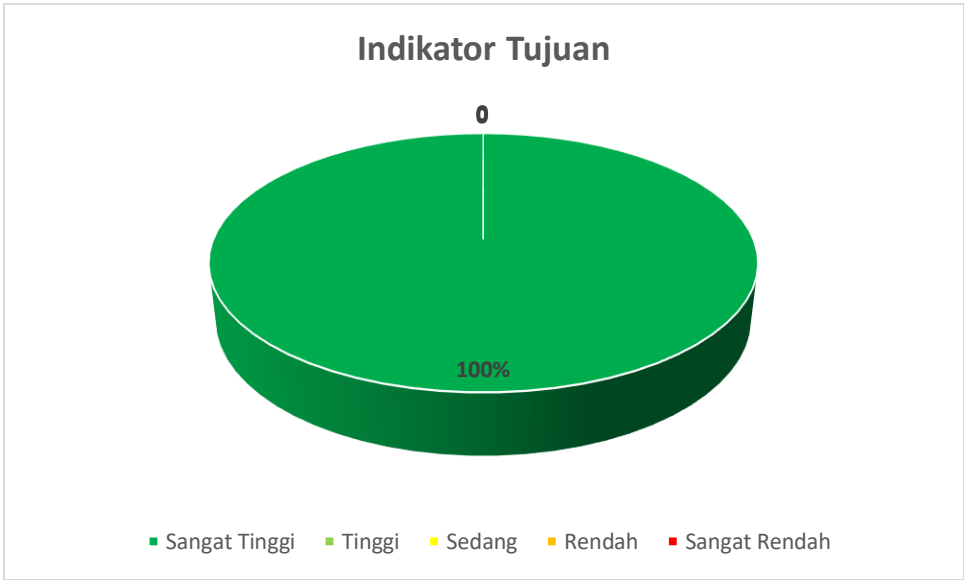
No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	S	Bankes-bangpol
	RATA-RATA						66,67	Sedang	

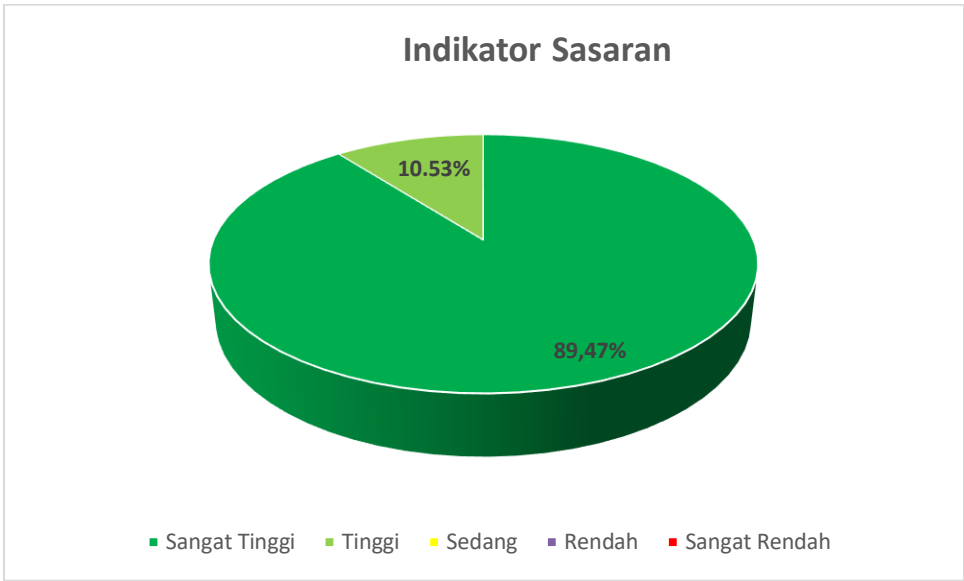
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan rata-rata capaian indikator program yaitu 66,67% dengan dua capaian indikator dengan skala penilaian kinerja sangat rendah yaitu :

- a) Persentase pelaksanaan pendidikan politik, faktor penghambat baru akan terjadwal di sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Adapun upaya untuk mencapai target di akhir tahun 2025 yaitu dengan melaksanakan penguatan penyampaian pendidikan politik dan budaya politik.
- b) Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan faktor penghambatnya yaitu minimnya kegiatan yang berhubungan dan melibatkan penghayat aliran kepercayaan. Adapun upaya untuk mencapai target di akhir tahun 2025 yaitu dengan meningkatkan penguatan toleransi umat beragama.

Total indikator pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu 537 indikator. Capaian kinerja pada indikator kinerja utama Kabupaten Temanggung terdiri dari 3 indikator kinerja tujuan dan 19 indiktor kinerja sasaran, persentase rata-rata capaian pada indikator kinerja utama atau indikator tujuan yaitu 98,48% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi dan rata-rata capaian indikator sasaran yaitu 92,48% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator tujuan dan indikator sasaran dengan skala nilai peringkat kinerja disajikan pada gambar 2.1.

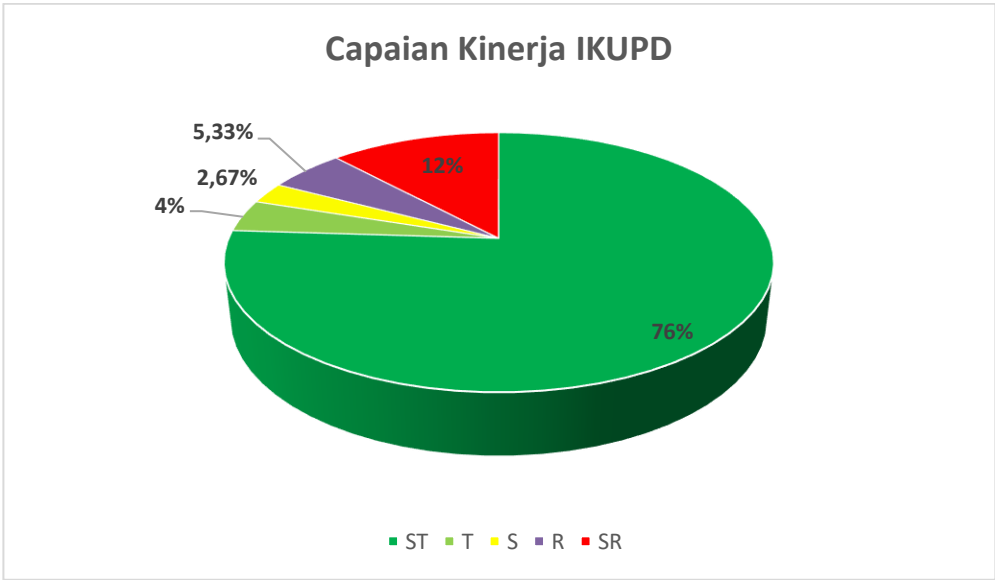


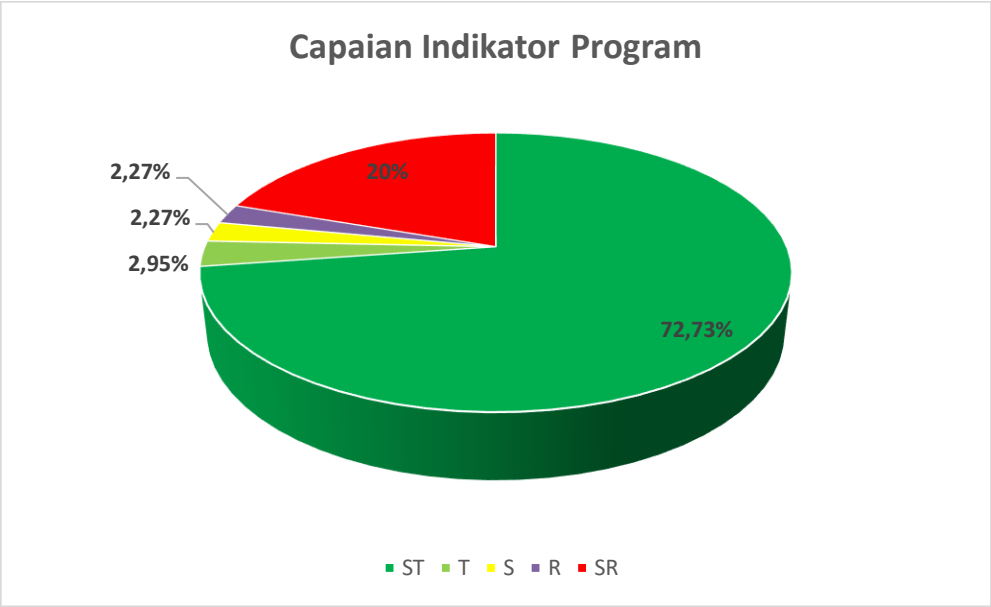


Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran s.d. Triwulan I Tahun 2025

Sedangkan IKUPD ada 56 Indikator dan 440 indikator program sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini. Rata-rata capaian IKUPD yaitu 89,63% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi dan rata-rata capaian indikator program yaitu 80,23% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Persentase sebaran skala nilai peringkat kinerja pada indikator IKUPD dan Indikator program disajikan pada gambar 2.2.





Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian Kinerja Indikator IKUPD dan Indikator Program s.d. Triwulan I Tahun 2025

2.11 Identifikasi Permasalahan

2.11.1. Identifikasi Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diantaranya:

1. Belum optimalnya indek pembangunann manusia jika dibandingkang dengan capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional
2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata
3. Belum optimalnya pendapatan per kapita jika dibandingkang dengan capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional
4. Angka kemiskinan ekstrim belum tuntas
5. Belum optimalnya Rata-rata Lama Sekolah
6. Belum optimlanya Harapan Lama Sekolah
7. Belum optimalnya Indeks Pembangunan Pemuda
8. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan

2.11.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1) Bidang Pendidikan

Masih rendahnya capaian pada indikator :

1. Rasio jumlah pengawas SD yang disebabkan oleh kurangnya minat guru atau kepala sekolah untuk mencalonkan diri, proses seleksi CKS yang ketat, dan hambatan seperti keterbatasan mobilitas fisik dan beban tanggung jawab domestik.
2. Angka putus sekolah SD sederajat yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, kurangnya akses dan masalah keluarga, kurangnya motivasi anak serta kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat
3. Presentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi Pendidikan SMA sederajat yang disebabkan oleh
4. Rasio jumlah pengawas SMP yang disebabkan oleh masih banyaknya pengawas sekolah yang sudah purna tugas; usulan pengawas baru harus melalui berbagai macam tahapan

2) Bidang Kesehatan

Masih rendahnya capaian pada indikator :

1. Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar yang disebabkan oleh :
 1. Belum seluruh puskesmas memenuhi standar ketenagaan
 2. Belum semua puskesmas rawat inap memiliki nutrisi seimbang sejumlah 2 orang, yaitu Puskesmas Wonoboyo, Pringsurat, Ngadirejo, Gemawang
 3. Belum semua puskesmas perkotaan memiliki tenaga promkes sejumlah 2 orang, yaitu Puskesmas Bulu, Kedu, Kranggan, Temanggung
 4. Puskesmas yang sudah memiliki tenaga SIK hanya sebanyak 4 puskesmas, yaitu Puskesmas Dharmarini, Tembarak, Selopampang, dan Jumo.
2. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan antenatal sesuai standar yang disebabkan oleh data sasaran ibu hamil yang digunakan merupakan data sasaran riil ibu hamil pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.
3. Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang disebabkan oleh data sasaran ibu hamil yang digunakan merupakan data sasaran riil ibu hamil pada

- tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.
4. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang disebabkan oleh data sasaran ibu bersalin yang digunakan merupakan sasaran riil ibu bersalin pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.
 5. Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan yang disebabkan oleh data sasaran ibu bersalin yang digunakan merupakan sasaran riil ibu bersalin pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.
 6. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang disebabkan oleh data sasaran bayi baru lahir yang digunakan merupakan sasaran riil bayi baru lahir pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.
 7. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang disebabkan oleh data sasaran balita yang digunakan merupakan sasaran riil balita pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sesuai data penduduk SMT 2 Tahun 2024 dari Dindukcapil sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.
 8. Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang disebabkan diantaranya adalah :
 1. Ketakutan dari anak untuk diperiksa
 2. data sasaran penduduk usia pendidikan dasar yang digunakan merupakan sasaran riil penduduk usia pendidikan dasar pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sesuai data penduduk SMT 2 Tahun 2024 dari Dindukcapil sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.
 9. Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang

disebabkan :

1. Masyarakat belum menerapkan paradigma sehat, dimana kebanyakan masyarakat hanya akan melakukan pemeriksaan kesehatan ketika mereka merasa sakit

2. Dalam indikator ini, sasaran penduduk usia produktif yang digunakan merupakan sasaran riil penduduk usia produktif pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sesuai data penduduk SMT 2 Tahun 2024 dari Dindukcapil sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.

10. Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang disebabkan oleh :

1. Masih adanya stigma di masyarakat bahwa yg berkunjung ke faskes utk skreening hanya lansia yg sakit saja.

2. data sasaran penduduk usia lanjut yang digunakan merupakan sasaran riil penduduk usia lanjut pada tahun sebelumnya (sasaran tahunan) sesuai data penduduk SMT 2 Tahun 2024 dari Dindukcapil sehingga diakhir tahun akan dilakukan penyesuaian sasaran riil pada tahun berjalan.

11. Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang disebabkan oleh:

1. Pola pikir masyarakat yang jika belum merasakan sakit belum mau ke pelayanan kesehatan.

2. Data kasus dari fasilitas kesehatan swasta banyak yang belum masuk.

3. Sistem pelaporan ASIK yang rumit dan sering maintenance

4. Tinggi angka prevalensi untuk Kabupaten Temanggung (35,5%)

12. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar disebabkan oleh :

1. Pola pikir masyarakat yang jika belum merasakan sakit belum mau ke pelayanan kesehatan.

2. Data kasus dari fasilitas kesehatan swasta banyak yang belum masuk.

3. Sistem pelaporan ASIK yang rumit dan sering maintenance

13. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yang disebabkan oleh :

1. Stigma masyarakat yang menyebabkan keluarga ODGJ tidak mau terbuka tentang kondisi kasus ODGJ
2. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam pelayanan dan penanganan kasus.

14. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar yang disebabkan oleh :

1. Ketersediaan anggaran mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan terduga TBC
2. Kader komunitas MSI (Mentari Sehat Indonesia) merupakan project NGO, jadi keberadaannya tidak tentu, sesuai adanya kontrak project untuk Kab. Temanggung atau tidak
3. Belum optimalnya informasi dan edukasi tentang TBC di masyarakat (pemahaman bahwa TBC harus diobati sampai tuntas masih kurang, masyarakat masih menganggap TBC dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan tuntas)

15. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar disebabkan oleh penjangkauan pada kelompok populasi kunci masih belum maksimal, masih ada populasi beresiko yang menolak atau ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan HIV, seperti pada kelompok LSL, ibu hamil dan pasien TB

Masih terdapatnya stigma & diskriminasi pada ODHIV di lingkungan masyarakat sehingga banyak ODHIV yang enggan untuk mencari perawatan medis atau melakukan terapi ARV. Banyak temuan kasus baru yang meninggal sebelum pengobatan (keterlambatan deteksi dini).

16. Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan disebabkan oleh Terdapat penolakan imunisasi imunisasi, terdapat hoax mengenai imunisasi, efek keraguan masyarakat pasca adanya KIPI, keterbatasan anggaran pendukung program imunisasi dan KIPI, beberapa stok vaksin tertentu tdk tersedia karena ketersediaan vaksin tergantung dari Pusat dan distribusi pusat ke Provinsi sehingga terjadi

penundaan imunisasi, data sasaran masih mengacu dari Kemkes terlalu tinggi.

17. Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna yang disebabkan oleh adanya perubahan Definisi Operasional teknis dari masing-masing indikator penilaian PHBS Rumah Tangga

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator yang sangat rendah yaitu :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari yang disebabkan oleh:
 - 1) Keterbatasan dana untuk peningkatan sistem penyediaan air minum
 - 2) Belum ada pekerjaan fisik di awal tahun dan output tersedia di laporan akhir tahun karena data yang dihitung data tahun berjalan (tahun n)
2. Persentase terbangunnya gedung pemerintah yang disebabkan oleh terbitnya SE tentang efisiensi anggaran sehingga banyak pekerjaan yang ditunda pelaksanaannya

4) Bidang Sosial

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sedang dan sangat rendah yaitu :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani yang disebabkan oleh beberapa kegiatan yg belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu penetapan perubahan dan mekanisme penyaluran bansos DBHCHT
2. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial yang disebabkan oleh bantuan belum bisa dicairkan karena masih dalam tahap proses melengkapi administrasi persyaratan pencairan.

5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sedang dan sangat rendah yaitu :

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota yang disebabkan oleh :

- 1) Temanggung memiliki wilayah yang luas.
 - 2) Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah.
 - 3) Model permukiman yang Padat membuat akses jalan menjadi sempit
 - 4) banyaknya masyarakat yang berkerumun mengakibatkan akses jalan terhambat
 - 5) pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah. Temanggung memiliki wilayah yang luas.
2. cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten yang disebabkan oleh:
- 1) APD dan sarpras yang dipergunakan dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Kabupaten Temanggung belum sesuai standar Permendagri nomor 122 tahun 2018 tentang Standarisasi Sarpras Damkar di Daerah
 - 2) Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia
 - 3) Belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yang dialaminya sudah dilengkapi sarpras dan apd sesuai jenis kejadiannya
 - 4) Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian tersebut
3. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang disebabkan oleh :
- 1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
 - 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
 - 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.

- 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran
4. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran yang disebabkan oleh :
 - 1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
 - 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
 - 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
 - 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran
5. Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi yang disebabkan oleh :
 - 1) Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi inspektur proteksi kebakaran
 - 2) Keterbatasan jumlah pegawai yang menangani pencegahan kebakaran
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sedang dan sangat rendah yaitu :

1. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang disebabkan oleh keterbatasan kuota pelatihan dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran yang diperhadapkan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi, Khusus pelatihan DBHCHT hanya bisa diakses oleh masyarakat petani/keluarga buruh tembakau sehingga masyarakat umum tidak dapat mengakses pelatihan DBHCHT dan adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berimbas pada pemangkasan paket

pelatihan yang sudah teranggarkan di tahun 2025.

2. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran LPKS untuk mengirim laporan rutin tiap semester karena tidak ada sanksi khusus.
3. Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja yang disebabkan oleh tahun 2025 tidak mendapatkan pagu anggaran untuk pelatihan perluasan
4. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pencairan UP kegiatan sehingga penyuluhan dan bimbingan jabatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada Triwulan I tahun 2025.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sedang dan sangat rendah yaitu :

1. Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender yang disebabkan oleh :
 - 1) Kurangnya pemahaman dan Kapasitas SDM
 - 2) Banyak perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran
 - 3) Komitmen Politik yang lemah
 - 4) Implementasi ARG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari pimpinan Lembaga atau daerah, tanpa dukungan ini ARG , hanya menjadi formalitas , dan saat ini belum optimalnya tim driver PUG .
 - 5) Anggaran ARG menambah beban kerja
 - 6) Beberapa Pihak menganggap ARG hanya sebagai beban administrasi tambahan , bukan bagian penting dari perencanaan yang berkualitas
 - 7) Belum Terintegrasi dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran
 - 8) ARG belum menjadi bagian yang menyatu dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan secara luas , sehingga penerapannya tidak konsisten

3) Bidang Lingkungan Hidup

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

1. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebabkan oleh data pendukung masih belum update.
2. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh Belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung
3. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang disebabkan oleh :
 - 1) Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun
 - 2) Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

- 1) Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa yang disebabkan oleh desa belum sepenuhnya paham apa saja yang boleh dijadikan obyek.
- 2) Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES yang disebabkan oleh SIPADES versi 3.0 baru diluncurkan pada Agustus 2024, sehingga belum cukup waktu untuk melaksanakan sosialisasi ke semua desa
- 3) Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD yang disebabkan oleh belum semua anggota BPD memahami tupoksinya, sehingga tidak melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah desa
- 4) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum yang disebabkan oleh Proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa.

5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

1. Persentase Koperasi Sehat yang disebabkan oleh :
 - 1) Kurangnya SDM Pengawas koperasi
 - 2) Ada koperasi yang tidak rutin membuat laporan dan mengirimkan ke Dinas
2. Persentase UMKM yang difasilitasi yang disebabkan oleh minimnya kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mengikuti program yang telah disediakan dan anggaran yang terbatas untuk program fasilitasi, seperti pelatihan.
3. Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif yang disebabkan oleh Tahun 2025 tidak ada anggaran untuk melaksanakan pelatihan bagi pengurus, pengelola dan pengawas koperasi
4. Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan yang disebabkan oleh Banyak koperasi yang tidak ditemukan dan Pengurus, pengelola dan pengwas koperasi yang sudah tidak ada. Proses pembubaran koperasi sangatlah rumit, dan bukan Dinas yang membubarkan akan tetapi Dinas hanya mengusulkan ke Kemenkop dan yang akan membubarkan adalah dari Kemenkumham.
5. Persentase UMKM yang difasilitasi yang disebabkan oleh Minimnya kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mengikuti program yang telah disediakan

6) Bidang Penanaman Modal

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu pertumbuhan realisasi investasi disebabkan oleh lahan KPI yang masih tersedia berada dibelakang dan belum ada akses.

7) Bidang Kebudayaan

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu persentase kelompok kesenian yang produktif disebabkan oleh Kualitas SDM yang belum merata.

8) Bidang Perpustakaan

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

1. Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan oleh :
 - 1) Belum semua perpustakaan melaporkan data pokok perpustakaannya
 - 2) Banyak perpustakaan yang tidak aktif karena kurangnya tenaga perpustakaan dan tidak adanya jumlah koleksi perpustakaan yang menarik untuk perpustakaan
2. Persentase penelusuran naskah kuno disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang belum memahami naskah kuno

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Pariwisata

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan yang disebabkan oleh perubahan (naik turun jumlah pengunjung) sangat tergantung pada faktor pelaku usaha (eksternal dinas).
2. Persentase Peningkatan pelaku Ekraft yang disebabkan oleh Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi Kreatif (ekraf) dan belum ada aturan secara detail yang menentukan pelaku ekraf.

2) Bidang Perdagangan

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

1. Persentase fasilitasi pelaku usaha informal yang disebabkan oleh tidak adanya Anggaran Kegiatan yang menunjang untuk Fasilitasi.
2. Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting yang disebabkan oleh :
 - 1) Petugas pantau yang ada mempunyai tugas rutin lainnya yang harus dilaksanakan setiap hari.
 - 2) Tidak tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting.
3. Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang disebabkan oleh sosialisasi belum menyeluruh kepada wajib tera dan anggaran yang terbatas untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang ke lokasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya milik wajib tera berada/terpasang (Pelayanan

Jemput Bola)

4. Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri yang disebabkan oleh Terbatasnya anggaran khusus untuk Kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Sekretariat Daerah

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

1. Presentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan maupun kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal dan aplikasi yang sering maintenance
2. Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran menyebabkan pekerjaan yang sudah dilelang tidak dilanjutkan kontraknya; dan Triwulan 1 sebagian besar pekerjaan belum dimulai.
3. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi disebabkan oleh Agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok
4. Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) yang disebabkan oleh persiapan Perencanaan dari Perangkat Daerah dan kebijakan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan
5. Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta) disebabkan oleh Kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 100 juta secara keseluruhan
6. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disebabkan oleh Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta

2) Sekretariat Dewan

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat

rendah yaitu :

1. Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD disebabkan oleh adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029 dan adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan
2. Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas disebabkan oleh proses harmonisasi yang membutuhkan waktu
3. Presentase kegiatan peningkatan kapasitas Anggota DPRD disebabkan oleh adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Keuangan

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu :

1. Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah disebabkan oleh masih terdapat selisih terhadap hasil rekonsiliasi
2. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah disebabkan oleh :
 - 1) pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal serta capaian pada triwulan I belum menggambarkan keseluruhan realisasi Pajak Daerah
 - 2) PBB-P2 tahun pajak 2025 belum ditetapkan sampai dengan TW I berakhir, sehingga realisasi merupakan pembayaran atas piutang pajak sebelum tahun pajak 2025

2) Penelitian dan Pengembangan

Masih adanya indikator dengan capaian kurang dari 100% pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah yang disebabkan oleh Kurangnya validasi dan ketersediaan data yang mendukung analisis, keterbatasan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dan merealisasikan dokumen perencanaan, stagnansi pada variabel tertentu yang tidak menunjukkan peningkatan signifikan, serta tantangan dalam sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi program pembangunan. Selain itu,

hambatan administratif, seperti aturan yang belum sepenuhnya mendukung inklusivitas dan keberlanjutan, juga turut mempengaruhi pencapaian nilai optimal.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator rendah dan sangat rendah yaitu :

1. Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK disebabkan oleh :
 - 1) Masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan timeline rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI)
 - 2) Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester
2. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya disebabkan oleh belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko.

7. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Masih adanya indikator dengan capaian pada indikator sangat rendah yaitu persentase realisasi penerimaan PBB disebabkan oleh baru disusun regulasi Tahun 2025 yang mengatur penerimaan PBB di Kabupaten Temanggung.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Berdasarkan evaluasi Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum tercapai sesuai target, adanya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2024 yang belum di audit oleh BPK perlu disesuaikan dalam perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Selain itu, sehubungan dengan pasca pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sehingga diperlukan penyesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan guna

menyinerjikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, diperlukan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 perlu penyesuaian perencanaan dan penganggaran dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan analisis evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut:

1. Penyesuaian program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Penyesuaian prioritas program Nasional dan Provinsi tanpa menambah atau mengurangi program;
3. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Penyesuaian pengalokasian dana program, kegiatan dan sub kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana pada proses penyusunan RKPD Tahun 2024 belum masuk pada dokumen perencanaan karena belum ada kepastian ketetapan penganggaran, yaitu program kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan/transfer : Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBHCHT;
5. Pemanfaatan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025;
6. Dilakukan penyesuaian target indikator Makro pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025;
7. Pada indikator Indeks Kebudayaan diperlukan indikator pengganti yang dapat dihitung setiap tahunnya untuk menggambarkan kinerja bidang kebudayaan;
8. Pada indikator Indeks Pembangunan Olahraga dilakukan perhitungan secara mandiri dengan mengacu perhitungan pada setiap dimensi perhitungan IPO yaitu angka rata-rata ruang terbuka olahraga, sumberdaya manusia, partisipasi olahraga dan dimensi kebugaran;
9. Memprioritaskan capaian kinerja Pembangunan daerah terutama

capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja Rendah dan Sangat Rendah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global dan nasional pada 2025 mengalami dinamika yang cukup kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Dunia masih dalam proses menstabilkan ekonomi pasca dampak jangka panjang pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik (seperti perang di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah serta Asia Timur). Ketidakpastian global tetap tinggi, mempengaruhi harga energi dan komoditas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 diperkirakan sekitar 4,7% - 5,2%, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi serta sektor-sektor seperti pariwisata, industri manufaktur, dan pertambangan menunjukkan

pemulihan yang baik. Namun demikian masih terdapat Ketimpangan pendapatan, pengangguran terbuka, serta ancaman perubahan iklim.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, sedikit melambat dibanding Tahun 2023 sebesar 5,05 persen. PDB Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 22.139 triliun, dengan PDB perkapita sebesar Rp 78,61 juta atau setara USD 4.960,3.

Sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu:

- Jasa lainnya: tumbuh sebesar 9,8% dan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi
- Transortasi dan pergudangan: tumbuh sebesar 8,69%
- Akomodasi dan makanan minuman: tumbuh sebesar 8,56%
- Industri manufaktur: tumbuh sebesar 4,43% dan menjadi penyumbang terbesar PDB dengan kontribusi sebesar 18,98%.

Apabila kita melihat pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,94% dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 54,04% terhadap total PDB. Contributor terbesar kedua yaitu dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 4,61% dan berkontribusi 29,15% terhadap total PDB. Kontribusi gabungan dari konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, ekspor dan Impor hanya berkisar 6,81%, meskipun pertumbuhannya tinggi. Pertumbuhan konsumsi LNPRT di angka 12,48%, konsumsi pemerintah tumbuh 6,61%, ekspor sebesar 6,51% dan pertumbuhan impor 7,95%. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah, Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,02% dengan pertumbuhan 4,92%.

Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi

nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2025	P-RKPD 025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6	5,3-5,6
2	Inflasi	%	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5-5,0	4,5-5,0
4	Angka Kemiskinan	%	7,8-8,0	7,8-8,0
5	Rasio Gini	Angka	0,379 –0,382	0,379 –0,382
6	Indeks Modal Manusia (GNI)	Angka	0,56	0,56

Sumber: Kementerian Bappenas (Permen PPN Ka Bappenas Nomor 2 Tahun 2024)

3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pada tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,95 persen di tengah ketidakpastian global walaupun masih di bawah nasional sebesar 5,03 persen. Ekonomi Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,36 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan penyumbang empat terbesar pada perekonomian nasional. Struktur ekonomi Jawa Tengah tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, menjadi kontributor tertinggi yang berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, serta percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi Covid-19 berimbas pada kenaikan pendapatan per kapita Jawa Tengah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil juga berpengaruh terhadap menurunnya pengangguran di Jawa Tengah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT Jawa Tengah pada bulan Agustus 2024 mencapai angka 4,78 persen yang berarti diantara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 4

(empat) orang penganggur. TPT Agustus 2024 turun sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah menunjukkan tren turun. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan.

3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Arah pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, dimana pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90-5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5-3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 49,30-49,73 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2025	RPJMD 2025-2029
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,60	4,90-5,60
2	PDRB per kapita	Juta Rp	48,53-48,66	49,30-49,73
3	Inflasi	%	2,5 ± 1	1,5-3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42	4,81-4,42
5	Angka Kemiskinan	%	9,28-8,08	9,66-9,00
6	Rasio Gini	Angka	0,362	0,362- 0,367

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses

- pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
 - 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,04 persen yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada katagori PDRB diantaranya kenaikan yang cukup signifikan pada katagori konstruksi sebesar 13,47 persen, katagori jasa perusahaan sebesar 11,29 persen, katagori jasa

pendidikan sebesar 8,50 persen katagori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26 persen, katagori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01 persen, katogari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98 persen, selajutnya katagori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62 persen. Untuk katagori lain mengalami perlambatan yang masih kecil jika dibandingkan dengan katagori yang mengalami percepatan atau kenaikan.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.998,53 miliar rupiah pada Tahun 2023 menjadi 17.855,58 miliar di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen. Peningkatan angka PDRB ini menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan paska pandemi Covid-19 yang baik dan efektif (BPS, 2024).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik di tahun 2024 menjadi 2,35 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,32 persen. Sedangkan Angka kemiskinan turun, dari sebelumnya 9,26 persen di tahun 2023, turun menjadi 8,67 persen pada tahun 2024. Sedangkan inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,52 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y).

3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,75-4,90 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5-2,50 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 8,33 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 2,34-2,30 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,76 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 36,00-38,70 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,382-0,370 di tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka menuju angka proyeksi 2,30-2,17 persen, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:

- a. Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
- b. Perluasan kerja di sektor informal;
- c. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;
- d. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui program tenaga kerja mandiri dengan fasilitas dukungan seperti peralatan usaha, pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
- e. Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
- f. Perlindungan sosial bagi pekerja.

3.1.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 sebesar 6,9% . Hal

ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,90–5,60%.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2025 ekonomi akan tumbuh dan diharapkan aktivitas perekonomian kembali normal. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2025, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3.3
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2025	5,28	4,90 – 5,60	5,1-5,5
Perubahan 2025	4,75-4,90	4,90-5,60	6,90

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Proyeksi target pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih rendah atau tidak terlalu tinggi seperti terjadi karena beberapa faktor, baik dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (global) seperti Geopolitik global yaitu konflik Rusia-Ukraina, situasi Timur Tengah memicu ketidakstabilan harga energi dan komoditas. Selain itu Tahun-

tahun awal setelah pandemi COVID-19 menunjukkan pertumbuhan tinggi karena efek "*rebound*", Namun ketika ekonomi mulai kembali ke level normal, laju pertumbuhan cenderung melambat secara alami.

3.1.6.2. Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.4.

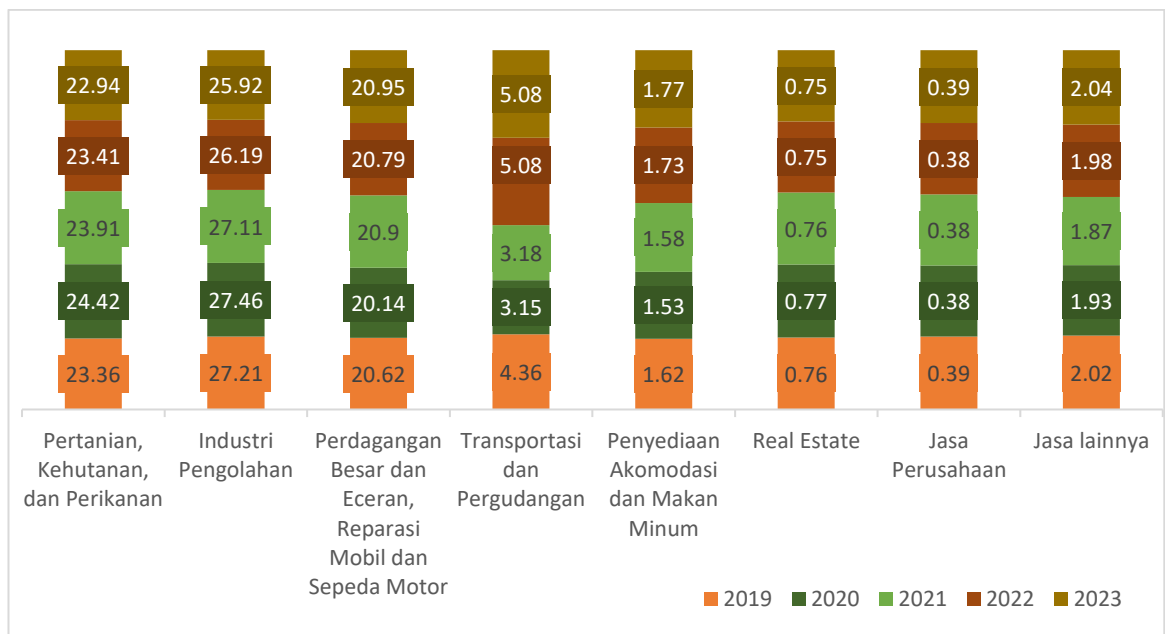
Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK
Tahun 2018-2023

	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.36	1.73	1.86	0.86	2,92	1,82
B	Pertambangan dan Penggalian	3.61	4.24	2.11	6.75	-3.94	3,12
C	Industri Pengolahan	5.63	4.39	-0.62	2.00	1,09	4,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.62	4.22	2.87	4.84	5,26	5,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.67	4.74	2.02	5.62	0,22	4,36
F	Konstruksi	5.79	8.15	-2.01	7.54	3,72	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.79	5.39	-3.79	7.40	4,30	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	4.53	9.29	-30.59	2.37	65,39	7,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.24	9.41	-6.81	6.03	15,04	12,49
J	Informasi dan Komunikasi	11.05	15.69	14.14	5.98	2,24	11,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.17	3.73	2.01	3.42	0,51	2,91
L	Real Estate	4.65	7.21	-0.10	2.32	5,80	8,36
M,N	Jasa Perusahaan	8.77	10.21	-6.32	3.01	5,65	8,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.11	3.41	-1.61	-0.26	1,60	5,11

	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
P	Jasa Pendidikan	5.98	8.16	-0.19	0.54	1,63	6,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.86	8.22	7.70	0.59	2,59	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.87	8.33	-6.22	0.98	10,95	8,83
	PDRB	5,13	5,05	-2,13	3,34	5,20	5,00

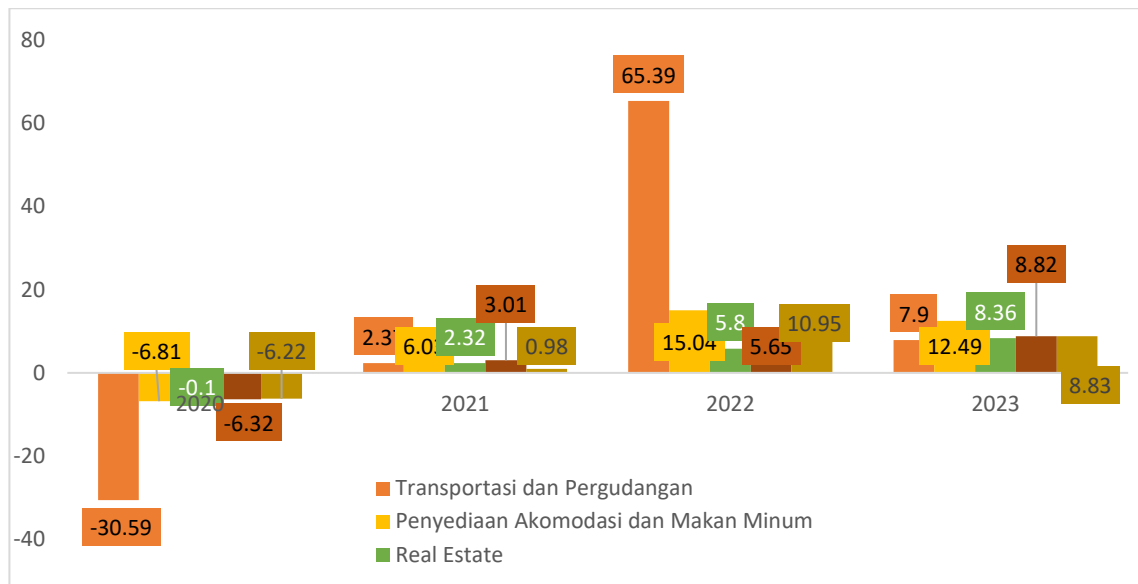
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Meskipun 3 sektor tersebut adalah penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung, akan tetapi 3 sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.



Sumber: BPS Kab Temanggung 2024

Gambar 3.1
Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kab Temanggung 2024

Gambar 3.2
Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2018 sedikit bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2018 sampai 2023 yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung. Hal ini didukung dengan pertumbuhan lapangan usaha sektor Transportasi Pergudangan dengan sektor pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 65,39% diikuti oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 15,04% yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun daerah tetangga.

3.1.6.3. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu

daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Tabel 3.5
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

TAHUN	NILAI (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	27.702.750,00	-3,01
2021	28.484.021,00	4,24
2022	30.930.000,00	8,62
2023	33.290.000,00	7,60
2024	35.494.000,00	6,62

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2024 PDRB Perkapita mengalami peningkatan dengan pertumbuhannya menjadi 6,62%.

Peningkatan pendapatan perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- b. Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM / pengembangan ekonomi kreatif;

- c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
- e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.6.4. Inflasi

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Jawa Tengah.

Tabel 3.6
Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

LOKASI	2020	2021	2022	2023	2024
Temanggung	1,56	1,70	5,63	2,89	1,52
Jawa Tengah	1,56	1,70	5,63	2,89	1,67
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Keterangan : Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Secara umum, data ini memperlihatkan Kabupaten Temanggung berhasil menjaga stabilitas harga dengan adanya deflasi. Deflasi ini mencerminkan bahwa daya beli masyarakat meningkat atau stabil dan adanya penurunan biaya produksi di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, yang bisa menjadi indikasi bahwa kebijakan ekonomi berhasil menstabilkan inflasi. Deflasi yang terjadi bisa diartikan sebagai tanda- tanda stabilisasi ekonomi yang terjadi di Temanggung.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;
- b. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
- c. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;

- d. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
- e. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan menyesuaikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program *asta cita* antara lain :

1. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
4. Pengendalian Inflasi Daerah
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
6. Dukungan swasembada pangan

7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasukan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

8. Pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik”**, dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu:

- a. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
- b. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
- c. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

2. Dukungan implementasi kebijakan nasional pada:

- a. penurunan stunting menjadi 14 persen;
- b. penurunan angka kemiskinan;
- c. pengendalian inflasi daerah;

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPD tahun 2025 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Daerah di tahun 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan tahun 2024. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

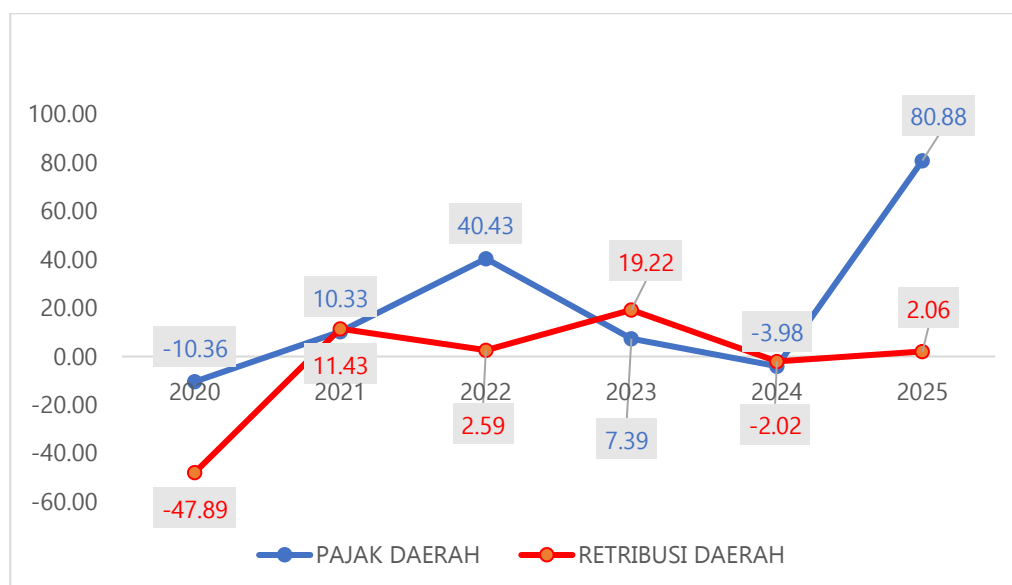
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan memertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pemungutan PAD antara lain:

1. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah;

3. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
7. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain;
8. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
10. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat berjalan efektif.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2020 karena dampak pandemi *Covid-19* namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dan naik kembali pada tahun 2025. Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Pertumbuhan Retribusi daerah juga mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*, kemudian naik pada tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan dan turun kembali pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar 2,06%. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar.

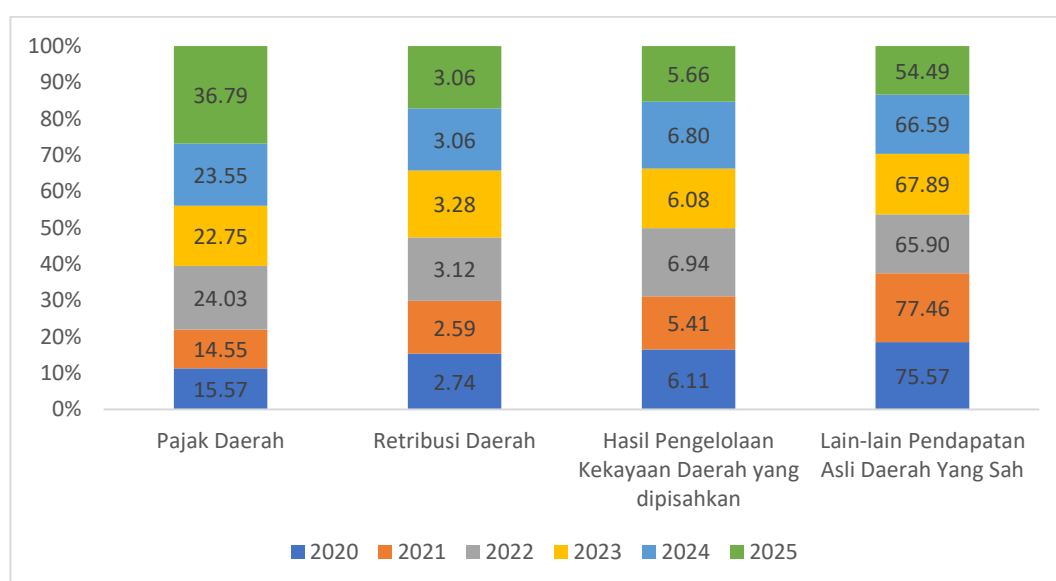
Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah

yaitu Pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD pada RKPD Tahun 2025 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan objek pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun 2024;
 - b. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah. Digitalisasi penerimaan pendapatan retribusi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan transaksi pembayaran dan pengawasan realisasi pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi Los/Kios Pasar;
 - c. Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dengan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan (DBH dan DAU diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik dan Non Fisik yang bersifat in out, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2024);
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, namun untuk Bantuan Keuangan yang bersifat in out dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
- Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2025 karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga.
 - Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;
 - Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidesial.



Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024.

Gambar 3.4
Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 dan APBD Tahun 2025

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	REALISASI 2023	REALISASI 2024	APBD 2025
PENDAPATAN DAERAH	2.003.870.332.664	2,099,479,855,788	2,017,622,369,083
1 Pendapatan Asli Daerah	350.283.014.437	388,858,102,726	379,485,855,146

URAIAN			TAHUN ANGGARAN		
			REALISASI 2023	REALISASI 2024	APBD 2025
	a.	Pajak Daerah	79.677.967.921	76,926,746,042	138,418,634,896
	b.	Retribusi Daerah	11.496.721.044	10,925,370,668	198,471,211,768
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.311.076.903	22,645,578,254	21,298,004,241
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	237.797.248.569	278,360,407,762	21,298,004,241
2	Pendapatan Transfer		1.653.587.318.227	1,710,621,753,062	1,638,136,513,937
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	1.517.163.835.087	1,525,673,694,150	1,556,822,184,000
		1) Dana Perimbangan	1.245.317.994.087	1,250,481,698,150	1,308,921,284,000
		a) Dana Transfer Umum-DBH	75.150.038.079	69,727,710,589	80,200,387,000
		b) Dana Transfer Umum-DAU	791.039.886.585	843,895,369,956	845,234,730,000
		c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	109.544.079.906	67,587,633,850	81,787,260,000
		d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	269.583.989.517	269,270,983,755	301,698,907,000
		2) Dana Insentif Daerah	29.383.259.000	-	-
		3) Dana Otonomi Khusus	-	-	-
		4) Dana Keistimewaan	-	-	-
		5) Dana Desa	242.462.582.000	246,690,892,000	238,898,620,000
		6) Insentif Fiskal	-	28,501,104,000	9,002,280,000
	b.	Transfer antar Daerah	136.423.483.140	184,948,058,912	81,314,329,937
		1) Pendapatan Bagi Hasil	123.749.375.637	125,426,694,912	81,314,329,937
		2) Bantuan Keuangan	12.674.107.503	59,521,364,000	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	-
	a.	Hibah	-	-	-
	b.	Dana Darurat	-	-	-
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2025

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan Perubahan RKPD tahun 2025 masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Tabel 3.8
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2024
PENDAPATAN DAERAH	1.946.935.976.641	2.017.622.369.083	1.958.673.253.856
1. Pendapatan Asli Daerah	376.195.806.669	379.485.855.146	358.678.943.856
a. Pajak Daerah	138.389.282.596	138.418.634.896	78.370.855.400
b. Retribusi Daerah	191.392.376.170	198.471.211.768	10.969.140.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.311.076.903	21.298.004.241	22.645.578.254
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	25.103.071.000	21.298.004.241	246,693.370.202
2. Pendapatan Transfer	1.570.740.169.972	1.638.136.513.937	1.599.994.310.000
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.489.425.840.035	1.556.822.184.000	1.497.343.172.000
1) Dana Perimbangan	1.250.105.264.035	1.308.921.284.000	1.249.442.272.000
a) Dana Transfer Umum-DBH	76.020.400.035	80.200.387.000	80.200.387.000
b) Dana Transfer Umum-DAU	820.750.031.000	845.234.730.000	826.265.502.000
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	71.223.524.000	81.787.260.000	40,629,956,000
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	282.111.309.000	301.698.907.000	302.346.427.000
2) Insentif Fiskal	-	9.002.280.000	9.002.280.000
3) Dana Otonomi Khusus	-		
4) Dana Keistimewaan	-		
5) Dana Desa	239.320.576.000	238.898.620.000	238.898.620.000
b. Transfer antar Daerah	81.314.329.937	81.314.329.937	102.651.138.000
1) Pendapatan Bagi Hasil	81.314.329.937	81.314.329.937	92.967.138.000
2) Bantuan Keuangan	-	-	9.684.000.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-		
a. Hibah	-	-	-
b. Dana Darurat	-	-	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan pendapatan tertinggi yaitu pada pendapatan transfer. Sedangkan untuk PAD hanya naik sedikit dimana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa pendapatan BLUD menjadi salah satu penyumbang kenaikannya.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disebabkan karena:

- a. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Target APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2025 pada rekening pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2025 pada rekening Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di RKPD Perubahan 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :
 - a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.

- c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
 - d. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
 - e. Melakukan penagihan piutang PBB-P2 melalui informasi tunggakan pajak pada SPPT PBB-P2.
 - f. Meningkatkan pelayanan pajak daerah melalui tanda tangan elektronik pada SPPT PBB-P2.
 - g. Mempermudah dan memperluas cakupan pembayaran pajak daerah, baik dengan system id billing, Bima Qris Bank Jawa Tengah, BUMDes, Kantor Pos dan Indomart.
 - h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembayaran pajak dan pembayaran tunggakan pajak.
 - i. Updating perundangan/Perbub terkait pajak (Perbub Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel), Restoran, BPHTB, MBLB, Air Tanah, PBBP2, Hiburan, Reklame, Insentif Pajak, Nilai Sewa Reklame (NSR).
 - j. Melakukan update NJOP. 1. Melakukan pemasangan alat monitoring pajak antara lain yaitu di Restoran, Hotel dan Tempat Parkir.
2. Upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui :
- d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
 - e. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
 - f. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
 - g. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Wujud sinergitas pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara Pemprov Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi bersama terkait pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Mendukung dan berperan aktif atas program-program yang diluncurkan Pemprov terutama terkait dengan PKB dan BBNKB;
3. Membantu pendistribusi Surat Tagihan kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Temanggung;
4. Bersinergi dengan UPPD Samsat Temanggung dan Kepolisian terkait kegiatan Operasi Gabungan di jalan raya yang dilakukan di wilayah Kabupaten Temanggung;
5. Bersinergi dengan UPPD Samsat Temanggung dan Kepolisian terkait kegiatan Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (gadis pantura) yang melakukan sidak ke perkantoran/tempat khusus di wilayah Kabupaten Temanggung; dan
6. Melakukan rekonsiliasi setiap bulan antara UPPD Samsat Temanggung dengan Bendahara Penerimaan terkait penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Gambaran rinci realisasi belanja daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Tahun 2022-2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	2.005.470.211.214	2.063.276.383.157	2.082.224.159.824
1. Belanja Operasi	1.314.615.499.764	1.459.427.281.030	1.512.987.691.753
a. Belanja Pegawai	739.381.293.467	809.500.064.847	835.414.435.528
b. Belanja Barang dan Jasa	486.001.435.629	530.680.423.533	555.355.516.548
c. Belanja Bunga	-	-	-
d. Belanja Subsidi	-	-	-
e. Belanja Hibah	71.337.288.350	112.836.920.650	111.467.431.677
f. Belanja Bantuan Sosial	17.895.482.318	6.409.872.000	10.750.308.000
2. Belanja Modal	257.495.125.454	203.643.575.194	164.561.497.546,
a. Belanja Tanah	-	1.000.000.000	-
b. Belanja Peralatan dan Mesin	99.830.914.103	74.726.723.446	77.286.656.183
c. Belanja Bangunan dan Gedung	115.718.010.011	52.073.140.248	37.465.772.157
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.364.351.340	69.744.111.000	41.954.115.310
e. Belanja modal aset tetap lainnya	5.581.850.000	6.015.223.000	7.796.173.009
a. Belanja modal aset lainnya	-	84.377.500	58.780.887
3. Belanja Tidak Terduga	17.004.350.000	2.293.680.126	-
4. Belanja Transfer	416.355.235.996	397.911.846.807	404.674.970.525
a. Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000	7.997.804.000	8.753.922.170
b. Belanja Bantuan Keuangan	409.454.235.996	389.914.042.807	395.921.048.355

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Anaudited.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
2. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin

pelayanan dasar masyarakat; dan

5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal;

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2025, Penetapan APBD Tahun 2025, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2025

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
BELANJA DAERAH	2.076.390.105.919	2.124.690.575.218	2.088.401.798.967
1. Belanja Operasi	1.540.590.671.300	1.595.817.398.614	1.582.653.768.249
a. Belanja Pegawai	889.802.050.241	977.338.529.883	975.022.717.529
b. Belanja Barang dan Jasa	499.861.283.074	489.112.324.831	510.084.202.569
c. Belanja Subsidi	-	-	-
e. Belanja Hibah	138.154.757.985	125.467.412.900	107.153.952.900
f. Belanja Bantuan Sosial	12.772.580.000	3.899.131.000	3.899.131.000
2. Belanja Modal	116.565.770.255	133.570.669.730	96.435.926.009
a. Belanja Tanah	-	-	-
b. Belanja Peralatan dan Mesin	39.016.761.469	63.172.098.728	61.484.984.891
c. Belanja Bangunan dan Gedung	46.317.439.145	14.970.671.400	7.165.509.400
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.854.869.250	50.360.754.000	23.813.278.000
e. Belanja modal aset tetap lainnya	3.279.550.391	4.971.395.602	3.899.153.718
a. Belanja modal aset lainnya	97.150.000	95.750.000	73.000.000
3. Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4. Belanja Transfer	406.731.266.364	394.302.506.874	394.805.868.960
a. Belanja Bagi Hasil	14.988.600.364	8.800.736.874	8.800.736.874
b. Belanja Bantuan Keuangan	391.742.666.000	385.501.770.000	386.005.132.086

Sumber: Bappeda dan BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disebabkan karena:

- a. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi

- dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Menyesuaikan program prioritas Nasional dan Provinsi; dan
 - c. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2025, APBD Tahun 2025, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
Belanja Operasi	1.540.590.671.300	1.595.817.398.614	1.582.653.768.249
Belanja Daerah	2.076.390.105.919	2.124.690.575.218	2.088.401.798.967
Persentase	74,20	75,11	75,78

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah rata-rata adalah 75,78%. Persentase belanja operasi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2025 yaitu sebesar 76,28% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 65,61%.

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Tabel 3.12
Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
Belanja Modal	116.565.770.255	133,570,669,730	96.435.926.009
Belanja Daerah	2.076.390.105.919	2,124,690,575,218	2.088.401.798.967
Persentase	5,61	6,29	4,62

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 4,62%. Persentase belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2022 yaitu sebesar 12,61 % dan terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 5,61 %.

3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3.13
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
Belanja Transfer	406.731.266.364	394,302,506,874	394.805.868.960
Belanja Daerah	2.076.390.105.919	2,124,690,575,218	2.088.401.798.967
Persentase	19,59	18,56	18,9

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 18,9%, lebih rendah dari persentase yang dicantumkan pada RKPD Tahun 2025 menyesuaikan transfer keuangan ke daerah tahun 2025. Persentase belanja transfer tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 23,34% dan terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 19,03%.

3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.14
Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Belanja Daerah	2.076.390.105.919	2.124.690.575.218	2.088.401.798.967
Persentase	0,12	0,47	0,05

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 0,05%, lebih rendah dari persentase yang dipasang di RKPD Tahun 2025 karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Persentase belanja tidak terduga tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 2,80 % dan terendah pada tahun 2019 dan tahun 2022 yaitu sebesar 0%.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b) Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
- c) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk pembangunan poliklinik RSUD yang akan dimulai pada Tahun 2026.

- b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- c. Pembayaran pokok hutang;
Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.
- d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pengeluaran Pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 3.15
Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung P-RKPD Tahun 2025

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
PEMBIAYAAN DAERAH	119.451.731.278	75.029.056.088	75.029.056.088
1. Penerimaan Pembiayaan	139.451.731.278	140.029.056.088	140.029.056.088
a. SiLPA	139.392.477.970	140.029.056.088	140.029.056.088
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	59.253.308	-	-
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
d. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000
a. Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000
b. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	119.451.731.278		

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025.

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 memproyeksikan besaran SiLPA sebesar Rp140.029.056.088,00 lebih besar dibandingkan besaran SiLPA pada APBD Tahun 2024 Rp. 99.533.115.228.

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 hanya terdiri dari 2 komponen yaitu Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk rencana pembangunan gedung poliklinik RSUD yang akan dimulai pada Tahun 2026.

Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Tabel 3.16
Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
PENDAPATAN DAERAH	1.946.935.976.641	2.017.622.369.083	2.017.622.369.083
1. Pendapatan Asli Daerah	376.195.806.669	379.485.855.146	358.678.943.856
a. Pajak Daerah	138.389.282.596	138.418.634.896	78.370.855.400
b. Retribusi Daerah	191.392.376.170	198.471.211.768	10.969.140.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.311.076.903	21.298.004.241	22.645.578.254
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	25.103.071.000	21.298.004.241	246.693.370.202
2. Pendapatan Transfer	1.570.740.169.972	1.638.136.513.937	1.599.994.310.000
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.489.425.840.035	1.556.822.184.000	1.497.343.172.000
1) Dana Perimbangan	1.250.105.264.035	1.308.921.284.000	1.249.442.272.000
a) Dana Transfer Umum-DBH	76.020.400.035	80.200.387.000	80.200.387.000
b) Dana Transfer Umum-DAU	820.750.031.000	845.234.730.000	826.265.502.000
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	71.223.524.000	81.787.260.000	40.629.956.000

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	282.111.309.000	301.698.907.000	302.346.427.000
2) Insentif Fiskal	-	9.002.280.000	9.002.280.000
3) Dana Otonomi Khusus	-	-	-
4) Dana Keistimewaan	-	-	-
5) Dana Desa	239.320.576.000	238.898.620.000	238.898.620.000
b. Transfer antar Daerah	81.314.329.937	81.314.329.937	102.651.138.000
1) Pendapatan Bagi Hasil	81.314.329.937	81.314.329.937	92.967.138.000
2) Bantuan Keuangan	-	-	9.684.000.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
a. Hibah	-	-	-
b. Dana Darurat	-	-	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.066.387.707.919	2.124.690.575.218	2.088.401.798.967
1. Belanja Operasi	1.540.590.671.300	1.595.817.398.614	1.596.160.003.998
a. Belanja Pegawai	889.802.050.241	977.338.529.883	975.022.717.529
b. Belanja Barang dan Jasa	499.861.283.074	489.112.324.831	510.084.202.569
c. Belanja Subsidi	-	-	-
e. Belanja Hibah	138.154.757.985	125.467.412.900	107.153.952.900
f. Belanja Bantuan Sosial	12.772.580.000	3.899.131.000	3.899.131.000
2. Belanja Modal	116.565.770.255	133.570.669.730	96.435.926.009
a. Belanja Tanah	-		-
b. Belanja Peralatan dan Mesin	39.016.761.469	63.172.098.728	61.484.984.891
c. Belanja Bangunan dan Gedung	46.317.439.145	14.970.671.400	7.165.509.400
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.854.869.250	50.360.754.000	23.813.278.000
e. Belanja modal aset tetap lainnya	3.279.550.391	4.971.395.602	3.899.153.718
a. Belanja modal aset lainnya	97.150.000	95.750.000	73.000.000
3. Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4. Belanja Transfer	406.731.266.364	394.302.506.874	394.805.868.960
a. Belanja Bagi Hasil	14.988.600.364	8.800.736.874	8.800.736.874

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
b. Belanja Bantuan Keuangan	391.742.666.000	385.501.770.000	386.005.132.086
PEMBIAYAAN DAERAH	159.451.731.278	205.029.056.088	205.029.056.088
1. Penerimaan Pembiayaan	139.451.731.278	140.029.056.088	140.029.056.088
a. SiLPA	139.392.477.970	140.029.056.088	140.029.056.088
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	59.253.308	-	-
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
d. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000
a. Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000
b. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	119.451.731.278	75.029.056.088	75.029.056.088

3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

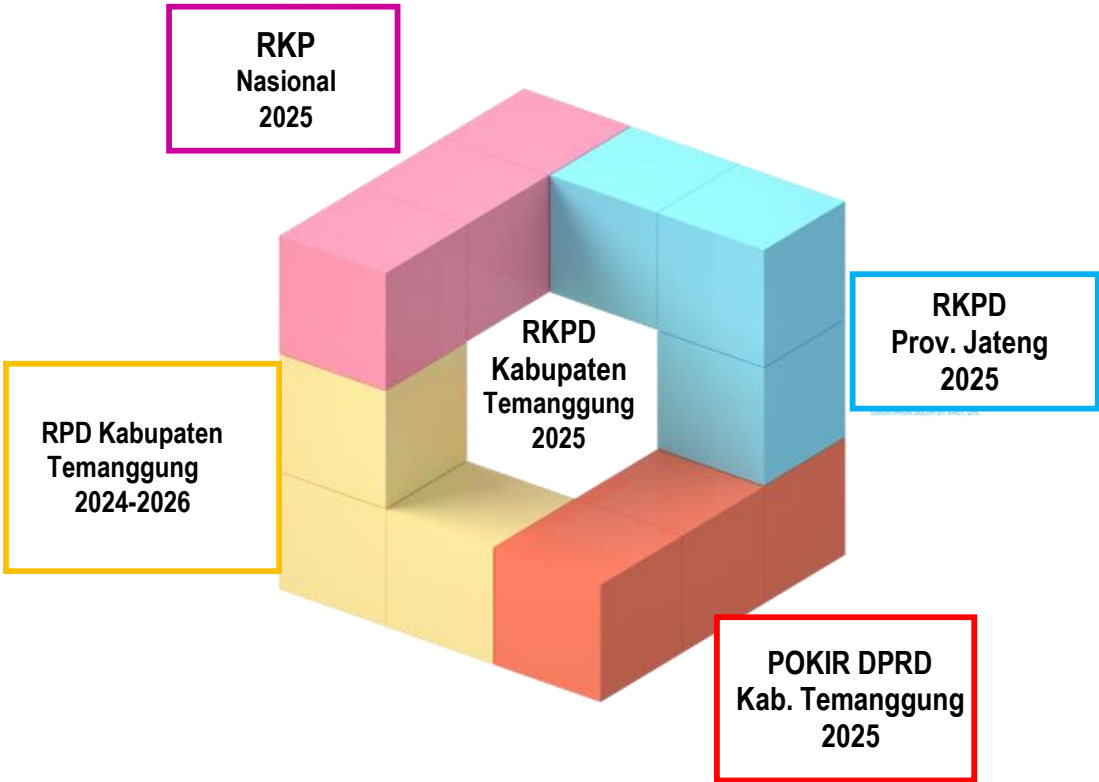
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 12 kali pada tahun 2012-2024.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan RPD 2024-2026 sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2025. Prioritas Daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026; dan
4. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Proses integrasi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 4.1
Komponen penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025

Sehubungan dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Temanggung periode 2025-2030, maka perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta program Asta Cita dalam arah kebijakan Perubahan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025. Selain arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta program Asta Cita, Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025 juga

menyesuaikan terhadap isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program makan bergizi gratis (MBG);
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan;
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari:

- A. Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2005-2025
- B. Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- C. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025;
- D. Kontribusi Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2025;
- E. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025;
- F. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDG's Kabupaten Temanggung;
- G. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- H. Program makan bergizi gratis (MBG);
- I. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung;
- J. Dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan;
- K. Pengendalian inflasi daerah;
- L. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- M. Dukungan swasembada pangan;
- N. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- O. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
- P. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

- Q. Fasilitas Perubahan Iklim
 - R. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - S. Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025.
 - T. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah.
- Secara detail diuraikan sebagai berikut.

4.1. Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2025-2045

4.1.1 Visi

Visi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah **“Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045”**.

Visi pembangunan daerah Tahun 2025-2045 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung yaitu:

1. Berbudaya dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada pembentukan sistem sosial budaya yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakat melalui pelestarian nilai budaya, penciptaan masyarakat dengan karakter dan perilaku budaya yang kuat, pelayanan publik yang baik dan cerdas dengan budaya profesional dan berintegritas, serta lingkungan dengan daya dukung memadai, berkelanjutan dan berketahanan.
2. Maju dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dengan nilai tambah dan rantai nilai lokal yang tinggi, adaptif terhadap perubahan dengan orientasi investasi terhadap pasar, ditunjang dengan teknologi, digital dan konektivitas yang optimal mendukung produktivitas wilayah.
3. Sejahtera dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, didukung oleh sumber daya manusia yang berkembang dan optimal.

4.1.2 Misi

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya

Membentuk masyarakat yang berbudaya merupakan hal mendasar dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi yang cukup pesat menjadi ancaman luntarnya nilai budaya masyarakat. Terwujudnya

Masyarakat yang berbudaya diharapkan akan meningkatkan pembangunan kebudayaan, kualitas keluarga dan kerukunan umat beragama. Dengan membangun dan memelihara masyarakat yang berbudaya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, kreatif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas membutuhkan komitmen yang kuat dari segenap unsur Pemerintah Daerah, serta dukungan dari masyarakat. Tuntutan agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritasnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan

Merupakan upaya menciptakan kondisi agar ekosistem dan sumber daya alam dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lingkungan yang berketahanan berarti memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi, seperti perubahan iklim, fluktuasi cuaca, atau gangguan alam lainnya. Lingkungan hidup yang berkelanjutan diwujudkan dengan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan, tidak meningkatkan ketimpangan sosial, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing

Peningkatan produktivitas ekonomi daerah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien melalui pengembangan industri, pertanian, pariwisata, dan sektor potensial lainnya dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Perekonomian daerah yang berdaya saing mencakup pengembangan keunggulan kompetitif di sektor-sektor kunci, peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

5. Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah

Pengembangan pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, pariwisata, dan pelayanan publik lainnya. Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur baik jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan.

6. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dilakukan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, kompetensi sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan ketimpangan ekonomi – sosial.

4.2. Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJPD 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tujuan 1 (Pertama) “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya”

Tujuan Pertama adalah “Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan, meningkatnya toleransi masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dengan indikator sasaran yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Toleransi, Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Gender.

2. Tujuan 2 (Kedua) “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Tujuan Kedua adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya perekonomian daerah dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dengan indikator sasaran yaitu Pendapatan perkapita, Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman.

3. Tujuan 3 (Ketiga) “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN”

Tujuan ketiga adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi, meningkatnya pengelolaan SDM aparatur, dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Merit System, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Masing-masing tujuan dan sasaran telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran yang secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan 2025	Bidang
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Angka	72,76	
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	Pendidikan
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	5,00	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	3,81	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	4,66	Perpustakaan dan Kebudayaan
		Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,51	Bankesbangpol
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,72	Kesehatan
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,77	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,28	
		Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	33,50	Koperasi dan UKM, Pangan Kelautan dan Perikanan
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	19,00	Pertanian, Pangan, Kelautan Perikanan, Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Penanaman modal Koperasi Usaha Kecil Menengah
			Angka Kemiskinan	%	9,00-8,70 %	Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,30-2,17 %	Tenaga kerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Perubahan 2025	Bidang
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	75,20	PUPR , Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	64,05	Lingkungan Hidup
			Indeks Rasa Aman	Angka	4,69	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi			Predikat	B/>60-70	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	66	Fungsi Penunjang Perencanaan , Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan , Penunjang Keuanagna , Bidang Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	Indeks Merit System	Angka	0,55	Fungsi Penunjang – Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Level	B/>60-70	Fungsi Lainnya -Sekretaris Daerah, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Fungsi Lainnya Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/76,61 – 88,30	Fungsi Lainnya -Sekretaris Daerah

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memperhatikan target indikator makro dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun penyelarasan target kinerja makro daerah pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target	
			RPD 2024-2026 ^{*)}	RPJMN 2020-2024 ^{**)}
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,28	5,3-5,6
2	Angka kemiskinan	%	9,00-8,70 %	7,0-8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,30-2,17 %	4,5-5,0
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,76	75,54

Sumber : ^{*)} RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

^{**)} Permen PPN Ka Bappenas Nomor 2 Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa target indikator pertumbuhan ekonomi, Angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 selaras dengan target pada RPJMN Tahun 2020-2024.

4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. Strategi untuk mewujudkan tujuan **terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya** adalah:
- 1) Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan;
 - 2) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - 3) Peningkatan literasi masyarakat;
 - 4) Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - 5) Penurunan konflik di masyarakat;
 - 6) Peningkatkan kesehatan keluarga;
 - 7) Peningkatkan kebijakan *reponsif gender*.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

- 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
- 2) Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- 3) Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum;
 - 4) Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan;
 - 5) Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
 - 6) Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan;
 - 7) Pembudayaan gemar membaca di masyarakat;
 - 8) Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya;
 - 9) Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebhinekaan kepada masyarakat;
 - 10) Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik;
 - 11) Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas;
 - 12) Peningkatan pelayanan kesehatan primer;
 - 13) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
 - 14) Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan;
 - 15) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan;
 - 16) Peningkatan sumber daya kesehatan;
 - 17) Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Strategi untuk mewujudkan tujuan **meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan** adalah:
- 1) Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan;
 - 2) Meningkatkan nilai usaha perdagangan;
 - 3) Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata;
 - 4) Meningkatkan nilai usaha industri;
 - 5) Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan;
 - 6) Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM;
 - 7) Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - 8) Meningkatkan produksi perikanan;
 - 9) Meningkatkan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - 10) Pertumbuhan penduduk yang terkendali;
- pertumbuhan penduduk yang terkendali diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap, karena akan mengurangi indeks ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif, sehingga akan menaikkan penghasilan dan investasi.

- 11) Pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 12) Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat;
- 13) Meningkatnya kompetensi angkatan kerja;
- 14) Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
- 15) Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya;
- 16) Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan, yaitu kawasan budidaya untuk industri, produksi, pertanian, dan pariwisata, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- 17) Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat, yang merupakan upaya untuk mewujudkan indeks rasa aman yang tinggi, sehingga sangat mendukung terwujudnya iklim investasi.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan;
- 2) Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan;
- 3) Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan;
- 4) Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan;
- 5) Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal;
- 6) Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan industri;
- 9) Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi;
- 10) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- 11) Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- 12) Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 13) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- 14) Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya;
- 15) Peningkatan sertifikasi keamanan pangan;
- 16) Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan;
- 17) Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan;

- 18) Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan;
- 19) Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
- 20) Peningkatkan pelayanan dan KIE Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga;
- 21) Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- 22) Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes;
- 23) Peningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- 24) Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
- 25) Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
- 26) Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya;
- 27) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup;
- 28) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 29) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- 30) Peningkatan pengelolaan sampah. Sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat, khususnya bank sampah memberikan dampak terhadap peningkatan penghasilan rumah tangga; dan
- 31) Peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

c. Strategi untuk **mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN** adalah:

- 1) Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 3) Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat;
- 4) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah;
- 5) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan keterbukaan informasi publik;
- 7) Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tertinggi;
- 8) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel;

- 9) Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 10) Meningkatnya pengelolaan kearsipan;
- 11) Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 12) Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual;
- 13) Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum;
- 14) Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi;
- 15) Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi;
- 16) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 17) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 18) Meningkatnya layanan perhubungan;
- 19) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;
- 2) Peningkatan peran serta *multihelix* dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat;
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- 5) Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi;
- 6) Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit;
- 7) Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah;
- 8) Optimalisasi integrasi layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 9) Peningkatan kapasitas pengelola layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 10) Peningkatan tata kelola arsip daerah;
- 11) Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Temanggung pada tahun 2025 yaitu **Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.**

4.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.3.1. Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPD tahun 2024-2026 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.” Adapun keselarasan antara tema Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 dengan tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2025 tercantum pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tema Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024
RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026,
RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Berdasarkan tabel tersebut, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. **Tema Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025** bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPD 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.”**

4.3.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

a. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 merupakan wujud implementasi langsung dari asta cita yang

merupakan misi dari presiden. Setiap prioritas nasional mencakup Langkah Langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 8 Prioritas Nasional (8 PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (PN 1);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2);
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3);
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4);
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5);
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (PN 6);
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN 7);
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8).

b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana berikut:

- 1) Prioritas Daerah 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan**

didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas,
dengan fokus pada:

- a) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah melalui:
 - i. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - ii. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - iii. Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - iv. Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - v. Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - vi. Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - vii. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
 - viii. Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai tools untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

- b) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur melalui:
- i. Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - ii. Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - iii. Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - iv. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi

- e) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran Meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Selain mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah,

2) Prioritas Daerah 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
- b) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan

keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
- d) Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
- e) Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
- f) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
- g) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
- h) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3) Prioritas Daerah 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:

- a) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST

Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif,

peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- a) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi.
- b) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 juga mengakomodir Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 program/kegiatan yang membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota antara lain:

1. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)
2. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
3. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK
4. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa
5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila

6. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta
7. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan
8. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru
9. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)
10. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat
11. Cek Kesehatan Gratis
12. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu
13. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
14. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak
15. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru
16. Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin
17. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
18. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis
19. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan
20. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana
21. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya
22. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan
23. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata
24. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM
25. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau

26. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa
27. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
28. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan
29. Peningkatan operasional kader Posyandu
30. Peningkatan kualitas hidup lansia
31. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
32. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa
33. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga
34. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan
35. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

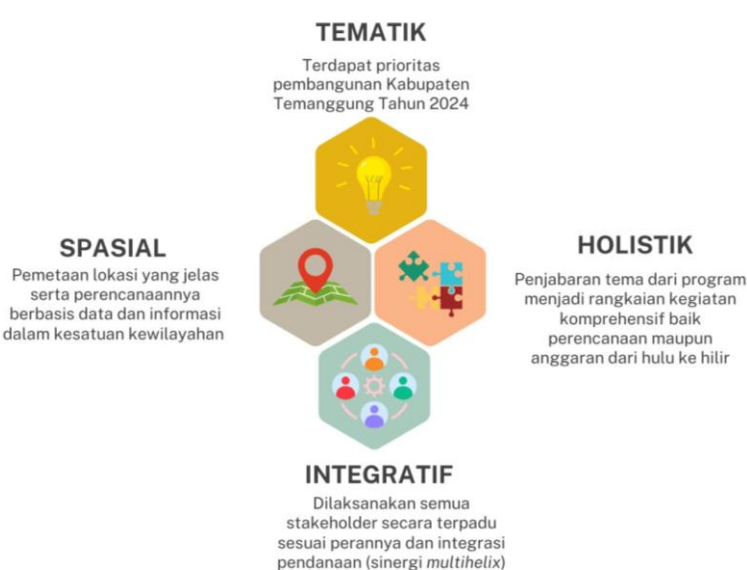
Kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2025 diarahkan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif dan Inovatif, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan esktrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
- 2) Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
- 3) Reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang

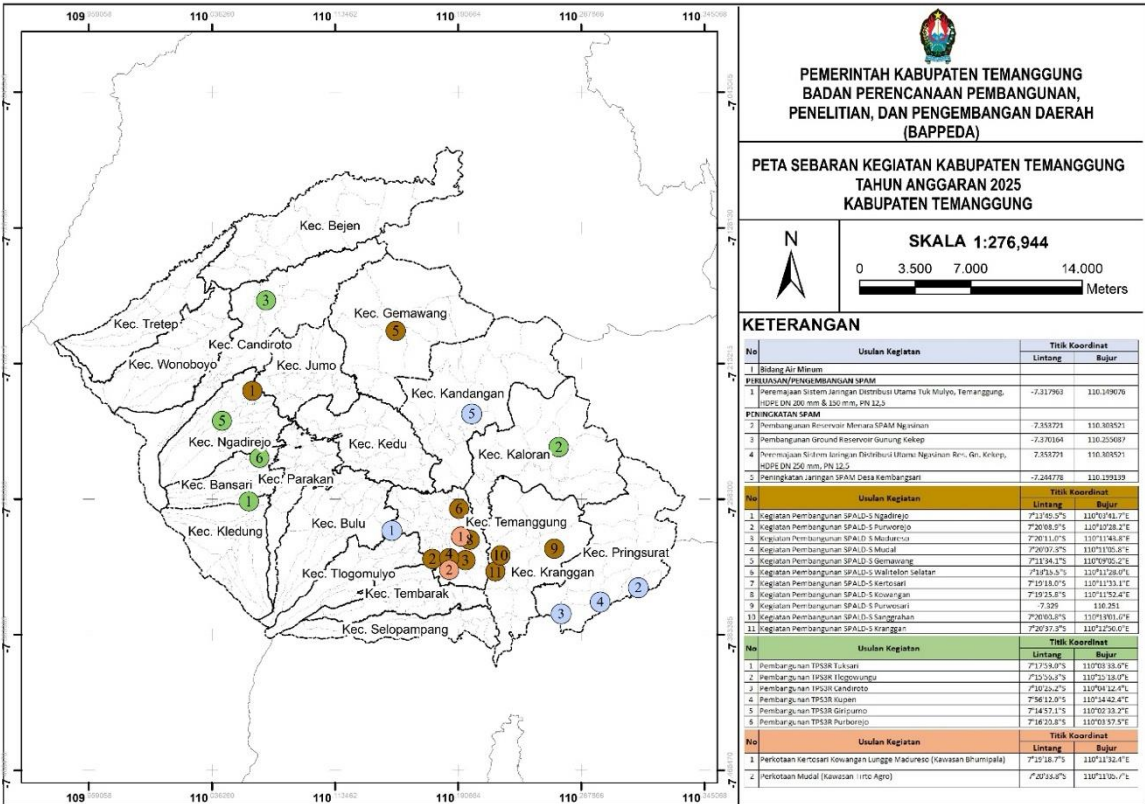
maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 juga disusun dengan menerapkan konsep *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun *stakeholder* non Perangkat Daerah termasuk dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 4.2
Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 4.3
Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan

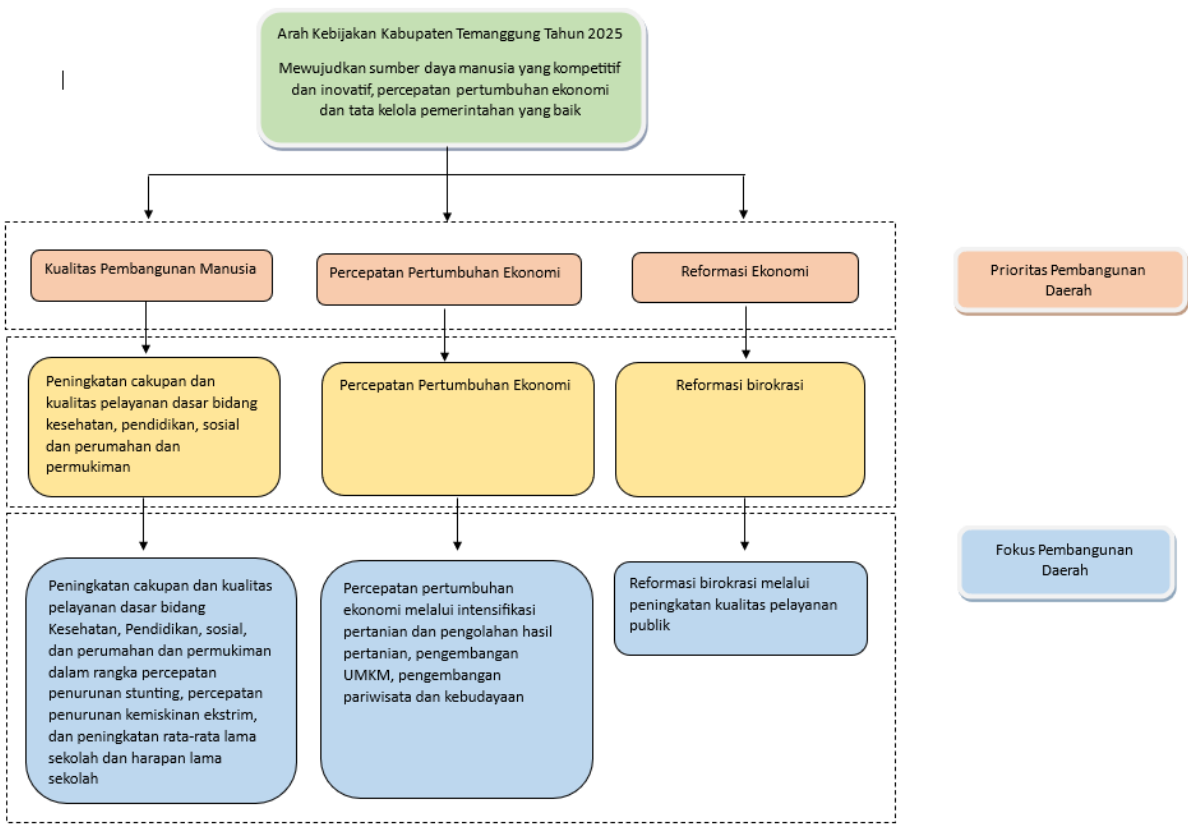
Oleh karena itu, pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel 4.4
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: RPD Kabupaten Temanggung, 2024

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPD Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan melalui gambar berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 4.4
Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan RPD

Prioritas pembangunan Kabupaten dalam RKPD Tahun 2025 terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan tahun 2025 pada RPD 2024-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 sejumlah 3 prioritas seluruhnya terkait dan mendukung pada penjabaran masing-masing dari arah kebijakan meningkatkan kualitas pembangunan manusia, percepatan ekonomi, dan pemantapan reformasi birokrasi.

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dapat dilihat pada gambar 4.4 bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah mendukung arah kebijakan RPD yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dimana arah kebijakan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas pembangunan daerah.

d. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan

arah kebijakan beserta program prioritas pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Pada tahun 2025, focus pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih diarahkan pada Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas melalui pemerataan peneyediaan infrastruktur dasar di Kawasan perkotaan dan pedesaan, pemerataan penyediaan infrastruktur pengembangan wilayah, peningkatan kualitas dan infrastruktur keselamatan jalan, penyelenggaraan perencanaan tata ruang, dan penyelenggaraan dan pemanfaatan dan penegndalian tata ruang. Program prioritas tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan prioritas yaitu :

1. Revitalisasi Kawasan Alun-Alun
2. Penyusunan DED Kawasan Pendopo
3. Revitalisasi Stadion Bumi Phala
4. Penyusunan DED City Walk Jalan Jendral Sudirman

Perumusan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 dengan mempertimbangkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPD, visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan, isu strategis Kabupaten Temanggung, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN

Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung 2025 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RKP Tahun 2025. Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Rasa Aman
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Rasa Aman
		Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
			IPKD
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
			Indeks Pembangunan Olahraga
			Presentase Kelompok Kesenian dan Budaya yang Produktif
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
5	Melanjutkan hilirisasi dan dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan	Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
	pemberantasan kemiskinan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Rasa Aman
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
		Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Indeks Merit Sistem
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per Kapita
			Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
			Indeks Pembangunan Olahraga
			Presentase Kelompok Kesenian dan Budaya yang Produktif
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Rasa Aman
Jumlah PN			8
Jumlah Indikator Sasaran			9
Keterkaitan			100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 sebesar 100%.

2. Keselarasan prioritas pembangunan dengan Asta Cita

Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung 2025 perlu memperhatikan keselarasan antara prioritas pembangunan dengan prioritas nasional. Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Persandingan antara Asta Cita dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Prioritas Nasional RKP	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Pemantapan reformasi birokrasi
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
		2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
5	Melanjutkan hilirisasi dan dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
		2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Pemantapan reformasi birokrasi
8	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
		2. Pemantapan reformasi birokrasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sejumlah 3 prioritas dengan 8 prioritas nasional (Asta Cita), dimana keseluruhan prioritas pembangunan daerah tersebut selaras dengan 8 prioritas nasional (Asta Cita) . Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional RPJMN sebesar 100%.

3. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025 secara nasional dituangkan ke dalam 8 Prioritas Nasional (Asta Cita) yang secara rinci dijabarkan di sasaran pada masing-masing PN. Keterkaitan sasaran indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7**Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025**

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembanguna Gender (IPG)
2	Indeks Hak Asasi Manusia	-	-
PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
1	Asia Power Index (Military Capability)	-	-
2	Asia Power Index (Diplomatic Influence)a)	-	-
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Rasa Aman
4	Global Cybersecurity Index	-	-
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	-	-
6	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-
8	Indeks Ketahanan Energi	-	-
9	Porsi EBT dalam Baruan energi Primer	-	-
10	Indeks Ketahanan Air Nasional	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
11	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
14	Posisi ekonomi Syariah Indonesia ditingkat global	-	-
15	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	-	-
16	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	-	-
17	Indeks Ekonomi Hijau	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
18	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif	-	-
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan	-	-
21	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
23	Indeks Kualitas udara	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
24	Indeks Kualitas air	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
25	Indeks kualitas lahan	-	-
26	Indeks kualitas air laut	-	-
PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
1	Stok infrastruktur terhadap PDB	-	-
2	Total Aset sector keuangan /PDB	-	-
3	Aset Perbankan/PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
5	Aset Asuransi/PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	-	-
7	Total Kredit/PDB (%)	-	-
8	Inklusi Keuangan (%)	-	-
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
11	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
12	Rasio Kewirausahaan (%)	-	-
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
14	Devisa Pariwisata (miliar USD)	-	-
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas			
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Meningkatnya Kualitas pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
2	Harapan lama sekolah (tahun)	Meningkatnya Kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
3	Rata-rata nilai PISA	-	-
4	Rata-rata nilai assessment tingkat nasional - Literasi - Numerasi	--	-
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Meningkatnya Kualitas pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)
6	Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun keatas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi	-	-
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	-	-
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
9	Angka Kelahiran Total	-	-
10	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
12	Indeks Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	-	-

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
15	Indeks perlindungan anak	-	-
16	Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
18	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	-	-
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	-	-
21	Peringkat Indeks Inovasi global	---	-
22	Tingkat Pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah
24	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan		
25	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	-	-
26	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	-	-

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
27	Peringkat pada Asian games	-	-
28	Peringkat pada Asian paragames	-	-
29	Peringkat pada seagames	-	-
30	Peringkat pada ASEAN paragames	-	-
31	Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang aktif berolahraga	-	-
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
2	Biaya Logistik (%PDB)	-	-
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			
1	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Angka Kemiskinan
2	Tingkat kemiskinan ekstrim	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Angka Kemiskinan
3	Proporsi Penduduk kelas Menengah		Gini Rasio

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Angka Kemiskinan
5	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
7	Persentase desa mandiri (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Angka Kemiskinan
8	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan Per Kapita
9	Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	-	-
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
1	Indeks Pembangunan Hukum	-	-
2	Indeks Persepsi Korupsi	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
3	Indeks Materi Hukum	-	-
4	Indeks Integritas Nasional	-	-
5	Indeks Integritas Partai Politik	-	-
6	Indeks Rreformasi Birokrasi Nasional	-	-
7	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
9	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar Negeri	-	-
10	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	-	-
11	Return Of Asset (ROA)	-	-
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	-	-
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	2. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
14	Tingkat Inflasi (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
PN 8 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	-	-
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Persentase kelompok kesenian dan budaya yang produktif
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	-	-

Sumber: *) Peraturan Menteri PPN/ BAPPENAS RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

**) RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026

BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Sebagaimana telah tercantum pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 bahwa sasaran pembangunan daerah berjumlah 9 sasaran. Sedangkan, sasaran tiap prioritas nasional tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Melihat kepada penjelasan keterkaitan sasaran pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan dari 9 sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung terkait dan sesuai dengan 45 sasaran prioritas nasional tahun 2025. Terdapat 22 sasaran prioritas nasional yang tidak dapat didukung oleh sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan secara kewilayahan Kabupaten Temanggung berada di wilayah Indonesia bagian barat. Secara persentase tingkat keselarasan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP Tahun 2025 sebesar 100% dikarenakan keseluruhan sasaran RKPD terkait dengan sasaran PN RKP Tahun 2025 meskipun terdapat 1 (satu) sasaran PN yang tidak terkait dikarenakan kewilayahan.

Keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas Kabupaten Temanggung 2025
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	Percepatan Pertumbuhan ekonomi
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	Percepatan Pertumbuhan ekonomi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	Percepatan Pertumbuhan ekonomi
6	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;	
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik
8	memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas Kabupaten Temanggung 2025
	dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang berjumlah 3 prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 4 prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

4. Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dilibatkan sejak awal, yaitu adanya penggalan masalah dan isu strategis dalam Murenbang RKPD di kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan menghadirkan masyarakat secara langsung. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan media informasi kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desiminasi inofrmasi dan aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui media tersebut. Bentuk media yang digunakan antara lain melalui media sosial, yang menampilkan link materi , link saran masukan dan lain sebagainya melauai aplikasi Lintang Asmara (<https://linktr.ee/lintangasmaraabappedatmg>) termasuk aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui link tersebut.

Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis,
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	- Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita - Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - Masih adanya fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang belum terakreditasi utama - Masih ditemukan rumah tidak sehat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif	1. Meningkatkan kesehatan keluarga	➤ Transformasi pelayanan kesehatan primer ➤ Transformasi pelayanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem pembiayaan kesehatan ➤ Transformasi sumber daya kesehatan
		- Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun - Masih rendahnya angka harapan lama sekolah - Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat - Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan pada penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah - Masih rendahnya angka lulusan pada pendidikan kesetaraan - Masih adanya Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) - Masih rendahnya APK PAUD 4-6 tahun - Masih rendahnya satuan PNF yang terakreditasi		2. Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan	➤ Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai ➤ Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ➤ Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum ➤ Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
		- Belum terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak - Masih adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak		3. Meningkatkan kebijakan responsif gender	➤ Peningkatan kapasitas PUD dalam perlindungan Perempuan dan anak

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemahaman terhadap indeks pembangunan keluarga masih lemah			
		- Belum optimalnya keberagaman tingkat konsumsi pangan - Belum optimalnya desa pelaksana program ketahanan pangan - Berkurangnya jumlah lumbung pangan yang aktif - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ika		4. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	➤ Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ➤ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan ➤ Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya ➤ Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
		- Penyediaan regulasi dan pendokumentasian sejarah lokal dan cagar budaya perlu ditingkatkan - Peningkatan layanan kunjungan perpustakaan masih perlu ditingkatkan baik secara offline maupun online - Belum optimalnya pemanfaatan bahan-bahan literasi berbasis buku fisik maupun yang berbasis teknologi informasi - Penyediaan koleksi nasional masih perlu ditambah		5. Peningkatan Pembangunan literasi Masyarakat 6. Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	➤ Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan ➤ Pembudayaan gemar membaca di masyarakat
2	Pembangunan pemuda yang berdaya saing tinggi	Masih adanya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka	1. Meningkatkan pemberdayaan PPKS	➤ Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama ➤ Optimalisasi fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung	percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif	2. Meningkatkan kesehatan keluarga	➤ Transformasi pelayanan kesehatan primer ➤ Transformasi pelayanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem pembiayaan kesehatan ➤ Transformasi sumber daya kesehatan
		- Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun - Masih rendahnya angka harapan lama sekolah - Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat - Masih terdapat SD dan SMP dengan ruang kelas dalam kondisi kurang baik - Masih terdapat TK, SD dan SMP yang belum terakreditasi minimal - Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan pada penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah - Masih rendahnya angka lulusan pada pendidikan kesetaraan - Masih adanya Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) - Masih rendahnya APK PAUD 4-6 tahun - Masih rendahnya satuan PNF yang terakreditasi - Sebaran SMP sederajat belum merata di semua wilayah		3. Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan	➤ Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai ➤ Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ➤ Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum ➤ Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		Peminatan dalam mengikuti program Sekolah Adiwiyata masih rendah			
		- Belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja - Belum maksimalnya peserta pelatihan menjadi wirausaha baru/wirausaha berkembang - Belum adanya pelatihan yang terintegrasi dengan magang - Masih rendahnya tenaga kerja formal		4. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	➤ Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan pelatihan
		Belum optimalnya pembangunan gender		5. Meningkatkan kebijakan responsif gender	➤ Peningkatan kapasitas PUG dalam perlindungan perempuan dan anak
		- Ketersediaan sarpras olahraga yang sesuai standar dan pelatih yang berkompeten masih terbatas dan belum memadai - Belum optimalnya prestasi atlet daerah di tingkat regional, nasional maupun internasional		6. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	➤ Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olah raga
		Kewirausahaan pemuda masih rendah		7. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	➤ Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi ➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		Penyediaan regulasi dan pendokumentasian sejarah lokal dan cagar budaya perlu ditingkatkan		8. Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal 9. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	➤ Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan ➤ Pembudayaan gemar membaca di masyarakat

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Peningkatan layanan kunjungan perpustakaan masih perlu ditingkatkan baik secara offline maupun online • Belum optimalnya pemanfaatan bahan-bahan literasi berbasis buku fisik maupun yang berbasis teknologi informasi • Penyediaan koleksi nasional masih perlu ditambah			➤ Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
3	Penanganan stunting	• Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung • Masih adanya kasus gizi buruk • Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita • Masih tingginya Angka Kematian Neonatal per 1,000 kelahiran hidup • Masih adanya balita gizi buruk • Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap jamban sehat • Masih adanya anak usia sekolah dasar yang belum mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar • Masih adanya fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang belum terakreditasi utama • Masih ditemukan rumah tidak sehat • Masih adanya stunting • Masih tingginya angka kelahiran • Masih adanya pasangan usia subur yang tidak ingin ber-KB • Belum optimalnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif	1. Meningkatkan kesehatan keluarga	➤ Transformasi pelayanan kesehatan primer ➤ Transformasi pelayanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan ➤ Transformasi sistem pembiayaan kesehatan ➤ Transformasi sumber daya kesehatan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung • Masih tingginya lahan potensial kritis • Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup • Masih adanya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung • Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan		2. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	➤ Rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah ➤ Pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan		3. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	➤ Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ➤ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan ➤ Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya ➤ Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
4	Percepatan Pemulihan Ekonomi	• Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi • Masih adanya kemiskinan di Kabupaten Temanggung	Percepatan pertumbuhan ekonomi	1. Pemberdayaan ekonomi keluarga	➤ Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		• Masih adanya infrastruktur dalam kondisi kurang baik seperti jembatan dan jaringan irigasi • Risiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun		2. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	➤ Rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah ➤ Pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Masih terdapat pengangguran - Belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja - Belum maksimalnya peserta pelatihan menjadi wirausaha baru/wirausaha berkembang - Masih terdapat perusahaan yang belum membayar upah sesuai UMK		3. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	➤ Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
		Belum maksimalnya penyelesaian dengan perjanjian bersama dalam hal mengatasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan		4. Meningkatkan nilai usaha industri	➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
		- Minat koperasi dalam mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pemasaran usaha masih rendah - Masih terdapat usaha mikro aktif yang belum diberikan fasilitas pengembangan usaha		5. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	➤ Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi ➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		- Promosi dan publikasi informasi tata cara berizin melalui OSS masih perlu diperluas di seluruh wilayah - Kegiatan promosi investasi kurang intensif - Promosi investasi dan kemudahan berusaha bagi investor perlu terus ditingkatkan		6. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan	➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
		- Produksi ikan mas menurun karena perubahan permintaan pasar dari ikan mas ke ikan nila sehingga kegiatan budidaya ikan mas bergeser ke ikan nila - Produksi ikan lele menurun karena harga pakan naik sedangkan harga jual rendah - Pembinaan nelayan perairan umum masih belum maksimal		7. Meningkatkan produksi perikanan	➤ Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan ➤ Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan ➤ Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		karena hanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pennebaran benih ikan di perairan umum Validitas data nelayan perairan umum belum jelas			
		Jumlah BUMDesa yang aktif belum maksimal		8. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat	➤ Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes
		- Banyak objek wisata tidak berkembang karena terbatasnya SDM pengelola dan kurangnya strategi dalam meningkatkan daya tarik - Para wisatawan yang datang lebih banyak mengunjungi tempat hiburan dan kuliner, sedangkan untuk kunjungan ke objek wisata yang bermuatan sejarah dan cagar budaya masih rendah - Rata-rata lama tinggal wisatawan di Temanggung hanya 1 hari karena mereka tidak memiliki urusan lain selain hanya sekadar singgah untuk melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya - Beberapa desa wisata macet di tengah jalan karena belum mampu konsisten dalam mengelola potensi desa - Beberapa desa wisata perlu ditingkatkan kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkungan agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung - Perlu adanya pendataan ulang untuk pelaku ekraf di Temanggung		9. Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata	➤ Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata ➤ Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi yang tiga kali lipat lebih mahal sehingga mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan petani - Perubahan cuaca/iklim yang tidak menentu berpengaruh pada meningkatnya serangan hama pada tanaman dan penyakit pada ternak sehingga produksi menurun. Hal ini juga berpengaruh pada jadwal tanam		10. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan	- Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan - Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan - Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan
		- Kenaikan harga pakan ternak juga mempengaruhi jumlah produksi - Pembinaan kepada industri penghasil cukai perlu ditindaklanjuti, tidak sekadar sosialisasi		11. Meningkatkan nilai usaha industri	Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
5	Penanganan kemiskinan	- Masih adanya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung - Masih adanya kemiskinan di Kabupaten Temanggung - Belum optimalnya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung - Belum seluruh desa berpredikat mandiri - Masih terdapat desa yang belum berklasifikasi swasembada dan/atau berstatus cepat berkembang	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama	- Meningkatnya pemberdayaan PPKS - Pemberdayaan ekonomi keluarga - Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat - Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	- Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama - Optimalisasi fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS - Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) - Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes - Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi - Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Pemberdayaan PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial masih perlu dioptimalkan - Fasilitasi bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar masih perlu ditingkatkan - Keberadaan Rumah Singgah yang belum beroperasi secara optimal karena keterbatasan anggaran - Penyediaan data penduduk miskin yang akurat masih perlu ditingkatkan - Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran belum optimal - Layanan perlindungan sosial bagi korban bencana belum optimal	sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	5. Meningkatnya pemberdayaan PPKS	- Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama - Optimalisasi fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS
		- Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Masih diperlukannya upaya peningkatan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman		6. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	- Pembangunan, peningkatan, dan Rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah - Pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah
		Belum optimalnya fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat KUBE		7. Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		- Masih terdapat pengangguran - Belum optimalnya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja		8. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
6	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	- Belum optimalnya penguatan reformasi birokrasi dalam menghadapi globalisasi, revolusi industri 4.0., revolusi society 5.0 dan disruption - Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal	Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 2. Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik 3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	- Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi - Optimalisasi integrasi layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik - Peningkatan kapasitas pengelola layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum optimalnya keterbukaan informasi publik • Belum maksimalnya keberadaan PPID badan publik yang aktif • Penyediaan akses internet publik belum optimal • Belum optimalnya penyediaan data makro daerah • Ketersediaan SDM yang dapat melakukan pentest (pengujian aplikasi) masih perlu ditingkatkan • Pengelolaan risiko dan keamanan sumber daya teknologi informasi di Kabupaten Temanggung perlu terus ditingkatkan • Implementasi Reformasi Birokrasi yang belum optimal • Akuntabilitas kinerja pemerintah masih perlu dioptimalkan			➤ Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah
		• Belum maksimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil • Masih terdapat warga yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP El), Akte Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA) • Tidak semua masyarakat menguasai teknologi dan memiliki smartphone untuk mengakses pelayanan yang bersifat virtual • Masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan yang saat ini mulai terintegrasi dan		4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	➤ Peningkatan kapasitas SDM dan Sarpras pelayanan publik ➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras administrasi kependudukan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		berguna untuk urusan lintas instansi			
		- Masih perlunya pembinaan dan pembenahan dalam pengelolaan arsip di setiap Perangkat Daerah - Masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan - Belum optimalnya digitalisasi arsip		6. Meningkatnya pengelolaan kearsipan	➤ Peningkatan tata kelola arsip daerah
		Pendokumentasian produk hukum secara digital belum berjalan optimal serta adanya keterlambatan dalam penyerahan produk hukum dari setiap Perangkat Daerah		7. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	➤ Peningkatan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
		- Kesiapan aplikasi e-purchasing masih perlu ditingkatkan - Keterlambatan PD dalam mengirimkan laporan keuangan bulanan - Cenderung lambat dalam merespons ketika terdapat kekurangan dokumen pengajuan SP2D, bahkan bersifat pasif dan kurang koordinasi dengan BPKPAD - Terbatasnya SDM di beberapa PD dalam menyelesaikan laporan keuangan di awal waktu yang ditentukan - Keterlambatan penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung - Belum banyaknya pendapatan yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah - Belum semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran sendiri untuk		8. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	➤ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan barang milik daerah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		mendaftarkan objeknya, sedangkan petugas dan sumber daya Bidang Pendapatan sangat terbatas • PBB-P2 masih bergantung pada peran aktif wajib pajak dan perangkat desa, sedangkan BPHTB masih bergantung pada peran PPAT/PPATS • Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah perlu dioptimalkan • Penggunaan e-procurement di setiap Perangkat Daerah belum berjalan optimal • Adanya perbedaan antara izin reklame yang diterbitkan oleh DPM dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang ter kirim secara cepat dan otomatis (terintegrasi) tentang pelanggaran izin dan pajak reklame			
		• Keterlambatan pengajuan dan pengesahan draft raperda berpengaruh pada pencapaian target kegiatan di tingkat kabupaten		9. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	➤ Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		• Masih adanya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Temanggung • Kematangan inovasi yang belum maksimal serta replikasi yang masih rendah • Hasil evaluasi pembangunan belum dimanfaatkan secara sepenuhnya sebagai bahan referensi penyusunan perencanaan		10. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	➤ Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan ➤ Peningkatan peran serta pentahelix dalam perencanaan pembangunan ➤ Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum adanya bentuk unit kerja kelitbangan sesuai aturan Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional • Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti di bidang penelitian dan pengembangan • Belum optimalnya penjangkaran dan pengembangan inovasi baik dari masyarakat atau pemerintah • Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan			
		• Anggaran yang tersedia berbeda-beda setiap tahunnya dan belum bisa memenuhi atau mengimbangi jumlah pejabat yang baru • Adanya keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) • Manajemen kepegawaian belum optimal sehingga masih ada PD yang kekurangan pegawai • Keterlambatan PD dalam menyampaikan usulan pegawai seperti pensiun, dll., mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian administrasi • Data PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional dari OPD lain belum/tidak dimasukkan • Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti diklat secara mandiri		11. Terwujudnya SDM apratur yang berkinerja tertinggi	➤ Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit
		• Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP		12. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi SPIP kepada Perangkat Daerah • APIP belum dapat mengevaluasi pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia • Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang			
		• Masih adanya SPPT yang bermasalah, keterlambatan penyampaian SPPT karena Wajib Pajak berada di luar kota atau Wajib Pajak tidak ditemukan, dan keterlambatan pembayaran karena menunggu panen raya		13. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik
		• Kegiatan pemberian pemahaman ideologi, politik, wawasan kebangsaan, dan pencegahan narkoba ke sekolah-sekolah belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Justru sekolah-sekolah di kota malah mendapatkan pembinaan lebih dari satu kali		14. Penurunan konflik di masyarakat	➤ Peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebhinekaan kepada masyarakat ➤ Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik ➤ Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas
7	Peningkatan manajemen kebencanaan	• Masih adanya sampah yang belum tertangani	1. Peningkatan cakupan dan kualitas	1. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya	➤ Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Masih tingginya lahan potensial kritis - Risiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun - Pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan) masih perlu ditingkatkan - Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) masih perlu diingkatkan - Masih diperlukan penyadaran dan peningkatan kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat - Masih diperlukan peningkatan kemampuan dan kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD - Masih kurangnya jumlah Early Warning System yang dipasang di daerah rawan bencana - Dokumen perencanaan kebencanaan belum tersedia - Layanan perlindungan sosial bagi korban bencana belum optimal - Masih terdapat ketidaksesuaian peruntukan tanah - Belum optimalnya indeks kualitas lingkungan hidup - Belum memiliki Tim Uji Kelayakan pada persetujuan UKL, UPL dan AMDAL	pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 3. Reformasi birokrasi		➤ Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup ➤ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ➤ Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup ➤ Peningkatan pengelolaan sampah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan belum maksimal • Masih adanya lahan kritis • Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup • Penanganan persampahan yang belum optimal • Pelaksanaan pelayanan persampahan yang belum optimal			
		• Belum optimalnya sinergi pemangku kepentingan di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan • Persebaran jumlah Linmas yang merata masih perlu ditingkatkan		2. Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	➤ Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

5. Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025, DPRD Kabupaten Temanggung memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung.

DPRD memberikan penekanan khususnya pada isu strategis percepatan penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai target Presiden 0% pada tahun 2025 serta pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan dukungan terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (hortikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut. Prioritas pembangunan daerah memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Kabupaten Temanggung. Keterkaitan prioritas pembangunan

Kabupaten Temanggung yang memuat janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUNAN DPRD
1.	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 3. Percepatan Penanganan Stunting 4. Pengembangan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal (Holtikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak Dan Lain-Lain) 5. Peningkatan Jejaring Pemasaran
2.	Pembangunan pemuda yang berdaya saing tinggi	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	
3.	Penanganan stunting	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	
4.	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi	
5.	Penanganan kemiskinan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	
6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Reformasi birokrasi	
7.	Peningkatan manajemen kebencanaan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 3. Reformasi birokrasi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi **program prioritas** sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Peningkatan Kerjasama Desa
9. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Perlindungan Perempuan
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Pengelolaan Persampahan
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Program Informasi dan Komunikasi Publik
15. Program Aplikasi Informatika
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19. Program Pengembangan Kebudayaan
20. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
21. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
22. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
23. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
24. Program Kepegawaian Daerah
25. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Program Penyelenggaraan Pengawasan
27. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
28. Program Peningkatan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
29. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan

sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah mempunyai indikator sasaran dan penanggungjawab (OPD) untuk masing-masing program prioritas, dimana keterkaitannya dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4.11
Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,95	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif	Program Pengelolaan Pendidikan	- Persentase APM PAUD (5-6 tahun) - Persentase APK PAUD (0-6 tahun) - Persentase APK PAUD (4-6 tahun) - Persentase APK PAUD (5-6 tahun) - Persentase Pendidik PAUD - Berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi - Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik - Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak - Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD - Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik - Persentase APM SD Sederajat - Persentase APK SD Sederajat - Angka Putus Sekolah SD Sederajat - Rasio Siswa/Guru SD - Rasio Siswa/Rombel SD - persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 - persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak - persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat - Rasio Jumlah Pengawas SD - Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik - Persentase APM SMP Sederajat - Persentase APK SMP Sederajat	Dindikpora	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,65					

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					• Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat • Angka Putus Sekolah SMP Sederajat • Rasio Siswa/Guru SMP • Rasio Siswa/Rombel SMP • Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 • Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik • Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak • Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat • Rasio Jumlah Pengawas SMP • Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik • Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu • Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 • Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat • Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha • Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)		
Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	4,23	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dindikpora	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
	Indeks Pembangunan Olahraga	3,81					

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,66		Program Pengembangan Kebudayaan	- Persentase kelompok Budaya yang Teregister - Persentase kelompok kesenian yang produktif - Persentase pelestarian Sejarah Lokal - Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Dinbudpar	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur (PN 8)
Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	4,51	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kesbangpol	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1) Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur (PN 8)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,72	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB) - Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar - Prevalensi anemia pada ibu hamil - Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Dinkes	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1) Memperkuat pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					• Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan • Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan • persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani • Angka Kematian Neonatal • Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar • Angka Kematian Balita • Prevalensi ballita gizi buruk • Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) • Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif • Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar • Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar • Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar <i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah Dengue)		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					- Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan - Persentase rumah sehat - Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan		
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan Perempuan	- Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	DPPPAPPKB	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4)
				Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak		
Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	33,50	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Produktivitas padi - Produktivitas jagung - Produktivitas bawang putih - Produktivitas bawang merah - Produktivitas cabai rawit - Produktivitas cabai besar - Produktivitas tembakau - Produktivitas kopi robusta - Produktivitas kopi arabika - Produktivitas ternak sapi - Produktivitas ternak domba - Produktivitas ternak kambing - Produktivitas ternak ayam ras pedaging - Produktivitas ternak ayam petelur - Persentase kelahiran pedet	DKPPP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3)
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	- Persentase IKM Industri berbasis pada komoditas unggulan - Persentase pembinaan IKM Tembakau Lembutan	Disnaker	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	- Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan - Lama tinggal wisatawan - Persentase peningkatan desa wisata - Persentase peningkatan pelaku Ekraf	Dinbudpar	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3)
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan - Persentase perusahaan yang bermitra	DPMPTSP	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	Dinkopdag	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							nilai tambah di dalam negeri (PN 5)
	Angka Kemiskinan	9,00-8,70 %	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial - Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota - Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota - Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan - Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Dinsos	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	19	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	Dinpermades	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,30-2,17 %	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	Dinperinaker	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,20	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum - Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	DPUPR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
				Program Penyelenggaraan Jalan	- persentase jalan Kondisi Mantap - persentase jembatan dalam kondisi baik - persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	DPUPR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Membangun dari desa dan dari

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
				Program Kawasan Permukiman	• persentase rumah layak huni • persentase kawasan kumuh perkotaan • persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) • persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	DPUPR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,05	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Persampahan	• Persentase sampah yang tertangani • Cakupan layanan persampahan	DPRKPLH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	Indeks Rasa Aman	4,69	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	Satpol PP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	66	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu - Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	BAPPEDA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD - Persentase dokumen penganggaran tepat waktu - Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu - Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	BPKPAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif - Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	Dinkominfo	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo		judi, dan penyelundupan (PN 7)
Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<i>Indeks Merit System</i>	0,55	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	- Cakupan Pengembangan SDM Aparatur - Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	BKPSDM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B/>6 0-70	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi - Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara - Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa - Persentase penanganan aduan masyarakat - Persentase tindak lanjut hasil temuan	Inspektorat	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Aplikasi Informatika	- Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik - Persentase layanan publik secara elektronik	Dinkominfo	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B/>6 0-70		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan - Persentase pelunasan pembayaran PBB tepat waktu	Kecamatan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan - Persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital	Dindukcapil	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator kinerja program prioritas terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas sebesar 100%.

Sebagaimana tabel di atas pula, dapat terlihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil. Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah sebesar 100%.

4.4. Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

Tahun 2025 menjadi landasan dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD 2025 dengan RPJPD 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Peningkatan peserta didik yang mencapai WAJAR 13 Tahun;
2. Penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD;
5. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan;
6. Perluasan pendidikan formal maupun non formal yang inklusif, adaptif dan humanis;
7. Peningkatan revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya;
8. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal;
9. Meningkatnya masyarakat yang berbudaya;
10. Kebebasan berpendapat untuk masyarakat.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. Pengendalian pemanfaatan ruang;

3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang tata ruang;
 4. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;
 5. Peningkatan kualitas dan perluasan jaringan infrastruktur transportasi.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Penguatan kemanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana;
 2. Peningkatan kapasitas tenaga kemanan dan pemadam kebakaran.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;
 2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 3. Pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak melampaui daya dukung dan daya ruang.;
 4. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau seluruh wilayah;
 5. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R;
 6. Penerapan *green economy*;
 7. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Peningkatan akses terhadap listrik terutama pada masyarakat yang kurang mampu;
 2. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu;
 3. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian;
 2. Peningkatan kebijakan kemandirian pangan;
 3. Peningkatan pengelolaan pertanian yang modern yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM pertanian;
 4. Penguatan kebijakan yang mendukung keterjangkauan pangan masyarakat ;
 5. Penguatan kebijakan untuk mendukung pertanian yang alami dan meminimalisir pencemaran lingkungan;
 6. Penurunan ahli fungsi lahan pertanian dan mendukung.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar layanan perdesaan;
 2. Peningkatan konektivitas antar kawasan;
 3. Pengembangan dan penguatan desa mandiri melalui ekonomi sektor unggulan;
 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 5. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
1. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM;
 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM;
 3. Penguatan kebijakan yang mendukung kelembagaan koperasi;
 4. Peningkatan produktivitas BUMD.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata;
 2. Peningkatan sarana parasarana yang layak untuk mendukung pariwisata;
 3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;
 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi;
 5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Industri
1. Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan logistik pendukung industri;
 2. pengembangan industri dengan bahan baku lokal;
 3. Penguatan kebijakan untuk memudahkan iklim investasi dan industri ;
 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan *green economy*.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Optimalisasi digital dalam tata kelola pemerintahan;
 2. Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan tepat;
 3. Penyederhanaan regulasi yang mendukung pelayanan yang optimum;
 4. Penguatan integritas SDM pelayanan publik.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum
1. Penguatan kebijakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 2. Penguatan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien;

3. Peningkatan kerjasama dan kolabaris antar daerah ataupun instansi baik secara vertikal maupun horizontal.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Penunjang
1. Penguatan integritas untuk ASN;
 2. Fasilitasi peningkatan kompetensi ASN;
 3. Penguatan manajemen ASN;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
1. Penguatan pengawasan yang independen dan berintegritas.
 2. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan dan fungsi instansi Pemerintah.

Tabel 4.12 Keterkaitan arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025		
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Bidang
Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat	1. Penguatan kemandirian dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana; 2. Peningkatan kapasitas tenaga kemandirian dan pemadam kebakaran	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata; 2. Peningkatan sarana prasarana yang layak untuk mendukung pariwisata; 3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata; 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi; 5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan	Pariwisata
	1. Peningkatan revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya; 2. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal; 3. Meningkatnya masyarakat yang berbudaya; 4. Kebebasan berpendapat untuk masyarakat.	Pendidikan
Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik	1. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD 2. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan	Pendidikan
	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1. Penguatan kebijakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat; 2. Penguatan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien; 3. Peningkatan kerjasama dan kolabaris antar daerah ataupun instansi baik secara vertikal maupun horizontal	Pemerintahan Umum
	1. Penguatan integritas untuk ASN; 2. Fasilitasi peningkatan kompetensi ASN; 3. Penguatan manajemen ASN	Penunjang
	1. Penguatan pengawasan yang independen dan berintegritas.	Pengawasan

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Bidang
	2. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan dan fungsi instansi Pemerintah.	
Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim	1. Peningkatan sarana dan prasarana bidang tata ruang;	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;	
	1. Penguatan kemanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana;	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	2. Peningkatan kapasitas tenaga kemanan dan pemadam kebakaran	
	1. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;	Lingkungan Hidup
	2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;	
	3. Pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak melampaui daya dukung dan daya ruang.;	
	4. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau seluruh wilayah;	
	5. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R;	
	6. Penerapan green economy;	
	7. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
	1. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Energi dan Sumber daya air mineral
Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi	1. Penguatan kebijakan untuk mendukung pertanian yang alami dan meminimalisir pencemaran lingkungan;	Pertanian
	2. Penurunan ahli fungsi lahan pertanian dan mendukung	
	1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian;	Pertanian
	2. Peningkatan kebijakan kemandirian pangan;	
	3. Peningkatan pengelolaan pertanian yang modern yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM pertanian;	
	4. Penguatan kebijakan yang mendukung keterjangkauan pangan masyarakat	
	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata;	Pariwisata
	2. Peningkatan sarana parasarana yang layak untuk mendukung pariwisata;	
	3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;	
	4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi;	
	5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan	
	1. Pengembangan dan penguatan desa mandiri melalui ekonomi sektor unggulan	Pemberdayaan masyarakat dan desa
	1. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM;	Koperasi dan UMKM
	2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM;	
	3. Penguatan kebijakan yang mendukung kelembagaan koperasi;	
	4. Peningkatan produktivitas BUMD	
	1. Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan logistik pendukung industri;	Industri
	2. pengembangan industri dengan bahan baku lokal;	

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Bidang
	3. Penguatan kebijakan untuk memudahkan iklim investasi dan industri ; 4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan green economy	
Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Peningkatan kualitas dan perluasan jaringan infrastruktur transportasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar layanan perdesaan; 2. Peningkatan konektivitas antar kawasan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1. Optimalisasi digital dalam tata kelola pemerintahan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu	Energi dan Sumberdaya Mineral
Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	1. Peningkatan peserta didik yang mencapai WAJAR 13 Tahun; 2. Penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS); 3. Penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 4. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD; 5. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan; 6. Perluasan pendidikan formal maupun non formal yang inklusif, adaptif dan humanis	Pendidikan
	1. Peningkatan akses terhadap listrik terutama pada masyarakat yang kurang mampu; 2. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu	Energi dan Sumberdaya Mineral

4.5. Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Kabupaten Temanggung masuk dalam percepatan Kawasan Gelangmanggung. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut melalui:

1. Peningkatan sektor ketenagakerjaan, di antaranya melalui:
 - a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian) serta pariwisata;

- b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi
 - c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK
 - d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- 2. Pemantapan ketahanan pangan, di antaranya melalui: pembangunan jaringan irigasi usaha tani, Pengembangan *Food Estate* dimana aspek hilirisasi yang sudah dilakukan yaitu peningkatan kapasitas jalan Bansari, pelatihan penyimpanan komoditas, dan pengawalan *offtaker*.
- 3. Peningkatan daya saing pariwisata, di antaranya melalui: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi
- 4. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, di antaranya melalui:
 - a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - d. Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM
- 5. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, di antaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan.

4.6. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025

Program pembangunan infrastruktur pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 difokuskan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta perhubungan, tetapi juga bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di DPUPR bertujuan meningkatkan kualitas jalan sehingga memperlancar arus transportasi yang akan berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur

diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di DPRKPLH bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengelolaan air limbah domestik dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam pengelolaan air limbah domestik, upaya dilakukan untuk membangun sistem sanitasi yang efisien guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat. Sementara itu, perbaikan RTLH bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan melalui penyediaan penerangan jalan dan sarana prasarana pendukung jalan. Penerangan jalan yang memadai bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan sarpras pendukung jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, halte, dan trotoar, ditujukan untuk memperlancar arus transportasi, memfasilitasi mobilitas pejalan kaki, serta mendukung keseluruhan sistem transportasi agar semakin tertata dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui puskesmas dan diarahkan mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pencegahan stunting.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, pertanian, dan perikanan dan diarahkan mendukung prioritas peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pemulihan ekonomi.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dindikpora bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.

4.7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17

tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4.13
Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah
di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Pemantapan reformasi birokrasi
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota	

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut	
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota	
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan	Meningkatnya toleransi masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
	kelembagaan yang kokoh		pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	- Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi. - Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur - Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.8. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Mendukung Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Dan Kesehatan

Pemerintah telah menetapkan Penguatan sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan menjadi isu prioritas nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Penguatan sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Sasaran dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang mendukung Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
2	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	DINDIKPORA
3	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINAS KESEHATAN
6	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPAPPKB
7	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
8	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
9	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
10	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKEK

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.9. Sasaran dan Program Daerah dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah telah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu prioritas nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Sasaran dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang mendukung
Makan Bergizi Gratis (MBG)

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES

4.10.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional dengan target 14% pada tahun 2024 terlebih lagi capaian stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 di angka 25,1% yang tentunya hal tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.16
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung
Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
5	Meningkatnya penyediaan sarana	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan	Program Pengelolaan dan Pengembangan	DPUPR

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
	prasarana wilayah yang berkualitas	dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Sistem Penyediaan Air Minum	
6	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPPAPPKB
7	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
8	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
9	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
10	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana	DKPPP
11	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam mendukung aksi percepatan penurunan dan penanganan stunting, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting serta Satgas Percepatan Penurunan Stunting (satgas dibentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Desa, PKK, Camat, Puskesmas, Babinsa, Babinkamtibmas, pendamping KB, pendamping desa, petugas PLKB, PLD, pendamping PKH, pendamping TKSK, relawan masyarakat dan organisasi masyarakat baik dari Aisyiyah, Muslimat, Ansor, Banser, Pemuda Muhammadiyah, dan GPK) dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sejak tahun 2023 yaitu intervensi spesifik percepatan penurunan stunting

melalui sinergitas perangkat daerah diantaranya skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, PMT bagi ibu hamil KEK (berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang), pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta serta tata laksana balita weight faltering dan pemberian PMT gizi kurang, balita gizi buruk dan rujukan balita stunting.

4.11. Dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0%, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan 3 strategi yaitu:

- 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan seperti Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), Bantuan Sosial Khusus (BLT DD, BST, *top-up* bansos regular), PBI JKN, Bantuan Siswa Miskin, Iuran Jaminan Sosial, Kartu Jateng Sejahtera, RTLH dan jamban, instalasi dan subsidi listrik, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat seperti program padat karya, program vokasi dan Pelatihan, peningkatan akses aset produktif, akses modal dan akses penggunaan lahan, peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pemberian modal usaha pada UEP dan KUBE.
- 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara *bottom up* untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada.

Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim, hal tersebut ditunjukkan dengan arah kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang juga sebagai penerapan dari 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penanganan Bencana	BPBD
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
4.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
5.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
7.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
8.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan UMKM	DINKOPDAG
9.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKEK
10.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKEK
11.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
12.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Penataan Desa	DINPERMADES
13.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DINPERMADES
14.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
15.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
16.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
17.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
18.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
19.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
20.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
21.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
22.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
23.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
24.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
25.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
26.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (SS)	DPPPAPPKB
27.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINPERMADES
28.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
29.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
30.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga amal zakat, CSR dan TJSLP dalam membantu intervensi percepatan penghapusan kemiskinan.

4.12. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pengendalian Inflasi di Daerah

Pemerintah telah menetapkan Pengendalian Inflasi di Daerah menjadi isu prioritas nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.18
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PD PENGAMPU
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	DINKPDAG
5	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Sarana DIstribusi Perdagangan	DINKOPDAG
6	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian

Sumber : Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2025

4.13. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pemerintah telah menetapkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah menjadi isu prioritas nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukan dengan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PD PENGAMPU
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINPERINAKER
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DINPERINAKER
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengelolaan system informasi industry nasional	DINPERINAKER
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program elatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
5	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
6	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DINPERINAKER

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PD PENGAMPU
7	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER
8	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian
9	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengawasan dan Pemreiksaan Koperasi	DINKOPDAG
10	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DINKOPDAG
11	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
12	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
13	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan UMKM	DINKOPDAG
14	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	DINKOPDAG
15	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
16	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor	DINKOPDAG
17	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	DINKOPDAG
18	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program satandarisasi dan perlindungan konsumen	DINKOPDAG
19	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Programa pengembangan iklim penanaman modal	DPMPSTP
20	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program promosi penanaman modal	DPMPSTP
21	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pelayanan penanaman modal	DPMPSTP
22	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Prorma pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPSTP
23	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengembangan kebudayaan	DINBUDPAR
24	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	DINBUDPAR
25	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program peningkatan pemasaran pariwisata	DINBUDPAR
26	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual	DINBUDPAR
27	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif	DINBUDPAR
28	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
29	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PD PENGAMPU
30	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
31	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program penyuluhan pertanian	DKPPP
32	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengelolaan perikanan tangkap	DKPPP
33	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengelolaan perikanan budidaya	DKPPP
24	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	DKPPP

Sumber : Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2025

4.14. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Dukungan Swasembada Pangan Kabupaten Temanggung

Pemerintah telah menetapkan Dukungan Swasembada Pangan menjadi isu prioritas nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Dukungan Swasembada Pangan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.20
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Dukungan Swasembada pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PD PENGAMPU
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPPP
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengelolaan perikanan tangkap	DKPPP
5	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengelolaan perikanan budidaya	DKPPP
6	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	DKPPP
7	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	DKPPP
8	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
9	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
10	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	DKPPP
11	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	DKPPP
12	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program penyuluhan pertanian	DKPPP

Sumber :Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2025

4.15. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengembangan Industri Kerajinan, Dan Memfasilitasi Dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Temanggung

Pemerintah telah menetapkan Pengembangan Industri Kerajinan, dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mirko, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi isu prioritas nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukan dengan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Pengembangan Industri Kerajinan, dan memfasilitasi dalam

mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan usaha mikor, kecil, dan menengah (UMKM) Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.21
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengembangan Industri Kerajinan, dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PD PENGAMPU
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINPERINAKER
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DINPERINAKER
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengelolaan system informasi industry nasional	DINPERINAKER
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
5	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan UMKM	DINKOPDAG

Sumber: Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2025

4.16. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4.22
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PD PENGAMPU
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,	Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPAPPPKB
				Program Pengarusutamaan Gender dan	DPPAPPPKB

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

	perempuan dan anak	pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman		Pemberdayaan Perempuan	
				Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
				Program Pengendalian Penduduk	DPPAPPPKB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPAPPPKB
				Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, Evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	DINPERMADES
				Program Pengembanagan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa dan Perberdayaan Kawasan Perdesaan	DINPERMADES
				Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINKOPDAG
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINKOPDAG
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	DINKOPDAG
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
				Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
				Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
				Program Pengembangan	BKPSDM

				Sumber Daya Manusia	
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
				Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM
				Program Penanganan Fakir Miskin	DINSOS
				Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
				Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO
				Program pemeliharaan Kentetraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
				Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
				Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
				Pogram Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
				Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	DPRKPLH

Sumber: Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2025

4.17. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Hal tersebut sangat berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, RPD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024-2026 menempatkan pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim pada tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan pada sasaran meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

Sasaran daerah dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim yaitu meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas. Hal tersebut terlihat dari indikator sasaran Indeks Rasa Aman dimana sasaran tersebut didukung dengan indikator sasaran Perangkat Daerah berupa Indeks Resiko Bencana, Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota, dan Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten.

Sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.23
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan
Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	STRATEGI	PROGRAM
1.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	a. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman b. Pemantapan reformasi birokrasi	a. Meningkatkan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah b. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya c. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan c. Program Penanganan Kerawanan Pangan d. Program Pengawasan Keamanan Pangan e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian h. Program Penyuluhan Pertanian i. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner j. Program Perencanaan Lingkungan Hidup k. Program Pengendalian Pencemaran l. Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.18. Fasilitasi Perubahan Iklim

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung:

1. Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional, atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang dilaporkan pada *platform* AKSARA dari periode 2010-2023 menunjukkan terdapat 4 total kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 103.314,79 Ton CO₂eq.

Kabupaten Temanggung turut berkontribusi dalam upaya pencapaian Pembangunan Rendah Karbon dengan melakukan pelaporan secara rutin pada sistem informasi AKSARA. Hingga tahun 2023 tercatat 11 total kegiatan aksi PRK Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Temanggung dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 111.751,61 Ton CO₂eq. Adapun aksi Pembangunan Rendah Karbon yang dilaksanakan oleh Kabupaten Temanggung tersebar pada 2 (dua) sektor utama yakni pada sektor lahan (pertanian) dengan kontribusi penurunan sebesar 103.355,04 Ton CO₂eq dan pada sektor pengelolaan limbah (persampahan) dengan kontribusi penurunan sebesar 8.396,57 Ton CO₂eq. Berdasarkan capaian tersebut, Kabupaten Temanggung telah memberikan kontribusi sebesar 0,88% pada capaian provinsi dan akan terus bertambah pada tahun berikutnya.

2. Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan

Salah satu upaya Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi lahan kritis yakni dengan melakukan gerakan konservasi penanaman pohon di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau. Berdasarkan hasil inventarisasi lahan kritis yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2017 dapat diketahui bahwa $\pm 12\%$ lahan di Kabupaten Temanggung termasuk dalam kriteria lahan kritis dan lahan sangat kritis. Kondisi lahan kritis dikhawatirkan akan memperngaruhi kesuburan tanah dan produktivitas lahan yang akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, akan muncul ancaman degradasi lahan dan ancaman terhadap ketersediaan air, baik air permukaan maupun mata air. Banyak mata air yang mulai mati dan berkurang debitnya sehingga banyak permintaan bantuan air bersih ke desa-desa dan terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan tersebut, mulai tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500 ribu pohon dan dari non pemerintah 220 ribu pohon. Upaya tersebut mampu mengupayakan penanganan lahan kritis seluas 12,89 Ha dari total luas lahan kritis 7.566,5 Ha. Pada tahun 2022 upaya penanganan lahan kritis dilaksanakan pada lokasi bekas galian c di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung seluas 8,5 Ha dan kegiatan konservasi dengan metode vegetatif melalui Gerakan Konservasi Tanah dan Air berkelanjutan di 10 Kecamatan di lereng gunung Sumbing, Sindoro dan Prau dengan penanganan lahan kritis seluas 180,27 Ha. Adapun pada tahun 2023, upaya penanganan lahan kritis dilakukan dengan kegiatan pemulihan lahan seluas 5.5 Ha melalui pembentukan kampung alpukat dengan penanaman alpukat sejumlah 2000 pohon di Dusun Ngetuk, Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung yang dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon di 11 Kecamatan dengan luas 67,288 Ha. Sehingga, total penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2023 seluas 253,063 Ha.

3. Komitmen Adaptasi Perubahan Iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang rentan terhadap dampak perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat maka pada tahun 2022 melalui fasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Temanggung berkomitmen terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Temanggung sedang menyusun Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Selain itu, pada tahun 2020 di Temanggung telah dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapang mitigasi perubahan iklim yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung.

4.19. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Regulasi SPM Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur berbagai aspek seperti koordinasi antar lembaga, pembiayaan, pengendalian, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM. Dengan peraturan ini, diharapkan standar pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Temanggung memprioritaskan pemenuhan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Ketersediaan komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.24
Ketersediaan Komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung

Komponen SPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	Komponen SPM Kabupaten Temanggung
Pendidikan	Pendidikan
Kesehatan	Kesehatan
Pekerjaan umum	Pekerjaan umum dan penataan ruang

Komponen SPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	Komponen SPM Kabupaten Temanggung
Perumahan rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Sosial	Sosial

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, keselarasan SPM RPD Kabupaten Temanggung mencapai 100% dengan SPM RPJMN yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.25
Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program pengelolaan pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat - Meningkatkan kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	- Indeks Pembangunan Infrastruktur - Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Pemulihan ekonomi	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pemulihan ekonomi	Program Kawasan Permukiman.
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas - Meningkatnya toleransi masyarakat	Pemulihan ekonomi	a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum b. Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	a. Program Pemberdayaan Sosial; b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			c. Program Rehabilitasi Sosial; d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Program Penanganan Bencana.
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.20. Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025

Dalam perencanaan pembangunan daerah, melalui berbagai tahapan kegiatan, salah satunya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024. Adapun hasil Musrenbang sebagai berikut.

Tabel 4.26
Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	DPPPAPPKB	Kelurahan Kranggan
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Terlaksananya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Dinperinaker	Desa Pingit
3	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pelatihan dan pengembangan anggrek di wilayah Kelurahan Jampirejo (Kegiatan: Pengawasan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKPPP	TEMANGGUNG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan		Penggunaan Sarana Pertanian)			
4	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Pembangunan Gedung UMKM untuk Display dan Pengadaan Sarpras Pendukung UMKM (Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	DINKOPDAG	BANSARI
5	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (pembelian mebeler buku dan PC)	Tersedianya Sarpras Perpustakaan	DINPUSIP	TEMANGGUNG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	pemerintahan yang baik						
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Revitalisasi Lapangan Jaten (senderan lapagan sebelah timur dan sebelah selatan)	Terlaksanannya revitalisasi Lapangan Jaten	DINDIKPORA	Kel. Madureso
7	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan/Rehab Gedung SD	Meningkatkan kegiatan belajar	DINDIKPORA	Desa Jambu
8	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan lampu jalan ruas jalan Jumo - Ketitang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	DINHUB	JUMO

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
		kebudayaan					
9	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan RTLH	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	DPRKPLH	KALORAN
10	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Kebraman – Gemawang	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	GEMAWANG
11	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan ruas jalan Kacepit- Bumiayu	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	SELOPAMPANG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
12	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Ngimbrang - batas Bansari	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	BULU
13	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Jurang-Salamsari (lanjutan BanGub)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	NGADIREJO
14	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Kalirejo-Bansari	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	KEDU

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
15	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Bejen – Congkrang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	KLEDUNG
16	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Pingit - Wonokerso (batas kabupaten)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	DPUPR	BEJEN
17	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan Sarpras Posyandu	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	PRINGSURAT

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
18	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan Kalimandang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR	KRANGGAN
19	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Wonobojo - Pringlegi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	WONOBOYO
20	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Rowoseneng – Sirandu (Batas Kabupaten)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	DPUPR	KANDANGAN

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
21	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Parakan-Bansari	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	PARAKAN
22	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Candiroto - Plosogaden	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	CANDIROTO
23	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Campurejo – Tretep	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	TRETEP

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
24	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan berkala ruas jalan Karangwuni - Tlogomulyo	Panjang Jalan yang Dipelihara secara berkala	DPUPR	TLOGOMULYO
25	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Menggoro-Kemloko	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	TEMBARAK

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD 2024 sebagaimana tabel 4.26 di atas, terlihat bahwa terdapat penyelarasan antara arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program dengan usulan kegiatan Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

4.21. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas. Portal tersebut terhubung dengan Portal Data Daerah yang bisa diakses melalui <https://data.temanggungkab.go.id/>. Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Berdasarkan SK Bupati Temanggung No 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai Walidata yang bertanggung jawab mengadakan Forum Satu Data, termasuk menyelenggarakan forum pengumpulan data statistik sektoral pada tahun 2023 dengan mengundang BPS Kabupaten Temanggung dan perangkat daerah sebagai produsen data.

Selain itu, untuk mengintegrasikan kebijakan pusat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Kabupaten Temanggung telah membuat Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung yang ditetapkan melalui SK Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Walidata berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Temanggung sebagai pembina data, menetapkan data prioritas, standar data, dan metadata. Hal ini dituangkan dalam SK Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Walidata telah memiliki akun Satu Data Indonesia dengan kode akun 330562. Sementara itu, penyelenggaraan Satu Data Indonesia

dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan portal <https://gis.temanggungkab.go.id/> yang merupakan portal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyediakan data-data sektoral. Data terkait penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung dapat diakses pada tautan berikut <https://s.id/BuktiSDI03>.

4.22. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pengendalian pemerintahan daerah di Kabupaten Temanggung, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) didukung oleh Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/363 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024.

Selain APIP, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga mendukung pengendalian pemerintahan di Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/0000825 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menilai dan memastikan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka memperkuat penerapan SPIP dan mencapai tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah. Dukungan regulasi ini diwujudkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Peraturan ini menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola risiko, sehingga manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dan sistematis.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2025 ini ditempuh dengan tema yang diusung dalam RKP 2025 yaitu “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Seiring dengan RKP 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2025.

5.1.1 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN)

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP

Tahun 2025 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kabupaten
Temanggung Terhadap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2025	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	13	31.893.177.711	28,992,017,570	BANKESBANGPOL
					DINSOS
					DPPPAPPKB
					DINKOMINFO
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	24	55.523.698.357	43,620,396,567	DINKOMINFO
					DKPPP
					DPUPR
					DPRKPLH
					DINKOPDAG
					DINPERINAKER
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan pengembangan infrastruktur	9	613.205.474.764		DPUPR
					DINPERINAKER
					DINKOPDAG
					BKPAD
					DPUPR
					DINKOMINFO
					DINHUB
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	18	424.397.022.638		DINDIKPORA
					BAPPEDA
					DINPUSIP
					DINKES
					DPPAPPKB
					BANKESBANGPOL
					DINSOS
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	15	178.971.628.726		DINPERINAKER
					DINKOMINFO
					DPUPR
					DINHUB
					DPMPTSP
					DINKOPDAG
					DINPERINAKER
6		13	37.261.679.676		DINPERMADES

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2025	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan				DPRKPLH DINKOPDAG DINSOS DINDUKCAPIL
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	17	453.215.735.274		BANKESBANGPOL SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT BKPSDM DINKOMINFO BPKPAD DINKOPDAG SATPOL PP DAMKAR
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	13	13.909.588.000		BANKESBANGPOL DINBUDPAR BPBD SATPOL PP DAN DAMKAR DPRKPLH
JUMLAH		132	1.808.378.005.146		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 2
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1:
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia								
	Program Pembangunan 1.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000	415.522.680	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 1.1. 1. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 2. Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan								
	Program Pembangunan 1.2. Penguatan Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335	2.603.897.600		
	Kegiatan Pembangunan 1.2. 1. Penguatan Kebebasan dan Kesenjangan Masyarakat 2. Penguatan Lembaga Demokrasi								
	Program Pembangunan 1.3 Pemantapan	Program Pengelolaan Informasi dan	Persentase lembaga binaan dan mitra	40	%	1.029.911.600	459.768.450	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Komunikasi Publik	diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif						
	Kegiatan Pembangunan 1.3 1. Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 2. Pembangunan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif , Jujur, Objektif dan Sehat Industri		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%				
			Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90	%				
	Program Pembangunan 1.4 Kepemimpinan Nasional yang Berdasarkan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000		Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKEBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 1.4 1. Peningkatan Kualitas kader pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000	90.000.000		
	2. Peningkatan Semangat Persatuan , Kesatuan dan Kebagsaan pada Generasi Muda	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000	781.702.700		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial							
	Program Pembangunan 1.5 Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarusutamaan HAM	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000	242.671.600	Sosial	DINAS SOSIAL
	Kegiatan Pembangunan 1.5 1. Transformasi Pengarusutamaan HAM 2. Transformasi Layanan Akses Terhadap Keadilan yang Subtansial Terutama dan Tidak Terbatas bagi kelompok rentan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	20.000.000	13.602.350		
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162	652.425.430		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%				
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%				
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%				
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	23.636.421.060		
			Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%				
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin	100	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			cakupan daerah kab/kota						
			persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%				
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%				
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	10.000.000	25.100.800	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPAPKB
			Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%				
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000	40.335.500		
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,0039	%	52.842.200	30.569.400		
		JUMLAH						31.893.177.711	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 3

**Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2:
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
2	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru								
	Program Pembangunan 2.1 Penguatan Pertahanan Negara								
	Kegiatan Pembangunan 2.1 1. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan Optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI 2. Memperkuat komponen cadangan 3. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara 4. Memperkuat kapabilitas Badan Pertahanan Siber 5. Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Essential Force dalam rangka meningkatkan Efektivitas menjaga kedaulatan NKRI 6. Meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar 7. Memperkuat Instrumen Pertahanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 8. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 9. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Strategis								
	Program Pembangunan 2.2. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan								
	Kegiatan Pembangunan 2.2 1. Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri 2. Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-Produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri 3. Pembentukan Ekosistem Industri Pertahanan 4. Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend To Invest 5. Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Alpalhankam								
	Program Pembangunan 2.3. Penguatan Sistem Keamanan Negara								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.3. 1. Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Pahami Kebhinekaan di Daerah-Daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme 2. Meningkatkan Sistem Deteksi Dini untuk Memperkuat Sistem Keamanan Negara 3. Memperkuat Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia 4. Memperkuat Instrumen Keamanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 5. Penguatan Sistem Keamanan Negara di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar 6. Pencegahan,								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Penanganan, dan Deradikalisasi Terorisme								
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000	781.702.700	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANG POL
	Program Pembangunan 2.4. Profesionalisme Pelayanan Kepolisian								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.4. 1. Memperkuat Polisi dalam Rangka Sinergi antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 2. Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan 3. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 4. Penguatan Kapabilitas Polri dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum, Pemeliharaan Keamanan, dan Penanganan Kriminalitas 5. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Polri								
	Program Pembangunan 2.5. Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.5 1. Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut 3. Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, Alki, dan Choke Point 4. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Lembaga Keamanan Laut 5. Pemetaan Batimetri dan Alur Laut								
	Program Pembangunan 2.6 Keamanan Siber, sandi, dan sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	66,7	%	47.000.000	374.880.000	Persandian	DINKOMINFO

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2. 6 1. Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi 2. Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal 3. Penguatan Kelembagaan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal 4. Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis	Pengamanan Informasi	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60	%				
	Program Pembangunan 2.7 Diplomasi Ekonomi								
	Kegiatan Pembangunan 2.7 1. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 2. Diplomasi Ekonomi yang Adaptif 3. Diplomasi Ekonomi Strategis dengan Mitra Utama 4. Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga Perbatasan, Regional,								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	dan Subregional 5. Proses Akses Indonesia ke OECD								
	Program Pembangunan 2.8 Hubungan Internasional yang Kondusif								
	Kegiatan Pembangunan 2.81. Intensifikasi Penyelesaian Batas Maritim dan Batas Darat serta Penguatan Diplomasi Kedaulatan2. Penguatan Supremasi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Fora dan Organisasi Internasional3. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Dunia4. Intensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, serta Memperjuangkan Warisan Budaya								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia5. Intensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, Serta Memperjuangkan Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia								
	Program Pembangunan 2.9 Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,3	kg/m2	235.000.000	137.023.670	Pangan	DKPPP
	Kegiatan Pembangunan 2.9		Produktivitas ikan lele	12,7	kg/m2				
	1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10	%	10.000.000	7.641.500		
	2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Selatan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,5	Kuintal/ha	18.460.436.207	19.375.673.157		
	3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nusa Tenggara Timur		Produktivitas jagung	54,6	Kuintal/ha				
	4. Pengembangan		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha				
			Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
Kawasan Sentra Produksi Pangan(KSPP) Papua 5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan 6. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional 7. Penguatan Cadangan Pangan 8. Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) 9. Pengembangan Pangan Hewani 10. Pengembangan Pangan Nabati 11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan 12. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan 13. Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan 14. Penguatan Pangan Lokal 15. Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi 16. Penguatan Satu Data Pangan	Kawasan Sentra Produksi Pangan(KSPP) Papua 5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan 6. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional 7. Penguatan Cadangan Pangan 8. Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) 9. Pengembangan Pangan Hewani 10. Pengembangan Pangan Nabati 11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan 12. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan 13. Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan 14. Penguatan Pangan Lokal 15. Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi 16. Penguatan Satu Data Pangan		Produktivitas cabai rawit	50,5	Kuintal/ha				
			Produktivitas cabai besar	65,5	Kuintal/ha				
			Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha				
			Produktivitas kopi robusta	7,15	Kuintal/ha				
			Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha				
			Produktivitas ternak sapi	177,5	Kg/Ekor				
			Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor				
			Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor				
			Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor				
			Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor				
			Persentase kelahiran pedet	56	%				
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900	4.024.847.400		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	87	%	651.725.000	453.449.800		
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	17. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan 18. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 19. One Health 20. Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis / Unggulan 21. Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam (KPN) 22. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian yang Adaptif dan Inklusif 23. Penguatan Regenerasi Petani 24. Pendayagunaan Praktik Pertanian Berkelanjutan	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,3	%	260.000.000	3.447.520.000		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	10.000.000			
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%		20.000.000			
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,52	%	10.000.000			
	Program Pembangunan 2. 10 Swasembada Energi								
	Kegiatan Pembangunan 2.10 1. Peningkatan Penyediaan Energi 2. Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi 3. Penguatan								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Implementasi Transisi Energi								
	Program Pembangunan 2.11 Swasembada Air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,7	%	9.081.058.000	109.713.000	Pekerjaan dan Penataan Ruang	DPUPR
	Kegiatan Pembangunan 2.11 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air 2. Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan 3. Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%				
	Program Pembangunan 2.12 Pemenuhan Akses Air Minum Aman								
	Kegiatan Pembangunan 2.12 1. Pengembangan Spam Terintegrasi Hulu ke Hilir 2. Pengamanan dan Pengawasan Kualitas Air Minum 3. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan SPAM 4. Peningkatan Peran								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Masyarakat dalam Pemenuhan Air Minum								
	Program Pembangunan 2.13 Percepatan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman untuk Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,11	%	316.091.000	306.119.500	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.13 1. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim 2. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan dan Ketahanan Iklim 3. Pengembangan Ekosistem Berbasis Inovasi Penyelenggaraan Sanitasi 4. Penguatan Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Penyelenggaraan Sanitasi yang Aman		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,4	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 2.14 Ekonomi Syariah	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina		%	2.000.000		Perdagangan	DINKOPDAG
	Kegiatan Pembangunan 2.14 1. Industri Halal 2. Ekspor Halal dan Kerja Sama Ekonomi Syariah Internasional 3. Ekosistem UMKM Halal 4. Keuangan Syariah 5. Dana Sosial Syariah								
	Program Pembangunan 2.15 Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125	1.094.479.500	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
	Kegiatan Pembangunan 2.15 1. Penguatan Ekosistem Infrastruktur Ekonomi Digital 2. Penguatan Ekosistem Industri Digital Lingkup Ekonomi		Persentase layanan publik secara elektronik	100	%				
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27,42	%	674.979.613	365.483.540	Perdagangan	DINKOPDAG
			Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 2.16 Ekonomi Sirkular Industri	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000	6.337.500		DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.16 1. Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Perpanjangan Daya Guna 2. Pengembangan Produk Ramah Lingkungan 3. Penguatan Ekosistem Daur Ulang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	10.419.879.000	6.655.398.000	Pekerjaan dan Penataan Ruang	
	Prioritas Pembangunan 2.17 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	380.000.000	141.169.700		DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.17 1. Penguatan Pengelolaan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi 2. Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi 3. Pengurangan Status Keterancaman Spesies dan Ekosistem 4. Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	5. Peningkatan Pemanfaatan Jasa Ekosistem secara Berkelanjutan 6. Pengembangan Bioprospeksi Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik 7. Pengelolaan Bioteknologi dan Keamanan Hayati (Biosafety)								
	Prioritas Pembangunan 2.18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,3	Angka	250.000.000	337.157.200	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.18		Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka				
	1. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air di Sungai dan Danau		Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%				
	2. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara di Kab/Kota di Indonesia	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30	%	70.000.000	16.671.400		
	3. Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut								
	4. Peningkatan Kualitas Laban								
	5. Penurunan Laju Deforestasi								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	6. Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut 7. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 8. Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Pengendalian dan Penertiban Penyelesaian Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemanfaatan Ruang 10. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan di Pusat dan Daerah serta Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang 11. Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Penguatan Instrumen Pencegahan dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	50.000.000	43.643.400		
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%				
	Program Pembangunan 2.19 Penerapan Ekonomi Sirkular dari Sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara Partisipatif (Hulu)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,5	%	3.525.000.000	5.911.970.700		
	Kegiatan Pembangunan 2.19 1. Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Sumber serta Pengumpulan dan Pengangkutan Terpilah Terjadwal 2. Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah		Cakupan layanan persampahan	66,44	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 2.20 Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hilir)								
	Kegiatan Pembangunan 2.20 1. Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Peningkatan Sampah Terolah di TPST, Konservasi TPA, dan Landfill Mining 3. Reformasi Tata Kelola Persampahan								
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,3	Angka	250.000.000	337.157.200		
			Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka				
			persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%				
	Program Pembangunan 2.21 Pembangunan Rendah Karbon								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.21 1. Penurunan Emisi GRK Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan 3. Pencegahan Pengurangan dan Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan 4. Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon 5. Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru 6. Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri 7. Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah 8. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK								
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				70.000.000		Lingkungan Hidup	DPRKPLH
	Program Pembangunan 2.22 Tenaga Kerja Hijau	Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	613.000.000	609.703.000	Tenaga Kerja	DINPERINAKER

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.22 1. Pengembangan Ekosistem Tenaga Kerja Hijau 2. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau 3. Penguatan Peran Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau dan Tenaga Kerja Hijau	Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%				
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000	128.947.700		
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%				
			Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,2	%				
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%				
		Program Hubungan Industrial	Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	80.000.000	110.289.700		
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%				
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%				
			Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%				
	Program Pembangunan 2.23 Pengelolaan Hutan Lestari								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.23 1. Peningkatan Produktivitas Hutan 2. Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri 3. Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari 4. Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari 5. Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan								
	Program Pembangunan 2.24 Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru								
	Kegiatan Pembangunan 2.24 1. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru 2. Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir 3. Pengembangan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan yang Modern,								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Terintegrasi, dan Berkelanjutan 4. Penguatan Industri Manufaktur Perkapalan dan Bahan Baku Perkapalan 5. Penguatan Sistem Logistik, Transportasi, dan Perdagangan Jalur Perairan 6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan 7. Peningkatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Biru serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Maritim								

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 4
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3:
Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif
dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	Prioritas Nasional: 03 Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur								
	Program Pembangunan 3.1 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42,03	%	18.589.072.100	17.665.108.590	Perhubungan	DINHUB
	Kegiatan Pembangunan 3.1.								
	1. Penguatan Konektivitas Jalan								
	2. Penguatan Konektivitas Kereta Api								
	3. Penguatan Konektivitas Laut		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	100	%				
	4. Penguatan Konektivitas Udara		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	99,12	%				
	5. Penguatan Konektivitas Darat		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%				
	6. Pengembangan Transportasi Perkotaan								
	7. Peningkatan Sumber Daya Manusia Transportasi								
			Persentase Kendaraan	99,66	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Bermotor yang Laik Jalan						
			Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,86	%				
			Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64,09	%				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	22.697.649.250		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%				
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	89,51	%				
	Program Pembangunan 3.2. Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik								

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 3.2 1. Dekarbonisasi dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Terbarukan 2. Peningkatan Konektivitas dan Digitalisasi Tenaga Listrik 3. Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Listrik 4. Pengembangan Ekosistem Pendorong Transisi Energi Listrik								
	Program Pembangunan 3.3. Penguatan Konektivitas dan Ekosistem Digital	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125	1.094.479.500	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
	Kegiatan Pembangunan 3.3. 1. Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran 2. Pengelolaan Sumber Daya TIK 3. Peningkatan Kondusivitas Ruang Digital		Persentase layanan publik secara elektronik	100	%				
	Program Pembangunan 3.4. Pengembangan Pengairan dan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,37	%	9.164.704.000	1.757.697.200	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Kegiatan Pembangunan 3.4 1. Pengembangan Irigasi 2. Pembangunan Bendungan		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97,97	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 3.6 Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	410.851.694.364	396.576.408.360	Keuangan	BPKPAD
	Kegiatan Pembangunan 3.6 1. Penguatan Peran Perbankan 2. Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank 3. Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%				
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%				
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%				
	Program Pembangunan 3.7 Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	190.000.000	329.480.800	Pariwisata	DINBUDPAR
	Kegiatan Pembangunan 3.7		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari				
	1. Penguatan Destinasi Regeneratif Bali		Persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%				
	2. Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau								
	3. Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%				
	4. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena								
	5. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang								
	6. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung								
	7. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba								
	8. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta•								

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Prambanan 9. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat 10. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo 11. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi 12. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru 13. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai								
	Program Pembangunan 3.8 Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,96	%	95.000.000	23.589.500	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINKOPDAG
	Kegiatan Pembangunan 3.8 1. Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif 2. Penguatan Ekosistem Film, Animasi, dan Video 3. Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya 4. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim 5. Penguatan Ekosistem Kuliner								
JUMLAH						613.205.474.764			

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 5
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4:
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
4	PRIORITAS NASIONAL: 04- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas								
	Program Pembangunan 4.1 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72	%	151.865.540.775	139.417.188.510	Pendidikan	DINDIKPORA
	Kegiatan Pembangunan 4.1 1. Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Penyaluran Bantuan Pendidikan 4. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 5. Revitalisasi Pendidikan Nonformal 6. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren yang Berkualitas dan Pendidikan Keagamaan Lainnya 7. Pembangunan Sekolah Unggul		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Terintegrasi 8. Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren								
	Program Pembangunan 4.2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75	%				
	Kegiatan Pembangunan 4.2 1. Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Esensial, Adaptif, dan Kontekstual 2. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK) 3. Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif 4. Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Penguatan		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik 5.Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 6.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)								
	Program Pembangunan 4.3 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikolog i	100	%				
	Kegiatan Pembangunan 4.3 1. Reformasi LPTK dan Penguatan PPG 2. Restrukturisasi Kewenangan Pengangkatan dan Distribusi Guru 3. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 4.4 Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%				
	Kegiatan Pembangunan 4.4		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,03	Angka				
	1. Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%				
	2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan		Persentase APM SD Sederajat	98,7	%				
	3. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu		Persentase APK SD Sederajat	104,69	%				
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01	Angka				
			Rasio Siswa/Guru SD	0,061111 1	Angka				
			Rasio Siswa/Rombel SD	0,061111 1	Angka				
			Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,32	%				
			Persentase Kepala SD memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%				
			Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%				
			Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka				
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49	%				
			Persentase APM SMP Sederajat	89	%				
			Persentase APK SMP Sederajat	98,77	%				
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,9	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16	Angka				
			Rasio Siswa/Guru SMP	0,0638889	Angka				
			Rasio Siswa/Rombel SMP	0,0638889	Angka				
			Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%				
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,25	%				
			Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%				
			Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%				
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08	Angka				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96,67	%				
			Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%				
			Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%				
			Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%				
			Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%				
			Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia	20	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Usaha Dunia Industri)						
	Program Pembangunan 4.5 Penguatan Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Bidang STEAM								
	Kegiatan Pembangunan 4.5 1. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas 2. Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Merata 3. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Dosen serta Tenaga Kependidikan 4. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Tinggi								
	Program Pembangunan 4.6 Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.6 1. Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi 2. Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi 3. Penguatan Pelatihan Vokasi 4. Penguatan Ekosistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja								
	Program Pembangunan 4.7 Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	606.932.500	299.082.000	Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA
	Kegiatan Pembangunan 4.7 1. Penguatan Kapasitas Iptek dan Inovasi 2. Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi 3. Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi secara Masif di Berbagai Bidang 4. Penguatan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Keunggulan Iptek dan Inovasi Berbasis Kewilayahan dan Berdaya Saing		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 4.8 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)								
	Kegiatan Pembangunan 4.8 1. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya 2. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset Inovasi 3. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga 4. Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)								
	Program Pembangunan 4.9 Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	0,25	%	1.211.407.950	1.206.394.115	Perpustakaan	DINPUSIP
	Kegiatan Pembangunan 4.9 1. Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan 2. Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca		Persentase perpustakaan yang aktif	35	%				
	Program Pembangunan 4.10Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214	86.308.426.407	Kesehatan	DINKES

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.10 1. Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2. Pencegahan dan Penurunan Stunting Dan Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil dan Balita 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	12,8	per 1000 KH				
	Program Pembangunan 4.11 Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%				
	Kegiatan Pembangunan 4.11 1. Penuntasan TBC 2. Pengendalian Penyakit Menular Lainnya 3. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta dan Schistosomiasis) 4. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan Lainnya 5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	6. Pembudayaan Hidup Sehat, Penyehatan Lingkungan dan Olahraga								
	Program Pembangunan 4.12 Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%				
	Kegiatan Pembangunan 4.12 1. Penguatan Surveilans, Laboratorium, Pos Pintu Masuk Negara, Pengendalian KLB / wabah dan Penanganan Bencana 2. Pemenuhan dan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 3. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 4.13 Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%				
	Kegiatan Pembangunan 4.13		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
	1. Investasi Pelayanan Kesehatan Primer		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%				
	2. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses		Angka Kematian Neonatal	9,15	per 1.000 KH				
	3. Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%				
	4. Penguatan JKN dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Angka Kematian Balita	15,6	per 1.000 KH				
	5. Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Data, Informasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan		Prevalensi ballita gizi buruk	0,3	%				
			Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal				
			persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,6	% minimal				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%				
			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%				
			persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%				
			persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				
			persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			kesehatan sesuai standar						
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				
			persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				
			persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				
			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk				
			Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%				
			persentase rumah sehat	87,6	%				
			persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,4	%				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan	26,9	%	10.000.000	1.149.970.500		

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Manusia Kesehatan	yang memenuhi standar						
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	445.344.000	205.937.000		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,6	%	7.293.884.000	7.470.149.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Pesentase Kepesertaan KB Aktif	75,8	%				
			Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46,15	%				
			Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	45,45	%				
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55,99	%	4.245.900.000	4.249.053.450		
		Program Pembangunan 4.15 Peningkatan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000	40.335.500	

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kualitas Perlindungan Anak							Perlindungan Anak	
	Kegiatan Pembangunan 4.15 1. Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak 2. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya								
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	100	%	10.000.000	18.959.200		
			Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%				
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	100	%	423.256.000	493.800.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	10,3	%				
			Persentase pasangan usia subur yang istrinya	1,85	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dibawah usia 20 tahun						
			Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	13,81	%				
	Program Pembangunan 4.16 Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,5	%	260.000.000	55.485.600	Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA
	Kegiatan Pembangunan 4.16 1. Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 2. Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan 3. Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335	2.603.897.600	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPO L
	Program Pembangunan 4.17 Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	10.000.000	25.100.800	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPAPPKB
	Kegiatan Pembangunan 4.17 1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pendidikan Perempuan 2. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 3. Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan 4. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan 5. Penguatan Penyelenggaraan PUG di Proses Pembangunan		gender dalam penyusunan renja PD						
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028	%	42.842.200	38.394.370		
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0028	%				
	Program Pembangunan 4.18 Peningkatan Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	23.636.421.060	Sosial	DINSOS
Kegiatan Pembangunan 4.18 1. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 2. Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota		100	%					
	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota		100	%					
	Persentase penerima UEP perorangan dan		60	%					

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	dalam Proses Pembangunan		UEP KUBE yang berkelanjutan						
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%				
	Program Pembangunan 4.19 Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,5	%	4.094.000.000	3.112.409.080	Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA
	Kegiatan Pembangunan 4.19 1. Pengembangan Budaya Olahraga 2. Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul 3. Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas 5. Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/ Festival/Kompetisi Olahraga		Persentase prestasi olahraga	62	%				
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	100	%	100.000.000	225.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 6
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5:
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	PRIORITAS NASIONAL: 05-MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI								
	Program Pembangunan 5.1 Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27,42	%	674.979.613	365.483.540	Perindustrian	DINPERINAKER
	Kegiatan Pembangunan 5.1. 1. Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting (Nikel, Tembaga, Bauksit)		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%				
	2. Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput Laut)		Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,41	%				
	3. Pengembangan Industri Medium-High Technology (Alat Angkut, Elektronik dan Digital, Kimia dan Farmasi)		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79,63	%				
	4. Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil (Makanan Minuman, TPT, dan Alas Kaki)	Program Hubungan Industrial	Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	80.000.000	110.289.700		
	5. Penguatan Industri Dasar (Kimia Dasar dan Logam Dasar)			70	%				
	Program Pembangunan 5.2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru		Persentase Perusahaan yang membayar						
	Kegiatan Pembangunan 5.2 1. Perencanaan, Perizinan dan Tata Ruang KI/KEK Prioritas								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam dan Luar KI/KEK Prioritas 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk KI/KEK Prioritas 4. Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok untuk KI/KEK Prioritas		upah sesuai UMK						
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%				
			Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%				
		Program penataan bangunan gedung	Persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	200.000.000	1.041.688.258	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	73,97	%	200.000.000	1.898.828.500		
	Program Pembangunan 5.3. Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional Kegiatan Pembangunan 5.3. 1. Penguatan Layanan Konektivitas Backbone Integrasi Ekonomi 2. Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Sarana Penunjang Logistik 3. Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik 4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	613.000.000		Tenaga Kerja	
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%				
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000	128.947.700		
			Persentase pencari kerja	31	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan						
			Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,2	%				
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%				
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	1.029.911.600	459.768.450	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%				
			Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	22.697.649.250	23.007.252.700	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%				
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	89,51	%				
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42,03	%	18.589.072.100	17.665.108.590	Perhubungan	DINHUB
			Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	100	%				
			Persentase potensi titik parkir yang tertangani	99,12	%				
			Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%				
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,66	%				
			Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,86	%				
			Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64,09	%				
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	69,34	%	200.000.000	285.577.800	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Program Pembangunan 5.4. Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	7.000.000		Penanaman Modal	DPMPTSP
	Kegiatan Pembangunan 5.4 1. Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi 2. Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan Mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 3. Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik		Persentase perusahaan yang bermitra	60	%				
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	100	%	7.000.000				
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510	188.772.800			
		Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%					

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%				
			Persentase pengendalian penanaman modal	16	%				
			Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%				
	Program Pembangunan 5.5 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	2,31	%	2.000.000		Perdagangan	DINKOPDAG

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 5.5 1. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global 2. Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi 3. Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi 4. Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 5. Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif 6. Peningkatan Ekspor Produk UMKM dan Integrasi UMKM dalam Rantai Nilai Global 7. Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif Termasuk Electric Vehicle (EV) 8. Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 9. Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen								
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2	%	343.670.713	322.601.750	Perindustrian	DINPERINAKER
			Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20,95	%				
JUMLAH						178.971.628.726	45,474,319,788		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 7
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6:
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
6	PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN								
	Program Pembangunan 6.1 Pembangunan Wilayah Metropolitan								
	Kegiatan Pembangunan 6.1. 1. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan 2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang 3. Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta 4. Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung 5. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang 6. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya 7. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar 8. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin 9. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar 10. Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado								
	Program Pembangunan 6.2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara								

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 6.2 1. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara 2. Pembangunan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara 3. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia Ibu Kota Nusantara 4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara 5. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara 6. Pemindahan dan Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara 7. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara								
	Program Pembangunan 6.3. Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,89	%	6.113.909.000	1.197.231.300	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 6.3.		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,82	%				
	1. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%				
	2. Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%				
	3. Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Perumahan								
	4. Penguatan Ekosistem Perumahan								
	5. Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu								

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah		
	Program Pembangunan 6.4. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000	11.508.100	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINPERMADES		
	Kegiatan Pembangunan 6.4 1.Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Perdesaan 2.Transformasi dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan 3. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Perdesaan 4. Penguatan Tata Kelola dan Pendampingan Desa Adaptif 5. Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi 6. Transformasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 7. Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	60	%	3.993.000.000			3.554.308.600	
			Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%						
			Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%						
			Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%						
			Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39,47	%						
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	494.917.000					173.102.740
				Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55						
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	15.000.000					

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 6.5 Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89,73	%	693.500.000	616.394.800	Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
	Kegiatan Pembangunan 6.5 1. Pengembangan Tata Kelola Registrasi Sosial Ekonomi 2. Penguatan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi 3. Sinkronisasi Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,85	%	10.000.000	5.408.500		
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98,5	%	100.848.300	77.922.500		
			Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	1,3	%				
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	73,97	%	82.500.000	9.901.500	Statistik	Dinkominfo
	Program Pembangunan 6.6 Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000	242.671.600	Sosial	DINSOS
	Kegiatan Pembangunan 6.6 1. Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara Inklusif 2. Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional								
	Program Pembangunan 6.7 Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	100	%	20.000.000	13.602.350		

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 6.1. Pengembangan dan Sinkronisasi Pendanaan yang Berbasis Risiko2. Penerapan Graduasi Bantuan Sosial dan Penguatan Kemandirian Masyarakat melalui Kartu Usaha3. Penyaluran Bantuan Sosial yang Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan4. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria5. Penguatan Pendamping Pembangunan		untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						
	Program Pembangunan 6.8 Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	23.636.421.060		
	Kegiatan Pembangunan 6.8 1. Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain 2. Pengembangan Pendanaan Perawatan/ Pengasuhan 3. Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%				
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%				
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%				
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%				
	Program Pembangunan 6.9 Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Kelompok Rentan	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162	652.425.430		

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 6.9 1. Penjangkauan Pendataan Kelompok Rentan 2. Akses yang Setara terhadap Perekonomian, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Sosial untuk Kelompok Rentan		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%				
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%				
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%				
JUMLAH						37.261.679.676			

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 8

**Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7:
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan**

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	PRIORITAS NASIONAL: 07-MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN								
	Program Pembangunan 7.1 Reformasi Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335	2.603.897.600	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKEBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 7.1. 1. Penguatan Kode Etik, Demokrasi Internal, Sistem Kaderisasi, Sistem Rekrutmen, dan Tata Kelola Keuangan pada Partai Politik 2. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemilu dan Partai Politik 3. Penyusunan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000			

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pedoman/Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan								
	Program Pembangunan 7.2. Reformasi Hukum	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	337.261.200	3.650.000.000	Pengawasan	INSPEKTORAT
	Kegiatan Pembangunan 7.2 1. Transformasi Tata Kelola Regulasi 2. Penerapan dan Penegakan Hukum 3. Penguatan Budaya Hukum		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 7.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%				
	Kegiatan Pembangunan 7.3. 1. Budaya Antikorupsi 2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	%				
	Program Pembangunan 7.4. Penguatan Kelembagaan Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325	26.913.022.325		SETDA
	Kegiatan Pembangunan 7.4 1. Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman 2. Penguatan Lembaga Hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan, dan Pembangunan Hukum		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%				
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%				
			Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%				
			Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%				
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%				
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%				
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	628.546.400	5.050.000.000	Pengawasan	INSPEKTORAT
			Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%				
			Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%				
			Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%				
	Program Pembangunan 7.5 Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal								
	Kegiatan Pembangunan 7.5 1. Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara 2. Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa								
	Program Pembangunan 7.6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000	415.522.680	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 7.6 1. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup								

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Sehat, Terutama Dimulai dari Keluarga dan Sekolah 2. Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika 3. Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa 4. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba 5. Memperkuat Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba 6. Meningkatkan Kemampuan Surveillance dan Intelijen P4GN								
	Program Pembangunan 7.7 Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur			456.750.000	606.355.750	Kepegawaian	BKPSDM
	Kegiatan Pembangunan 7.71.Manajemen Penghargaan dan		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur						

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pengakuan Berbasis Kinerja SDM Aparatur2. Penguatan Manajemen Talenta dan Karier ASN3. Penguatan Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan Citra Institusi4. Perluasan Akses Belajar bagi ASN5.Perbaikan Sistem Pelayanan Kepegawaian melalui Platform Tunggal Manajemen ASN6. Penyederhanaan dan Penguatan Proses Bisnis Pemerintah7. Penataan Kelembagaan Program Pembangunan dan Prioritas Nasional9. Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah10. Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur						
	Program Pembangunan 7.8 Inklusivitas dan Transformasi Digital Layanan Publik	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125	1.094.479.500		DINKOMINFO

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 7.8 1. Menciptakan Pemerintahan yang Berbasis Digitalisasi untuk Menciptakan Pemerintahan yang Transparan, Inklusif, dan Efisien 2. Digitalisasi Pelayanan Publik 3. Pengembangan Talenta Digital Pelayanan Publik 4. Penguatan Ekosistem Digital Pelayanan Publik 5. Perluasan Akses Pelayanan Publik		Persentase layanan publik secara elektronik	55	%				
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvesional yang dialih mediakan	60	%		5.349.500	Kearsipan	DINPUSIP
			Persentase audit internal kearsipan	73,33	%	20.000.000			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	16	%	404.961.000	25.010.500	Penanaman Modal	DPMPSTP
	Program Pembangunan 7.9 Peningkatan Produktivitas BUMN								
	Kegiatan Pembangunan 7.9 1. Peningkatan Daya Saing BUMN 2. Efisiensi Peran BUMN								

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	dalam Penugasan Pemerintah								
	Program Pembangunan 7.10 Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%		683.239.930	Keuangan	BPKPAD
	Kegiatan Pembangunan 7.10		Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu	100	%				
	1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	95,5	%				
	2. Optimalisasi Local Taxing Power		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	100	%				
	3. Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak								
	Program Pembangunan 7.11 Optimalisasi Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	410.851.694.364	396.576.408.360		BPKPAD
	Kegiatan Pembangunan 7.11		Persentase dokumen	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	1. Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat 2. Optimalisasi Kualitas Belanja TKD 3. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah		penganggaran tepat waktu						
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%				
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%				
			Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%				
	Program Pembangunan 7.12 Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan								

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 7.121. Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Kestinambungan Fiskal2. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pembiayaan Non-utang yang Inovatif								
	Program Pembangunan 7.13 Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800	880.356.220		SETDA
	1. Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%				
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%				
			Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%				
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%				
			Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%				
			Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%				
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%				
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	30.000.000	139.012.200	Perdagangan	DINKOPDAG

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Pokok Dan Barang Penting							
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99,41	%	30.000.000	16.628.900		
	Program Pembangunan 7.14 Pelindungan WNI di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia dan Keamanan Insani Kegiatan Pembangunan 7.14 1. Peningkatan Pelindungan Terhadap Seluruh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Tenaga Kerja Indonesia 2. Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	6,92	%	946.000.000	1.006.377.500	Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
			Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%				
			Persentase penegakan Perda/Perbup	100	%				
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000	781.702.700	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiata n Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Targe t	Satua n	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Penanganan Konflik Sosial							
JUMLAH						453.215.735.27 4	440,447,363,665		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5.9

**Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8:
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
8	PRIORITAS NASIONAL: 08-MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR								
	Program Pembangunan 8.1 Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Masalahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000	90.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 8.1. 1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis 3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan 5. Transformasi Layanan Kua yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif 6. Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman 7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000	781.702.700		
	Program Pembangunan 8.2. Pelestarian dan Pemajuan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	8,2	%	7.580.000.000	8.592.736.300	Kebudayaa n	DINBUDPAR

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa								
	Kegiatan Pembangunan 8.2		Persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%				
	1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Berdasarkan Pancasila		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	9,25	%				
	2. Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	13,18	%				
	3. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan 4. Jaminan Hak Berkebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 5. Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia 6. Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah 7. Transformasi Layanan Kearsipan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000	415.522.680	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa								
									97.500.000
	Program Pembangunan 8.3. Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,3	Angka	250.000.000	337.157.200	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 8.3. 1. Peningkatan Ketahanan Pesisir dan Laut		Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka				
	2. Pembangunan dan Konservasi Sumber		persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%				
		Program Pengelolaan Keanekaragaman	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	380.000.000	141.169.700		

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Daya Air 3. Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim 5. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan Iklim	an Hayati (Kehati)							
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000	6.337.500		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30	%	70.000.000	16.671.400		
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,5	%	3.525.000.000	5.911.970.700		
			Cakupan layanan persampahan	66,44	%				
	Program Pembangunan 8.4. Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulanga n Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	330.294.000	1.464.870.000	Ketentrama n dan Ketertiban Umum	BPBD

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 8.4 1.Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi 2. Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana 3. Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 4. Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana 5. Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%				
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%				
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	330.294.000	547.572.400		SATPOL PP DAMKAR
			Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%				
			Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%				
			Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6,15	%				

N o	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000		Sosial	DINSOS
JUMLAH						13.909.588.000	18,305,710,580		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah dalam RPD 2025-2026 dan dukungan program daerah RKPD 2025 untuk mendukung program prioritas/kegiatan prioritas pada PN RKP Tahun 2025 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5. 10
Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2025-2026 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2025

No	Jumlah Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Tahun 2025			Dukungan Program Daerah RPD/RKPD Tahun 2025			
	Prioritas Nasional	Program Pembangunan	Kegiatan Prioritas	RPD Tahun 2024-2026		RKPD Tahun 2025	
				Program Daerah	Persentase	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	5	10	13	100%	13	100%
2	PN 2	24	143	24	100%	24	100%
3	PN 3	8	36	9	100%	9	100%
4	PN 4	19	70	18	100%	18	100%
5	PN 5	5	23	15	100%	15	100%
6	PN 6	9	44	14	100%	13	100%
7	PN 7	14	36	17	100%	17	100%
8	PN 8	4	25	21	100%	13	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

5.1.2 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan berkolaborasi dengan semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non-Pemerintah, Akademisi, media massa, perusahaan, komunitas, dan masyarakat.

Kebijakan pembangunan daerah menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan prioritas kegiatan yang berdaya ungkit besar pemantapan reformasi birokrasi, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan.

Tabel 5. 11
Rekapitulasi dan Penjabaran Dukungan Program dan Anggaran Terhadap
Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Perumahan dan Permukiman	1.	Program pengelolaan pendidikan	151.865.540.775	139,417,188,510	DINDIKPORA
		2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	226.145.645.214	86,308,426,407	DINKES
		3.	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	10.000.000	1,149,970,500	
		4.	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	445.344.000	205,937,000	
		5.	Program kawasan permukiman	6.113.909.000	1,197,231,300	DPRKPLH
		6.	Program Rehabilitasi Sosial	732.671.162	652,425,430	DINAS SOSIAL
		7.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	24.340.334.214	23,636,421,060	
		8.	Program Penanganan Bencana	167.500.000	236,374,200	BPBD
		9.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	9.081.058.000	109,713,000	DPUPR
			JUMLAH	418.902.002.365	252,913,687,407	
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	1.	Program perlindungan dan jaminan sosial	24.340.334.214	23,636,421,060	DINAS SOSIAL

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		2.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	13.000.000	609,703,000	DINPERINAKR
		3.	Program Penempatan tenaga Kerja	425.000.000	128,947,700	DINPERINAKR
		4.	program hubungan industrial	80.000.000	110,289,700	DINPERINAKR
		5.	Program pemberdayaa n usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	10.000.000	318,335,000	DINKOPDAG
		6.	program pengembanga n UMKM	95.000.000	23,589,500	DINKOPDAG
		7.	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	25.000.000	15,486,400	DINKOPDAG
		8.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	674.979.613	365,483,540	DINKOPDAG
		9.	program pengembanga n ekspor	20.000.000	-	DINKOPDAG
		10.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	30.000.000	139,012,200	DINKOPDAG
		11.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	30.000.000	16,628,900	DINKOPDAG
		12.	Program pengembanga n daya tarik destinasi wisata	190.000.000	329,480,800	DINBUDPAR
		13.	Program Pengembangan Kebudayaan	7.580.000.000	8,592,736,300	DINBUDPAR
		14.	Program penyediaan dan pengembanga n sarana pertanian	30.000.000	19,375,673,157	DKPPP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		15.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	4,024,847,400	DKPPP
		16.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	651.725.000	453,449,800	DKPPP
		17.	Program Penyuluhan Pertanian	260.000.000	3,447,520,000	DKPPP
		18.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10.000.000	7,641,500	DKPPP
		19.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	235.000.000	137,023,670	DKPPP
		20.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.164.704.000	1,757,697,200	DPUPR
		21.	Program Penyelenggaraan Jalan	22.697.649.250	23,007,252,700	DPUPR
		22.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	15.000.000	-	Dinpermades
		23.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	494.917.000	173,102,740	
		24.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.589.072.100	17,665,108,590	Dinhub
		25.	Program pengembangan iklim penanaman modal	7.000.000	-	DPMPSTP
		26.	Program Promosi Penanaman Modal	7.000.000	-	
			JUMLAH	94.066.782.790	104,335,430,857	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	1.	Program Kepegawaian Daerah	330.762.000	494,729,100	BKPSDM
		2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	456.750.000	606,355,750	BKPSDM
		3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	628.546.400	5,050,000,000	INSPEKTORAT
		4.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	337.261.200	3,650,000,000	INSPEKTORAT
		5.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	509.474.400	827,177,000	BAPPEDA
		6.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	606.932.500	299,082,000	BAPPEDA
		7.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	697.772.800	410,479,000	BAPPEDA
		8.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.723.383.200	396,576,408,360	BPKPAD
		9.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.848.300	77,922,500	DINDUKCAPIL
		10.	Program Pendaftaran Penduduk	693.500.000	616,394,800	DINDUKCAPIL
		11.	Program Pencatatan Sipil	10.000.000	5,408,500	DINDUKCAPIL
		12.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.848.300	77,922,500	DINDUKCAPIL

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		13.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.528.595.335	2,603,897,600	BANKESBANG POL
		14.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.000.000	-	DPMPSTP
		15.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	404.961.000	25,010,500	
		16.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	946.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP DAMKAR
		17.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	459,768,450	SATPOL PP DAMKAR
		18.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	538.568.000	547,572,400	SATPOL PP DAMKAR
		19.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.391.297.995	30,464,036,093	SETDA
		20.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	31.896.029.325	26,913,022,325	SETDA
		21.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.225.335.800	880,356,220	SETDA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		22.	Program Pengelolaan Arsip	20.000.000	5,349,500	DINPUSIP
		23.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.680.615.905	13,564,026,308	SEKRETARIAT DPRD
		24.	Program Penanggulangan Bencana	330.294.000	1,464,870,000	BPBD
		25.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	459,768,450	DINKOMINFO
			JUMLAH	97.530.091.570	486,079,557,356	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah

Tabel 5. 12

Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perumahan dan Permukiman

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
1	DPRKPLH	1	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	1	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	95.89	%	6.113.909.000	1,197,231,300
						persentase kawasan kumuh perkotaan	4.82	%		
						persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%		
						persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%		
2	Dinas Sosial	2	Sosial	2	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162	652,425,430

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
						Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%		
				3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	23,636,421,060
						persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
						persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%		
						persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
				4	Program Penanganan bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000	236,374,200
4	Dinas Pendidikan	4	Pendidikan	5	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775	139,417,188,510
						persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%		
						persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%		
						persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%		
						persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%		
						persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
						Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka		
						persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase APM SD Sederajat	98.7	%		
						persentase APK SD Sederajat	104.69	%		
						Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.01	Angka		
						Rasio Siswa/Guru SD	0.06111111	Angka		
						Rasio Siswa/Rombel SD	0.06111111	Angka		
						persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%		
						persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase Kepala SD memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
						persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
						Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka		
						persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%		
						persentase APM SMP Sederajat	89	%		
						persentase APK SMP Sederajat	98.77	%		
						Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka		
						Rasio Siswa/Guru SMP	0.0638889	Angka		
						Rasio Siswa/Rombel SMP	0.0638889	Angka		
						persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%		
						persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	100	%		
						persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
						Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka		
						persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%		
						persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%		
						persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
						persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%		
						persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%		
5	Dinas Kesehatan	5	Kesehatan	6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214	86,308,426,407
						Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%		
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal		
						Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		
						Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		
						persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
						Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%		
						Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH		
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
						Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH		
						Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%		
						Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal		
						persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
						persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
						Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
						persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%		
						persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
						persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		
						persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		
						persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%		
						Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
						Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%		
						persentase rumah sehat	87.6	%		
						persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%		
				7	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26.9	%	10.000.000	1,149,970,500
				8	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	445.344.000	205,937,000
				9	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,70	%	9.081.058.000	109,713,000
						Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		
Jumlah									418.902.002.365	252,913,687,407

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5. 13
Dukungan Program daerah terhadap Prioritas Pembangunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Dinas Kesehatan	5	Kesehatan	6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	86,308,426,407
						Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH	
						Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal	
						Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
						Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
						persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
						persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH	
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
						Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH	
						Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%	
						Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
						persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal	
						persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
						Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%	
						persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
						persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
						persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
						Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
						persentase rumah sehat	87.6	%	
						persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%	
Jumlah									86,308,426,407

Sumber : Bappeda Kab. Temanggung, tahun 2025

Tabel 5.14
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Dinas Sosial	1	Sosial	1	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	236,374,200
2	BPBD	2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	Program Penanggulangan bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1,464,870,000
3	Dinas Pendidikan	3	Pendidikan	3	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	139,417,188,510
						persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%	
						persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%	
						persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
						persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%	
						persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
						Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka	
						persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
						persentase APM SD Sederajat	98.7	%	
						persentase APK SD Sederajat	104.69	%	
						Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.01	Angka	
						Rasio Siswa/Guru SD	0.061111	Angka	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Rasio Siswa/Rombel SD	0.061111	Angka	
						persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
						persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%	
						persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
						persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
						Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka	
						persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%	
						persentase APM SMP Sederajat	89	%	
						persentase APK SMP Sederajat	98.77	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%	
						Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka	
						Rasio Siswa/Guru SMP	0.063889	Angka	
						Rasio Siswa/Rombel SMP	0.063889	Angka	
						persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
						persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	100	%	
						persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
						persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
						Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka	
						persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
						persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
						persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
						persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%	
						persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%	
4	Dindukcapil	4	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
5	Dinhub	5	Perhubungan	5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42	%	300,000,000
						persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%	
						persentase potensi titik parkir yang tertangani	99	%	
						persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
						persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
						persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	100	%	
						persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	34	%	
						persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64	%	
6	Dinas Kesehatan	6	Kesehatan	6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	86,308,426,407
						Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal	
						Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
						Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
						persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
						persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
						Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH	
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
						Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%	
						Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
						persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal	
						persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
						Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%	
						persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
						persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
						persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
						persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
						Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	
						Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
						persentase rumah sehat	87.6	%	
						persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%	
7	Dinkopdag	7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	1	%	23,589,500

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	7	%	2,074,895,563,218
8	Dinperinaker	8	Tenaga Kerja	9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73	%	609,703,000
						persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
				10	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	128,947,700
						persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	
						persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
						persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
9	Dinpermades	9		11	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	60	%	3,554,308,600
						Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%	
						persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%	
						persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39.47	%	
				12	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa		%	11,508,100
				13	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	-
10	Dinsos	10	Sosial	14	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	242,671,600

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	23,636,421,060
						persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
						Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
						persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
						persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
				16	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	652,425,430
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
11	DKPPP	11	Pangan	17	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	163,297,000
				18	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	-
		12	Kelautan dan Perikanan	19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1	kg/m2	30,464,036,093
						Produktivitas ikan lele	13	kg/m2	
				20	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	23	kg/kapita/tahun	7,641,500
		13	Pertanian	21	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	4,024,847,400
				22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	62	Kuintal/ha	2,074,895,563,218
						Produktivitas jagung	55	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai rawit	51	Kuintal/ha	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Produktivitas cabai besar	66	Kuintal/ha	
						Produktivitas tembakau	6	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi robusta	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi arabika	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas ternak sapi	178	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak domba	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak kambing	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	1	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam petelur	11	Kg/Ekor	
						persentase kelahiran pedet	56	%	
				23	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1	%	4,024,847,400
12	DPPAPKB	14	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55.99	%	4,249,053,450
13	Dinpermdes	15	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	173,102,740

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%	
14	DPRKPLH	16	Perumahan dan Kawasan Permukiman	26	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	96	%	1,197,231,300
						persentase kawasan kumuh perkotaan	5	%	
						persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
						persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
15	DPUPR	17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59.37	%	1,757,697,200
	TOTAL								4,452,439,314,626

Tabel 5.15
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pengendalian Inflasi Daerah

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DKPPP	1	Pangan	1	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	163,297,000
				2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	62	Kuintal/ha	19,375,673,157
						Produktivitas jagung	55	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai rawit	51	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai besar	66	Kuintal/ha	
						Produktivitas tembakau	6	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi robusta	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi arabika	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas ternak sapi	178	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak domba	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak kambing	14	Kg/Ekor	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	1	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam petelur	11	Kg/Ekor	
						persentase kelahiran pedet	56	%	
2	Dinkopdag	2	Perdagangan	3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	139,012,200
				4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27	%	365483540
						persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
						persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2	%	
						persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	80	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
3	Bagian Perekonomian	3	Sekretariat Daerah	5	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	880,356,220
						persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
						persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83.33	%	
						persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
						persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
						persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
						persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	
						persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	
	Jumlah								20,923,822,117

Sumber: Bappeda kab. Temanggung, tahun 2025

Tabel 5.16
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pertumbuhan Perekonomian Daerah

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Dinperinaker	1	Perindustrian	1	program perencanaan dan pembangunan industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78	%	322,601,750
						persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	21	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
		2	Tenaga Kerja	2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73	%	609,703,000
						persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
				3	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	128,947,700
						persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	
						persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
						persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
				4	Program Hubungan Industrial	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83	%	110,289,700
						persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
						persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
						persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	
2	Bagian Perekonomian	3	Sekretariat Daerah	5	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	880,356,220
						persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
						persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83.33	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
						persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
						persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
						persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	
						persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	
						persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	
3	Dinkopdag	4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi sehat	48	%	15,486,400
				7	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	1	%	23,589,500
				8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	7	%	318,335,000
		5	Perdagangan	9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	139,012,200

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27	%	365,483,540
						persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
						persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2	%	
						persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	80	%	
				11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	100	%	16,628,900
				12	Program pengembangan iklim penanaman modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	-
4	DPMPTSP	6	Penanaman Modal	13	program promosi penanaman modal	persentase promosi penanaman modal	50	%	-
				14	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	188,772,800
						persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
						persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
				15	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pengendalian penanaman modal	16	%	25,010,500
5	Dinbudpar	7	Kebudayaan	16	Program pengembangan kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	8.2	%	8,592,736,300
						persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase pelestarian Sejarah Lokal	9.25	%	
						persentase Pelestarian Cagar Budaya	13.18	%	
		8	Pariwisata	17	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0.04	%	329,480,800
						Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
						persentase Peningkatan Desa Wisata	14.76	%	
						persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
6	DKPPP	9	Pangan	18	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	-
				19	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	163,297,000
		11	Pertanian	20	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	62	Kuintal/ha	19,375,673,157
						Produktivitas jagung	55	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai rawit	51	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai besar	66	Kuintal/ha	
						Produktivitas tembakau	6	Kuintal/ha	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Produktivitas kopi robusta	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi arabika	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas ternak sapi	178	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak domba	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak kambing	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	1	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam petelur	11	Kg/Ekor	
						persentase kelahiran pedet	56	%	
				21	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1	%	3,447,520,000
		12	Kelautan dan Perikanan	22	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1	kg/m2	137,023,670
						Produktivitas ikan lele	13	kg/m2	
				23	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	23	kg/kapita/tahun	7,641,500
	Jumlah								35,197,589,637

Sumber: Bappeda kab. Temanggung, tahun 2025

Tabel 5.17
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Swasembada Pangan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DKPPP	1	Pangan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	-
				2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	163,297,000
		2	Kelautan dan Perikanan	3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1	kg/m2	137,023,670
						Produktivitas ikan lele	13	kg/m2	
				4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	23	kg/kapita/tahun	7,641,500
		3	Pertanian	5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	4,024,847,400
				6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	62	Kuintal/ha	2,526,245,500
						Produktivitas jagung	55	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai rawit	51	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai besar	66	Kuintal/ha	
						Produktivitas tembakau	6	Kuintal/ha	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Produktivitas kopi robusta	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi arabika	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas ternak sapi	178	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak domba	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak kambing	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	1	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam petelur	11	Kg/Ekor	
						persentase kelahiran pedet	56	%	
				7	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1	%	3,447,520,000
				8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase penanganan penyakit hewan	87	%	453,449,800
						persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%	
	jumlah								10,760,024,870

Sumber: Bappeda kab. Temanggung, tahun 2025

Tabel 5.18

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pengembangan Industri Kerajinan dan memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Dinperinaker	1	Perindustrian	1	program perencanaan dan pembangunan industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78	%	322,601,750
						persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	21	%	
2	Dinkopdag	2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	1	%	23,589,500
				3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	7	%	453,449,800

Sumber: Bappeda kab. Temanggung, tahun 2025

5.1.3 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan

Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2025 adalah : (1) Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, (2) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan (3) Reformasi Birokrasi

Konsep Holistik

Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan penanganan kemiskinan, dan gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya

manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa.

Konsep Spasial

Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antar wilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5. 19
Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2025 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatanm Pendidikan, dan Sosial	1. Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
		2. Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
		3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		4. Program pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan
		5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	DPUPR
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinsos
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
			Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos
		5. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Dinperinaker
		6. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Dinperinaker
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinperinaker
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinperinaker
		7. Program Peningkatan	Job Fair/Bursa Kerja	Dinperinaker
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinkopdag
			Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
			Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
		9. Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinkopdag
		10. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinkopdag
		11. Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Dinkopdag
		12. Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinkopdag
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Dinkopdag
		13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinperinaker
		14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		15.Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan data tarik wisata kabupaten	Dinbudpar
		16.Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
		17.Program Pengendalian Penduduk	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPPAPPKB

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		18.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPPAPPKB
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPPAPPKB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPPAPPKB
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPPAPPKB
		19.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPPAPPKB
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
		20.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	DPUPR
			Rehabilitasi/Pemeliharaan /Pembinaan Petani Pemakai Air	DPUPR
			Penyusunan DED Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	DPUPR
			Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	DPUPR

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		21.Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
		22.Program Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca Bencana Kabupaten	BPBD
		23.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan jamban keluarga	Dinas Kesehatan
			Pembangunan septic tank	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		24.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Lantaijemur	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Rice Milling Unit (RMU)	DKPPP
			Fasilitasi dan distribusi akses pangan	DKPPP
		25.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan	DKPPP
			Pemberdayaan lumbung Pangan masyarakat	DKPPP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKPPP
			Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan	DKPPP
			Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	DKPPP
			Pendampingan P2KP	DKPPP
		26.Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian
		28.Program Penataan Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Dinpermades
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Dindikpora
			Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Dindikpora
			Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Dindikpora
			BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dindikpora
		29.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	DPM
		30.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasarandan Peningkatan PenggunaanProduk Dalam Negeri	Dinkopdag
		31.Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan <i>matchmaking</i> dan pameran investasi	DPM
		32.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
		33.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinperinaker
		34.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		35.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	DKPPP
		36.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura	DKPPP
			Pengembangan Tanaman Kopi	DKPPP
			Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	DKPPP
			Pengembangan Padi Organik	DKPPP
			Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	DKPPP
			Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	DKPPP
			Pengembangan Buah unggulan	DKPPP
			Pengadaan Alat Pertanian Perkebunan dan Pelatihan pendidikan	DKPPP
			Pengembangan Sistem pembenihan Mandiri Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Pengembangan Sistem Pembenihan Buah Unggulan	DKPPP
			Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura (Statistik Pertanian)	DKPPP
			Pengelolaan Database Pertanian	DKPPP
			Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres	DKPPP
			Optimalisasi Kebun Pemda	DKPPP
			Intensifikasi Tanaman Cengkeh	DKPPP
			Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	DKPPP
		37.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Fasilitasi DAK Pertanian	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Hortikultura	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Tanaman Pangan	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	DKPPP
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	DKPPP
		38.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Hama Tikus	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	DKPPP
		39.Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	DKPPP
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Teknologi Pertanian	DKPPP
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	DKPPP
			Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	DKPPP
			Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	DKPPP
		40.Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
3	Reformasi Birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	BKPSDM
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Pelaksanaan Updating Data kepegawaian	BKPSDM
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	BKPSDM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Urusan Pemerintahan Umum	
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
		5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
		6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase penanganan aduan masyarakat	Inspektorat
			Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Monitoring Program dan Daerah Kegiatan Perangkat Daerah	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD
			Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan dan Review	BPKPAD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD
			Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKPAD
			Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD
		9. Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinkominfo
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dinkominfo
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinkominfo
		10. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	Dinkominfo
		11. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinkominfo

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
		12.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	Dinkominfo
		13.Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindukcapil
			Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Dindukcapil
		14.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		15.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksana Koordinasi di bidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Badan Kesbangpol
		16.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	DPM
			Pengkajian potensi investasi pariwisata	DPM
			Pengkajian potensi investasi UMKM	DPM
			Pengkajian potensi investasi pertanian	DPM
			Pengembangan potensi unggulan daerah	DPM
		17.Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	DPM
			Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	DPM
			Diseminasi promosi investasi	DPM
		18.Program Pelayanan Penanaman Modal	Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan	DPM
			Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	DPM
			Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	DPM
			Fasilitasi Pengaduan dan advokasi	DPM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		19.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Temu Usaha	DPM
			Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	DPM
			Monev PATEN	DPM
			Monev dan Pelaporan LKPM	DPM
		20.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
			Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	Bagian Organisasi
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Forkompim
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Pembangunan, Bagian PBJ
		21.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
		22.Program Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinpusip
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinpusip
		23.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD
		24.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Satpol PP Damkar
			Rasio linmas per RT	Satpol PP Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Satpol PP Damkar
		25.Program Pencegahan Penanggulangan,P penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	Satpol PP Damkar
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	Satpol PP Damkar
		26.Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	BPBD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	BPBD
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Bagian Perekonomian

Sumber : Bappeda, data diolah, 2023.

5.1.4 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.20
Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	330.000.000	Dinkopdag
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7.580.000.000	Dinbudpar

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.274.889.125	Dinkominfo
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	22.697.649.250	DPUPR
5	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	260.000.000	DKPPP
6	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.525.000.000	DPRKPLH
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	250.000.000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	697.772.800	Bappeda
JUMLAH				36.615.311.175	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur.

Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

5.1.5 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Pembangunan Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta dengan pintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang

tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

5.1.6 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten percontohan penanganan perkawinan anak usia dini dan pencegahan stunting oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1) Rapat Koordinasi; 2) Sosialisasi dan 3) Forum Group Discussion (FGD)

Selain itu juga dilakukan penelitian secara khusus oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc dan tim di Desa Wadas Kecamatan Kandangan sebagai desa dengan kasus stunting tertinggi dan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagai desa dengan kasus stunting rendah. Universitas Diponegoro Semarang juga melakukan penelitian tentang indeks resiko stunting dan determinan penurunan kejadian stunting tahun 2018-2021 di Kabupaten Temanggung. Guna menunjang kegiatan sebagaimana di maksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.21
Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting
Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	226.145.645.214	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.245.900.000	DPPPAPPKB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.081.058.000	DPUPR
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.293.884.000	DPPPAPPKB
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.245.900.000	DPPPAPPKB
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	DPPPAPPKB
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	DPPPAPPKB

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
8	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18.460.436.207	DKPPP
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.340.334.214	Dinas Sosial
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	151.865.540.775	Dindikpora
Jumlah Total			445.733.698.410	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.7 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap SDGs

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGs, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah berserta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantun dalam tabel berikut:

Tabel 5.22
Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 4	V	V
II	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3 tujuan 6 tujuan 13	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1 tujuan 6		V
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1	V	
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9 Tujuan 11 Tujuan 13	V	
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9	V	
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1 tujuan 6		V
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1 tujuan 6 tujuan 11		V
V	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 13	V	
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum			V
VI	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3	V	V
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1 tujuan 8	V	V
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8 tujuan 10	V	
VIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5 tujuan 16	V	V
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16 tujuan 5 tujuan 10	V	V
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
IX	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2 tujuan 8 tujuan 13	V	
X	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6 tujuan 9 tujuan 12 tujuan 13	V	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6 tujuan 11 tujuan 13 tujuan 15	V	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6 tujuan 12 tujuan 13	V	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1 tujuan 12 tujuan 11 tujuan 13	V	V
XI	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1 tujuan 16 tujuan 17	V	V
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	tujuan 10	V	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
6	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V
XIV	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
1	Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal	tujuan 8 tujuan 9	V	
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik			
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4 Tujuan 9	V	V
XVI	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3 Tujuan 11	V	
XVII	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1 tujuan 4 tujuan 8	V	
XIX	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11	V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		V	
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XX	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2 tujuan 8	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8	V	
XXI	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIII	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXIV	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXV	Sekretariat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1 tujuan 4	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12 tujuan 16 tujuan 17	V	V
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16 tujuan 8	V	V
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	Perencanaan			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 17	V	V
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVII	Keuangan			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16 tujuan 17	V	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16 Tujuan 17	V	
XXVIII	Kepegawaian			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXIX	Pendidikan Dan Pelatihan			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5 tujuan 16	V	V
XXX	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1 tujuan 9	V	
XXXI	Inspektorat Daerah			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan,		V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
	Pendampingan dan Asistensi			
XXXII	Kecamatan			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG's dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG's yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG's sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.23
Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	1	4	-	-	5
2	Indikator Kinerja Sasaran	8	4	4	3	19
3	Indikator Kinerja Program	60	7	9	14	90
4	Indikator Pada Renstra PD	4	8	18	6	36
5	Indikator Bukan Kewenangan	6	5	-	4	15
Jumlah		79	28	31	27	165

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.8 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.24
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	Dinas Kesehatan
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.460.436.207	DKPPP
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	DKPPP
4	Program Penyuluhan Pertanian	260.000.000	DKPPP
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50.000.000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	DPRKPLH
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	380.000.000	DPRKPLH
8	Program Pengelolaan Persampahan	3.525.000.000	DPRKPLH
Jumlah Total		257.118.812.321	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

5.2 Pendanaan Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2026 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah.

5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

➤ Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diprioritaskan pada beberapa capaian Bidang Pendidikan yang belum sesuai target yang

ditetapkan oleh Pusat dan hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota yaitu melalui kegiatan peningkatan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah 7-15 tahun dan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun, peningkatan satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan kemampuan numerasi dan literasi SD dan SMP. Terkait implementasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan karakter juga menjadi perhatian semua pihak baik perangkat daerah terkait, sekolah, Lembaga terkait Pendidikan dan masyarakat.

Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga secara berkala dilakukan dan dikoordinasikan dengan BKPSDM terkait formasi dan pengadaannya.

PAUD juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pijakan dasar terkait SDM generasi masa depan, yaitu melalui peningkatan kualitas dalam perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Tidak hanya PAUD, berdasarkan data masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah maka juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesetaraan melalui perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Berdasarkan hasil evaluasi, program di bidang Pendidikan juga diarahkan pada kegiatan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus

sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan peningkatan APK PAUD.

2) **Bidang Kesehatan**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal,; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.

- Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas trotoar di sejumlah titik di Temanggung.

- Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.

4) **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak

huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

➤ Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses sanitasi layak.

5) **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

➤ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

➤ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.

➤ Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) **Bidang Sosial**

➤ Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.

➤ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penjemputan masyarakat yang termasuk warga migrant korban tindak kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.

➤ Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial pada masyarakat yang membutuhkan.

➤ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

➤ Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait siap siaga jika terjadi bencana.

➤ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

b. **Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar**

1) **Bidang Tenaga Kerja**

➤ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan beberapa pelatihan untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mampu bersaing dalam mencari lapangan kerja.

➤ Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimibingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.

➤ Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan mediasi apabila ada perselisihan hubungan industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) **Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

➤ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan.

➤ Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan dan mediasi bagi perempuan korban kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.

➤ Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.

➤ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta pemenuhan hak sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis.

➤ Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3) **Bidang Pangan**

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan seperti lumbung pangan, rantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pemanfaatan teknologi pangan serta diversifikasi pangan

➤ Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi terkait kerentanan dan ketahanan pangan, serta dan mencukupi ketersediaan pangan.

➤ Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) **Bidang Pertanahan**

➤ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah garapan.

5) **Bidang Lingkungan Hidup**

➤ Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

➤ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan arah kebijakan terutama dalam penanganan lahan kritis, mitigasi adanya fenomena perubahan iklim, serta menjaga kualitas lingkungan hidup.

➤ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota, taman kota, dan terpenuhinya RTH

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 sehingga mencegah pencemaran lingkungan.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan untuk pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sehingga tidak merusak lingkungan dan mencegah sengketa lingkungan.

- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan

Program ini difokuskan pada kegiatan yang penjagaan kelestarian lingkungan hidup oleh berbagai stakeholders serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)

- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja stakeholders yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup

- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH

- Program Pengelolaan Persampahan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

6) **Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- Program Pendaftaran Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.

➤ Program Pencatatan Sipil

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

➤ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

➤ Program Penataan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa sehingga terwujud desa berpredikat mandiri.

➤ Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan meningkatkan kerjasama antar desa untuk pembangunan desa sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah

➤ Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

➤ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

8) **Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

➤ Program Pengendalian Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta data-data dan pelayanannya terhadap masyarakat.

➤ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta publikasi dan promosi program melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang

➤ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 locus stunting serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

9) **Bidang Perhubungan**

➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sosialisasi SOP berkendara dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan terminal tipe C.

10) **Bidang Komunikasi Dan Informatika**

➤ Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

➤ Program Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

11) **Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

➤ Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan koperasi terutama koperasi yang tidak sehat.

➤ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.

➤ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.

➤ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kelas UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, pemasaran dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.

➤ Program Pengembangan UMKM

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM sehingga terwujud peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

12) **Bidang Penanaman Modal**

➤ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal.

➤ Program Promosi Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi

penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.

➤ Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.

➤ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

13) **Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

➤ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan pemuda sehingga terwujud peningkatan kapasitas pemuda.

➤ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, pembinaan cabang olah raga dan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

➤ Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman.

14) **Bidang Statistik**

➤ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan BPS guna sinkronisasi data.

15) **Bidang Persandian**

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamanan sistem informasi supaya terwujud kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar dan meningkatkan jumlah sistem elektronik sudah teruji keamanannya.

16) **Bidang Kebudayaan**

- Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalan sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli.

17) **Bidang Perpustakaan**

- Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

18) **Bidang Kearsipan**

- Program Pengelolaan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**

➤ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum.

➤ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudi daya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

➤ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.

➤ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

➤ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata.

3) Bidang Pertanian

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.

- Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

➤ Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.

➤ Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

5) Bidang Perindustrian

➤ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembinaan IKM unggulan daerah, pameran produk IKM, dan pembinaan industri penghasil cukai.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

➤ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.

➤ Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) **Sekretariat DPRD**

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.

➤ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) **Perencanaan**

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) **Penelitian dan Pengembangan**

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjangkaran dan fasilitasi serta pemanfaatan hasil kreaativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah, serta penguatan kelembagaan kelitbangan

3) **Keuangan**

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi penganggaran dengan perencanaan.

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) **Kepegawaian**

➤ Program Kepegawaian Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) **Pendidikan dan Pelatihan**

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan non manajerial

f. **Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan**

1) **Inspektorat Daerah**

➤ Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan kegiatan pencegahan korupsi

➤ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. **Unsur Kewilayahan**

1) **Kecamatan**

➤ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayanan publik di kecamatan, pengadaan sarana dan

prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan

➤ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat

➤ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum

➤ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

➤ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat semua elemen.

➤ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.

➤ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penguasaan organisasi kemasyarakatan.

➤ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penanganan konflik sosial.

5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Tabel 5.25
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.181.067.316.041	1,223,009,428,076
1	PENDIDIKAN	686.780.619.473	717,255,941,243
2	KESEHATAN	388.535.537.367	422,314,164,240
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.291.892.640	44,029,206,955
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.430.000.000	1,503,350,800
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.105.714.026	6,832,364,846
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.923.552.535	31,074,399,992
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	233.686.529.181	214,461,606,502
1	TENAGA KERJA	7.818.911.799	7,822,377,525

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	160.684.400	211,159,270
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	49.410.893.754	26,688,407,009
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.537.379.584	25,692,182,631
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.341.904.315	6,744,692,396
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.053.389.258	7,917,062,862
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.539.501.471	16,912,232,679
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.792.290.508	25,011,609,543
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.261.851.489	8,999,089,325
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.002.407.753	15,455,988,608
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.553.709.773	4,500,079,043
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.454.000.000	4,742,894,680
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	129.500.000	9,901,500
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.481.227.229	374,880,000
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.481.227.229	12,680,359,363
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.622.927.662	5,575,400,143
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	20.000.000	5,349,500
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.000.000	144,665,170
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	190.000.000	329,480,800
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.419.892.107	28,701,490,357
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.307.387.366	15,619,702,348
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	343.670.713	322,601,750
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	117.715.258.749	108,739,068,890

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	66.512.663.120	59,776,406,408
2	SEKRETARIAT DPRD	51.202.595.629	48,962,662,482
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	450.668.165.655	437,990,843,597
1	PERENCANAAN	8.144.231.649	7,793,341,032
2	KEUANGAN	436.611.274.075	423,678,804,505
3	KEPEGAWAIAN	4.848.977.431	5,596,080,310
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	456.750.000	623,535,750
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	606.932.500	299,082,000
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.514.916.251	22,632,724,620
1	INSPEKTORAT DAERAH	8.514.916.251	22,632,724,620
VI	UNSUR KEWILAYAHAN	71.682.795.575	67,584,273,454
1	KECAMATAN	71.682.795.575	67,584,273,454
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.679.911.220	7,420,106,160
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.679.911.220	7,420,106,160
Jumlah Total		2.076.390.105.919	2,088,401,798,967

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5.26
Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.181.067.316.041	1,223,009,428,076
A	PENDIDIKAN				686.780.619.473	717,255,941,243
1	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775	139,917,188,510
		persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%		
		persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%		
		persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%		
		persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%		
		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%		
		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka		
		persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%		
		persentase APM SD Sederajat	98.7	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase APK SD Sederajat	104.69	%		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.01	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SD	0.061111	Angka		
		Rasio Siswa/Rombel SD	0.061111	Angka		
		persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%		
		persentase Kepala SD memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka		
		persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%		
		persentase APM SMP Sederajat	89	%		
		persentase APK SMP Sederajat	98.77	%		
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SMP	0.063889	Angka		
		Rasio Siswa/Rombel SMP	0.063889	Angka		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66.25	%		
			-			
		persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka		
		persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%		
		persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%		
		persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%		
		persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	534.915.078.698	577,338,752,733
B	KESEHATAN				388.535.537.367	422,314,164,240
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214	107,602,726,407
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH		
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal		
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		
		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%		
		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%		
		Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
		Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH		
		Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%		
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal		
		persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal		
		persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%		
		persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%		
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk		
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%		
		persentase rumah sehat	87.6	%		
		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26.9	%	10.000.000	1,149,970,500
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	162.379.892.153	313,561,467,333
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				54.291.892.640	44,029,206,955
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59.37	%	9.164.704.000	1,757,697,200
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97.97	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95.7	%	9.081.058.000	109,713,000
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase saluran drainase kondisi baik	69.34	%	200.000.000	285,577,800
4	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	200.000.000	1,041,688,258
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persentase Trotoar Kondisi Baik	73.97	%	200.000.000	1,998,828,500
6	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	89.5	%	22.697.649.250	23,532,252,700
		persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%		
		persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19.61			
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89.51	%	300.000.000	221,448,950
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	12.448.481.390	15,082,000,547
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.430.000.000	1,503,350,800
1	Program Pengembangan Perumahan	persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4	%	316.091.000	306,119,500
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88	%		
2	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	96	%	6.113.909.000	1,197,231,300

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase kawasan kumuh perkotaan	5	%		
		persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%		
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%		
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.105.714.026	6,832,364,846
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang teratih	7	%	946.000.000	1,006,377,500
		persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%		
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%		
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	538.568.000	547,572,400
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%		
		persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6	%		
3	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	330.294.000	1,577,810,000
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	11.290.852.026	3700604946
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				31.923.552.535	31,074,399,992
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000	242,671,600
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	100	%	20.000.000	13,602,350

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
3	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162	653,925,430
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%		
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	23,636,421,060
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%		
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
5	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000	236,374,200
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	97.500.000	86,552,900
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.925.547.159	6,204,852,452
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				233.686.529.181	214,461,606,502
A	TENAGA KERJA				7.818.911.799	7,822,377,525
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73	%	613.000.000	609,703,000
		persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000	128,947,700
		persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%		
		persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%		
		persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%		
3	Program Hubungan Industrial	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83	%	80.000.000	110,289,700

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%		
		persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%		
		persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	6.700.911.799	6,973,437,125
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				160.684.400	211,159,270
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2.66	%	10.000.000	25,100,800
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%		
2	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0.0028	%	42.842.200	38,394,370
		persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0.0028	%		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase desa sayang ibu dan bayi	62.63	%	10.000.000	18,959,200
		persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%		
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000	40,335,500
5	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	0.0039	%	52.842.200	88,369,400

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				49.410.893.754	26,688,407,009
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	-	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	10.000.000	163,297,000
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	20.000.000	-
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	49.380.893.754	26,525,110,009
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.537.379.584	25,692,182,631
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	50.000.000	43,643,400
		persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%		
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53.3	Angka	250.000.000	337,157,200
		Indeks Kualitas Udara	83.87	Angka		
		persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0.067	%		
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	380.000.000	306,169,700

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000	6,337,500
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	70.000.000	16,671,400
6	Program Pengelolaan Persampahan	persentase sampah yang tertangani	60.21	%	3.525.000.000	6,330,914,300
		Cakupan layanan persampahan	64.71	%		
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	18.252.379.584	18,651,289,131
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.341.904.315	6,744,692,396
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89.73	%	693.500.000	616,394,800
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	%	10.000.000	5,408,500
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98.5	%	100.848.300	77,922,500
		persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	1.3	%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.537.556.015	6,044,966,596
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.053.389.258	7,917,062,862

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
1	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000	11,508,100
2	Program Peningkatan Kerja sama Desa	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	15.000.000	0
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	60	%	3.993.000.000	3,790,196,240
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%		
		Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%		
		persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%		
		persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39.47	%		
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	494.917.000	173,102,740
		persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.525.472.258	3,942,255,782
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				16.539.501.471	16,912,232,679

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	423.256.000	493,800,000
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (unmetneed)	10.3	%		
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	1.85	%		
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12.5	%		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88.6	%	7.293.884.000	7,470,149,000
		Pesentase Kepesertaan KB Aktif	75.8	%		
		Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46.15	%		
		Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	45.45	%		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55.99	%	4.245.900.000	4,249,053,450
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.576.461.471	4,699,230,229
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				25.792.290.508	25,011,609,543
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42.03	%	18.589.072.100	17,665,108,590

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%		
		persentase potensi titik parkir yang tertangani	99.12	%		
		persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
		persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		
		persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99.66	%		
		persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33.86	%		
		persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64.09	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	7.203.218.408	7,346,500,953
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.261.851.489	8,999,089,325
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	1.029.911.600	459,768,450
		persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%		
		persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125	1,094,479,500
		persentase layanan publik secara elektronik	55	%		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	6.957.050.764	7,444,841,375
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.002.407.753	15,455,988,608
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000	15,486,400
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6.67	%	330.000.000	318,335,000
3	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0.96	%	95.000.000	23,589,500
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	15.552.407.753	15,098,577,708
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.553.709.773	4,500,079,043
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	Milyar	7.000.000	-
		persentase perusahaan yang bermitra	60	%		
2	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	50	%	7.000.000	76,076,300
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510	119,042,000
		persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%		
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pengendalian penanaman modal	16	%	404.961.000	25,010,500
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.792.345.263	4,279,950,243
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.454.000.000	4,742,894,680
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktif	95.5	%	260.000.000	55,485,600
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase pelatih olahraga bersertifikat	96.5	%	4.094.000.000	4,462,409,080
		persentase prestasi olahraga	62	%		
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	persentase gugus depan yang aktif	100	%	100.000.000	225,000,000
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				129.500.000	9,901,500
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	82.500.000	9,901,500
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				47.000.000	374,880,000
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	66.7	%	47.000.000	374,880,000
		persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60			
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.481.227.229	12,680,359,363

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
1	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	8.2	%	7.580.000.000	8,592,736,300
		persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%		
		persentase pelestarian Sejarah Lokal	9.25	%		
		persentase Pelestarian Cagar Budaya	13.18	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.901.227.229	4,087,623,063
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.622.927.662	5,575,400,143
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0.026	%	1.211.407.950	1,206,394,115
		persentase pertumbuhan jumlah peminjam di perpustakaan	42	%		
		Persentase perpustakaan yang aktif	35	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.411.519.712	4,369,006,028
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				20.000.000	5,349,500
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	60	%	20.000.000	5,349,500
		Persentase audit internal kearsipan	73.33	%		
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				245.000.000	144,665,170

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1.3	kg/m2	235.000.000	137,023,670
		Produktivitas ikan lele	12.7	kg/m2		
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22.52	%	10.000.000	7,641,500
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				190.000.000	329,480,800
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0.04	%	190.000.000	329,480,800
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari		
		persentase Peningkatan Desa Wisata	14.76	%		
		persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%		
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.419.892.107	28,701,490,357
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61.5	Kuintal/ha	18.460.436.207	19,375,673,157
		Produktivitas jagung	54.6	Kuintal/ha		
		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha		
		Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha		
		Produktivitas cabai rawit	50.5	Kuintal/ha		
		Produktivitas cabai besar	65.5	Kuintal/ha		
		Produktivitas tembakau	6.2	Kuintal/ha		
		Produktivitas kopi robusta	7.15	Kuintal/ha		
		Produktivitas kopi arabika	6.5	Kuintal/ha		
		Produktivitas ternak sapi	177.5	Kg/Ekor		
		Produktivitas ternak domba	13.71	Kg/Ekor		
		Produktivitas ternak kambing	13.71	Kg/Ekor		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0.75	Kg/Ekor		
		Produktivitas ternak ayam petelur	10.88	Kg/Ekor		
		persentase kelahiran pedet	56	%		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900	5,424,847,400
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase penanganan penyakit hewan	87	%	651.725.000	453,449,800
		persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%		
4	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1.3	%	260.000.000	3,447,520,000
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.307.387.366	15,619,702,348
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27.42	%	674.979.613	365,483,540
		persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%		
		persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2.41	%		
		persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79.63	%		
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	30.000.000	139,012,200
4	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	2.31	%	20.000.000	-

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99.41	%	30.000.000	16,628,900
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	15.552.407.753	15,098,577,708
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				343.670.713	322,601,750
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78.2	%	343.670.713	322,601,750
		persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20.95	%		
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				117.715.258.749	59,776,406,408
A	SEKRETARIAT DAERAH				66.512.663.120	59,776,406,408
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	33.391.297.995	31,983,027,863
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%		
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	23.9	%		
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325	26,913,022,325
		persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%		
		persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%		
		persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%		
		persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%		
		persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%		
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100			
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800	880,356,220
		persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%		
		persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83.33	%		
		persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%		
		persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%		
		persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%		
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%		
		persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%		
B	SEKRETARIAT DPRD				51.202.595.629	48,962,662,482
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	31.521.979.724	35,398,636,174
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	19.680.615.905	13,564,026,308
		persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%		
		persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%		
		persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100			
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				470.668.165.655	437,990,843,597
A	PERENCANAAN				8.144.231.649	7,793,341,032
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	509.474.400	827,177,000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%		
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	697.772.800	410,479,000
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%		
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%		
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	6.936.984.449	6,555,685,032
B	KEUANGAN				436.611.274.075	423,678,804,505
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	410.851.694.364	400,772,289,874
		persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%		
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%		
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	1.390.608.125	502,808,175
		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%		
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%	619.828.400	683,239,930
		persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%		
		persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95.5	%		
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	23.749.143.186	21,720,466,526
C	KEPEGAWAIAN				4.848.977.431	5,596,080,310
1	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42.36	%	330.762.000	494,729,100
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86.58	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.518.215.431	5,101,351,210
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				456.750.000	623,535,750
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	97	%	456.750.000	623,535,750
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	251.932.500			606.932.500	299,082,000
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	606.932.500	299,082,000
		persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%		
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				8.514.916.251	22,632,724,620
A	INSPEKTORAT DAERAH				8.514.916.251	22,632,724,620
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	628.546.400	5,050,000,000
		persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%		
		persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
		persentase penanganan aduan masyarakat	100	%		
		persentase tindak lanjut hasil temuan	100			
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	337.261.200	3,650,000,000
		persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%		
		persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%		
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	7.549.108.651	13,932,724,620
VI	UNSUR KEWILAYAHAN				71.682.795.575	67,584,273,454
A	KECAMATAN				71.682.795.575	67,584,273,454
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	54.471.908.292	52,392,110,975

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	2.010.980.556	1,979,224,753
		persentase realisasi penerimaan PBB	95	%		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	100	%	14.381.360.632	12,492,445,969
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%		
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	360.991.000	264,000,000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	100	%	457.555.095	456,491,757
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	%		
		persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100	%		
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.679.911.220	7,420,106,160
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.679.911.220	7,420,106,160
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000	505,000,000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335	2,603,897,600
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16.67	%	20.000.000	160,000,000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000	90,000,000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000	781,702,700
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.717.315.885	3,279,505,860
JUMLAH TOTAL					2.076.390.105.919	2,088,401,798,967

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Selain itu, juga terdapat dukungan pembiayaan non APBD yang mendukung program prioritas pemerintah daerah diantaranya USAID IUWASH Tangguh, Baznas, APBN, dll. Sebagai contoh, Kabupaten Temanggung mendapatkan Program USAID IUWASH Tangguh Tahun 2022 - 2027 (5 Tahun). Program tersebut bertujuan untuk mencapai target air minum dan sanitasi aman serta perubahan perilaku hygiene. Untuk mencapai tujuan tersebut sampai dengan Maret 2025 sudah dilakukan beberapa kegiatan antara lain (1) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022-2027, (2) Penyusunan Raperbup Pengelolaan Air Limbah Domestik, (3) Penyusunan Governance Index dan Sanitation Index Tahun 2022-2027, (4) Rangkaian kegiatan bersama masyarakat untuk perubahan perilaku hygiene dan peningkatan akses air minum sanitasi di lokasi percontohan Kabupaten Temanggung, (5) Workshop kesadaran bagi pemangku kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai Adaptasi Perubahan Iklim, (6) Workshop operasional dan pemeliharaan bagi penerima manfaat SPALDS/T, (7) Training enumerator dan survei Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) : Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM, Penyusunan Rencana Bisnis oleh PDAM, Kajian Delineasi Mata Air yang digunakan oleh PDAM baru dilakukan di satu lokasi yaitu mata air Tuk Mulyo, Pandemulyo, Training pemicuan untuk kader di lokasi percontohan dan Training pembuatan jamban untuk KSM yang mendapat DAK.

Selain itu, dalam mendukung pembangunan daerah juga melibatkan stakeholders diluar Perangkat Daerah (OPD) karena dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang terdiri dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Lembaga Sosial lainnya. Khusus untuk TJSLP Kabupaten Temanggung telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. TJSLP dan Lembaga Sosial lainnya sudah mendukung pembangunan daerah dan

perannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengapresiasi kebijakan Forum TJSLP dan Lembaga sosial lainnya yang telah berperan aktif mendukung pembangunan di Kabupaten Temanggung di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bersama Forum TJLSP melaksanakan kegiatan pertemuan bersama membahas agenda kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan kerjasama dengan TJSLP secara rutin tiap tiga bulan sekali. TJSLP di Kabupaten Temanggung berkomitmen sebagian laba untuk program pembangunan daerah, dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu dapat menyalurkan sendiri atau dikumpulkan melalui Forum TJSLP. Pemerintah Daerah berfungsi menyediakan *database* baik berupa program/kegiatan, lokus, dan calon penerima manfaat.

Forum TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya, melainkan sebagai sarana meraih keuntungan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung serta mampu mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil Pemilihan Tahun 2024, bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih memiliki Visi, Misi, dan Program Unggulan yang harus diwujudkan. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui beberapa program yang menjadi program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, antara lain:

1. Penataan *landmark* kabupaten
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan

4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
5. Optimalisasi Pasar Daerah
6. Penguatan dan pelestarian seni budaya
7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
8. Pelayanan dasar bidang pendidikan
9. Pelayanan dasar bidang kesehatan
10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
11. Pelayanan perijinan dan administrasi
12. Integrasi Data
13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam
14. Digitalisasi dan Smart City
15. Pelestarian lingkungan hidup
16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga
19. Peningkatan kualitas tenaga kerja

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan karena menjadi dasar dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, dan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Implementasi semua program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung akan terwujud apabila didukung komitmen semua pihak sehingga terwujud pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung pada tahun 2025.

